



# 2022

## Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal

Kementerian Komunikasi dan Informatika  
Republik Indonesia

Gedung Kominfo  
Medan Merdeka Barat No. 9  
Jakarta Pusat  
10110



Kementerian Komunikasi dan Informatika  
Republik Indonesia

Gedung Kominfo  
Medan Merdeka Barat No. 9  
Jakarta Pusat  
10110

# BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



## BERorientasi Pelayanan

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan
- Melakukan perbaikan tiada henti



## Akuntabel

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi
- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien
- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan



## Kompeten

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
- Membantu orang lain belajar
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik



## Harmonis

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
- Suka menolong orang lain
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif



## Loyal

- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah
- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara
- Menjaga rahasia jabatan dan negara



## Adaptif

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas
- Bertindak proaktif



## Kolaboratif

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama

## Tim Penyusun

**Pengarah**  
Mira Tayyiba

**Pembina**  
Arifin Saleh Lubis

**Penanggung Jawab & Pimpinan Redaksi**  
Hary Aryfiyanto  
Sinthia Fridaningrum

**Editor**  
Astri Nur Afidah  
Ryan Mardiansyah Hidayat  
Harsatya Alif Adiguna  
Reyghana Louisrianda

**Desain & Layout**  
Selaksa

©2023



KOMINFO

**2022**

**Laporan Kinerja  
Jenderal Kementerian  
Komunikasi dan Informatika  
Republik Indonesia**



Versi Digital



[komin.fo/LAKIPSETJEN2022](https://komin.fo/LAKIPSETJEN2022)

Pelajari Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kominfo Tahun 2022 selengkapnya pada versi digital dengan cara memindai QR Code di atas.

**Laporan Kinerja  
Sekretariat  
Jenderal 2022**

Kementerian Komunikasi dan Informatika  
Republik Indonesia

Gedung Kominfo  
Medan Merdeka Barat No. 9  
Jakarta Pusat  
10110

## Daftar Isi

# 01

Daftar Tabel	3
Daftar Gambar	5
Daftar Grafik	5
Kata Pengantar	8
Ringkasan Eksekutif	9

<b>Pendahuluan</b>	<b>15</b>
Latar Belakang	17
Maksud dan Tujuan	19
Permasalahan Strategis & Kebijakan	20
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	26
Sistematika Pelaporan	31

# 03

Opini Terhadap Laporan Keuangan Kementerian Kominfo	70
Persentase (%) Realisasi Target PNBK Kementerian Kominfo	73
Kinerja Lainnya	77
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	77
Badan Publik yang Informatif	79
Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik	81
Lembaga Penyiaran Televisi dan Radio Berjaringan yang Diawasi KPI Pusat dan Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	83
Pengaduan Masyarakat Terhadap Konten Siaran TV dan Radio yang terselesaikan	83

# 02

## Perencanaan Kerja 33

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2020—2024	35
Perjanjian Kinerja Tahun 2022	39
Dukungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo Terhadap Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2022	41
Rincian Rencana Kerja (Renja) Kementerian Kominfo Tahun 2022	43

# 03

## Akuntabilitas Kinerja 45

Capaian Kinerja Organisasi	47
Indeks Reformasi Birokrasi	50
Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kominfo	59
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Kominfo	63
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	66
Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Kominfo	68

# 04

Lembaga Penyiaran TV dan Kategori Program Dengan Indeks Kualitas Program Siaran di Atas 3	84
Jumlah Wartawan yang Mendapat Pelatihan Jurnalistik	86
Perusahaan Pers yang Terverifikasi Secara Faktual	86
Pengaduan dan Penegakan Etika Bidang Pers yang terselesaikan	87
Nilai Indeks Kemerdekaan Pers	88
Peran Sekretariat Jenderal dalam Forum Internasional	89
Realisasi Anggaran	93
Penghargaan	95

## Penutup 99

### Lampiran 103

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2022	103
Lampiran 2. Manual Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Level Eselon I Sekretariat Jenderal Tahun 2022	105
Lampiran 3. Pernyataan Hasil Reviu	107
Lampiran 4. Dokumentasi Kegiatan Pengelolaan Kinerja dan Risiko dengan Pihak Internal dan Eksternal Kementerian Kominfo	108
Lampiran 5. Data Dukung	109

## Daftar Tabel

1. 1	Rincian Penilaian RB Kementerian Kominfo Tahun 2021	22
1. 2	Gambaran Kondisi Capaian Tahun 2021, Kondisi yang Diinginkan Tahun 2022, dan Target Tahun 2024	23
2. 1	Sasaran Strategis Kementerian Kominfo	36
2. 2	Sasaran dan Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal tahun 2020—2024	37
2. 3	Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2022	39
2. 4	Rincian Rencana Kerja Sekretariat Jenderal Tahun 2022	43
3. 1	Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2022	47
3. 2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien	49
3. 3	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Kominfo	50
3. 4	Target Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Kominfo pada Renstra Sekretariat Jenderal dan Perjanjian Kinerja	51
3. 5	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Kominfo tahun 2021—2022	51
3. 6	Kategori dan Predikat Indeks Reformasi Birokrasi	52
3. 7	Hasil Antara Kementerian Kominfo Tahun 2021—2022	53
3. 8	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal	54
3. 9	Target Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal pada Renstra Sekretariat Jenderal 2020—2024 dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal	54
3. 10	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Tahun 2022	55
3. 11	Upaya Sekretariat Jenderal untuk Meningkatkan Nilai RB	58
3. 12	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kominfo	59
3. 13	Target Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kominfo pada Renstra Sekretariat Jenderal 2020—2024 dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal	60
3. 14	Kategori Nilai Kinerja Anggaran	60
3. 15	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kominfo Tahun 2021-2022	62
3. 16	Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	63
3. 17	Target Indeks SPBE pada Renstra Sekretariat Jenderal 2020—2024 dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal	63
3. 18	Capaian Indeks Profesionalitas ASN	66
3. 19	Target Indeks Profesionalitas ASN pada Renstra Sekretariat Jenderal 2020—2024 dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal	66

---

3. 20	Bobot Penilaian Dimensi Indeks Profesionalitas ASN	67
3. 21	Kategori Tingkat Profesionalitas ASN	67
3. 22	Capaian Nilai SPIP Kementerian Kominfo	68
3. 23	Target Nilai SPIP Kementerian Kominfo pada Renstra Sekretariat Jenderal 2020—2024 dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal	68
3. 24	Capaian Opini Terhadap Laporan Keuangan Kementerian Kominfo	70
3. 25	Target Opini Terhadap Laporan Keuangan Kementerian Kominfo pada Renstra Sekretariat Jenderal 2020—2024 dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal	70
3. 26	Capaian Persentase (%) Realisasi Target PNBK Kementerian Kominfo	73
3. 27	Rincian PNBK Per Unit Kerja Kementerian Kominfo Tahun 2022	74
3. 28	Rincian Per Jenis PNBK Kementerian Kominfo Tahun 2020—2022	75
3. 29	Capaian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2022	77
3. 30	Metode dan Jumlah Penyelesaian Sengketa Informasi	78
3. 31	Permohonan Berdasarkan jenis Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi	78
3. 32	Progres penyelesaian sengketa informasi tahun 2020 – 2022	78
3. 33	Kategori Badan Publik yang dinilai oleh KIP	79
3. 34	Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022	81
3. 35	Tren Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2020—2022	93
3. 36	Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2020—2022 Berdasarkan Jenis Belanja	93
3. 37	Tren Pagu Sekretariat Jenderal tahun 2020—2022 berdasarkan Sumber Dana	94
3. 38	Realisasi Anggaran Kuasi Sekretariat Jenderal Tahun 2022	94



## Daftar Gambar

1. 1	Area Perubahan yang Menjadi Tujuan RB	20
1. 2	Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo	27
2. 1	Dukungan Lembaga Kuasi Publik terhadap Pencapaian Prioritas Nasional 7	42
3. 1	Struktur Penilaian Tingkat Kematangan SPBE	65
3. 2	Nilai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Kominfo Tahun 2021	97
3. 3	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Awards Terbaik IV Tahun 2022 Kategori Kementerian	97
3. 4	Piagam Indeks Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara	98
3. 5	BKN Award 2022: Peringkat 1 Pemanfaatan Data Sistem Informasi dan CAT	98
3. 6	BKN Award 2022: Peringkat 5 Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja	98
3. 7	Instansi Pilot Project Terbaik III Kategori Kementerian/ LPNK dalam Penerapan Sistem Informasi Kinerja Terintegrasi	98

## Daftar Grafik

1. 1	Nilai RB Kominfo 2016-2021	21
1. 2	Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2022	25
1. 3	Komposisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin	29
1. 4	Komposisi Pegawai Sekretariat Jenderal berdasarkan Satuan Kerja	30
1. 5	Komposisi Pegawai Sekretariat Jenderal berdasarkan Golongan dan Ruang	30
3. 1	Hasil Penilaian Badan Publik Tahun 2022	80
3. 2	Indeks IKP di 34 Provinsi dan Nasional Tahun 2022	82
3. 3	Pengaduan Isi Siaran Periode Tahun 2016-2022	84
3. 4	Indeks Kualitas Program Siaran Televisi berdasarkan Lembaga Penyiaran Tahun 2022	85
3. 5	Progres Penyelesaian Pengaduan Bidang Pers Tahun 2019—2022	87
3. 6	Nilai IKP Tahun 2020—2022	88



## **Mira Tayyiba**

Sekretaris Jenderal Kementerian  
Komunikasi dan Informatika

---



## Kata Pengantar

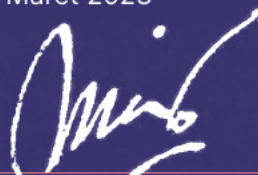
Segala puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Tahun 2022 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2022 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dijalankan oleh Sekretariat Jenderal tahun 2022.

Penyusunan Laporan Kinerja ini juga sebagai bentuk implementasi dari amanat pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sekretariat Jenderal merupakan Unit Organisasi pendukung yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya memberikan fasilitas dan dukungan pemenuhan kebutuhan baik untuk Pimpinan serta seluruh Satuan Kerja di Kementerian Kominfo. Laporan Kinerja ini akan menjelaskan mengenai pencapaian yang telah dilakukan oleh Sekretariat Jenderal dalam memenuhi Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Capaian kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2022 merupakan capaian kinerja yang diperoleh dari kontribusi seluruh Satuan Kerja dan pihak-pihak terkait lainnya. Oleh karena itu, kami sampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama dengan baik. Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak dan utamanya dapat dijadikan referensi dalam peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal dimasa mendatang.

Jakarta, 17 Maret 2023



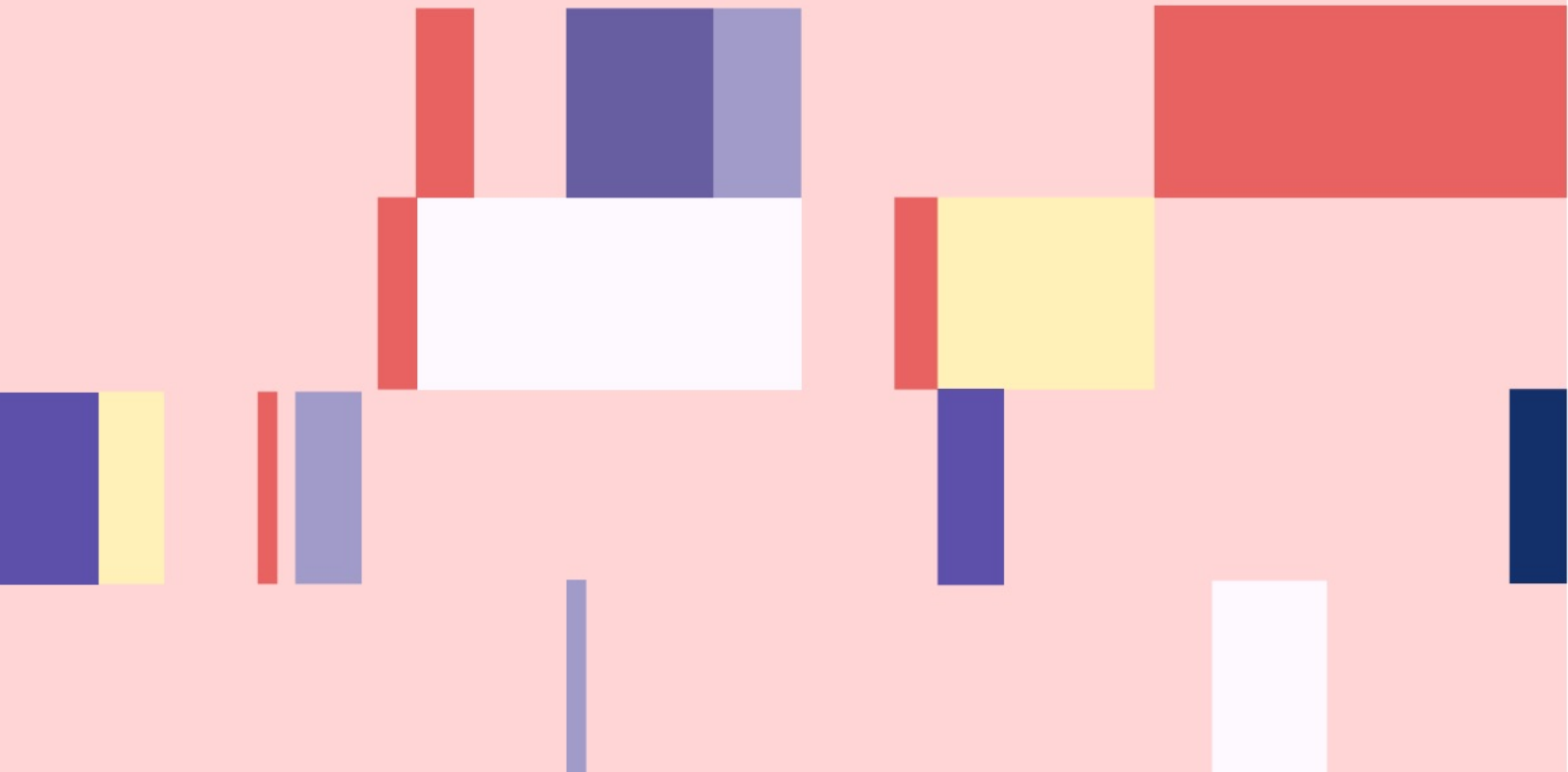
---

Mira Tayyiba

# Ringkasan Eksekutif

RE

Sekretariat Jenderal  
Kementerian Komunikasi dan Informatika  
Republik Indonesia

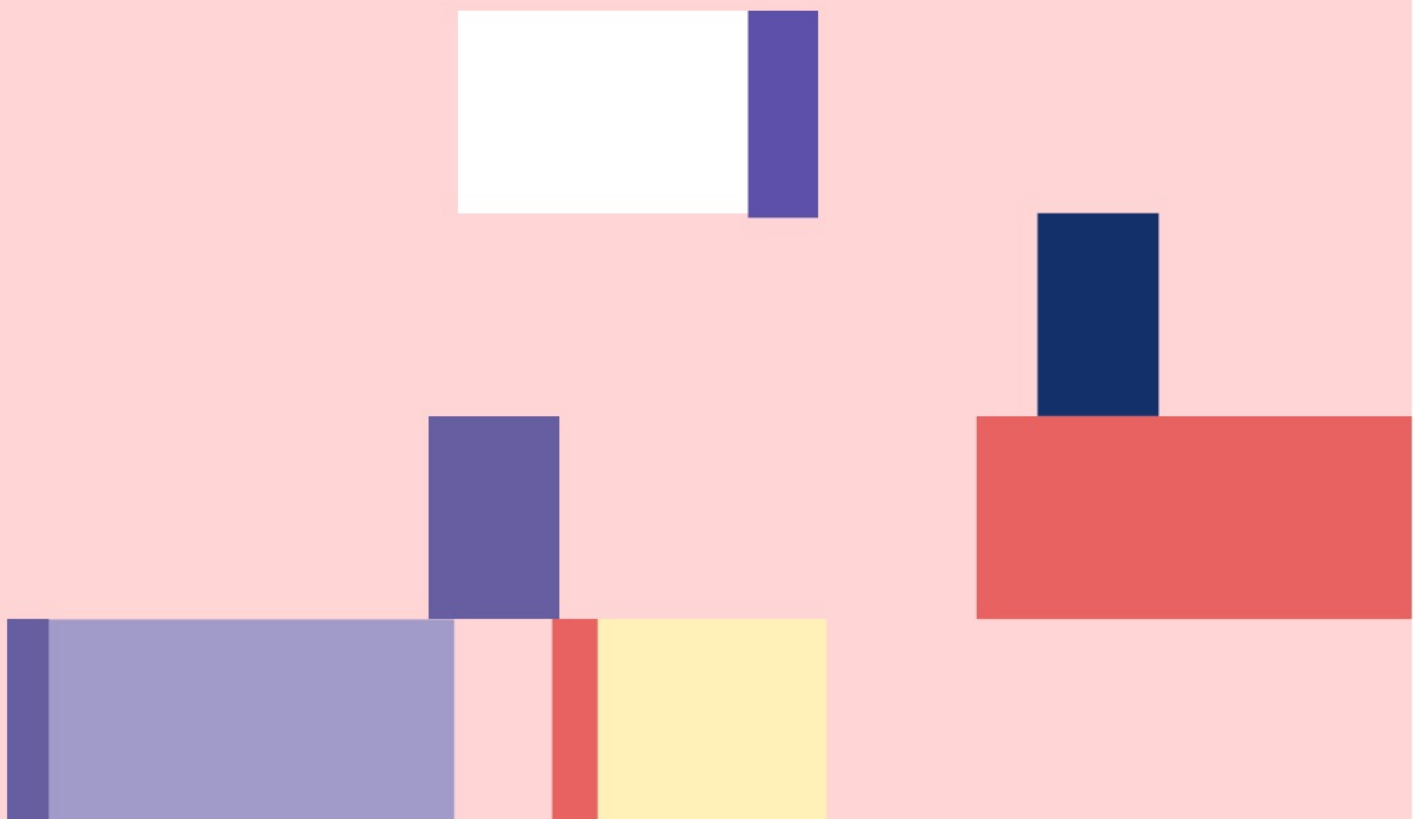


## Fokus Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Tahun 2020—2024, Sekretariat Jenderal diarahkan untuk melakukan transformasi manajemen internal dalam mendukung Kementerian Kominfo melaksanakan transformasi digital nasional.

Manajemen internal sendiri, merupakan salah satu faktor penting yang menjadi fondasi kekuatan Kementerian Kominfo, dimana kapasitas dan kapabilitas manajemen internal merupakan faktor penunjang keberhasilan Kementerian Kominfo untuk mencapai target-target prioritas nasional.

Tahun 2022, merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2020—2024. Perencanaan strategis tersebut dituangkan secara konkret ke dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo tahun 2022, yang di dalamnya memuat informasi kinerja, program, kegiatan, *output*, target, dan kebutuhan anggarannya. Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo menetapkan target penyelesaian yang lebih agresif dalam implementasi kegiatan-kegiatan yang direncanakan sepanjang tahun 2022 untuk mendorong percepatan transformasi manajemen internal.

Pada tahun 2022 untuk penyelesaian target-target yang telah ditetapkan, Sekretariat Jenderal mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 676.573.055.000,- meningkat sebesar Rp. 218.370.387.000 atau 47,66% dari alokasi anggaran tahun sebelumnya yakni sebesar Rp. 458.202.668.000. Dimana alokasi anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan program dukungan manajemen di lingkungan Sekretariat Jenderal.



Dalam mencapai kinerja tahun 2022, terjadi dinamika yang menjadi tantangan bagi Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo untuk tetap *on track* dengan target dan rencana kinerja yang sudah disusun. Tantangan tersebut di antaranya adalah belum optimalnya pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, belum optimalnya pengelolaan barang milik negara, indeks profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) masih rendah, belum optimalnya pengelolaan manajemen ASN di lingkungan Kementerian Kominfo, belum optimalnya tata kelola Pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dan kurang maksimalnya nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA). Dalam menyikapi tantangan-tantangan yang ada, Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo terus melakukan berbagai upaya melalui kegiatan-kegiatan yang saling bersinkronisasi yang diharapkan dapat menghadapi dan menyelesaikan semua tantangan yang ada. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, Pengelolaan Organisasi dan SDM, Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Sekretariat Jenderal, Legislasi dan Litigasi, Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi, Pengelolaan Administrasi dan Kerjasama Internasional, Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Peningkatan Kualitas Konten Penyiaran, dan Penguatan Lembaga Pers dan Jurnalis.

Terlepas adanya berbagai dinamika yang memengaruhi pelaksanaan rencana kinerja dan kinerja, secara umum Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo dapat memberikan *deliverables* yang baik. Pada target kinerja indeks reformasi birokrasi pada level Kementerian didapatkan nilai sebesar 79,01 berdasarkan penilaian dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sedangkan pada target kinerja indeks reformasi birokrasi pada level Sekretariat Jenderal berdasarkan hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) mendapat nilai 90,77. Kemudian pada indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kominfo tercapai 92,64. Sedangkan untuk indikator kinerja Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Kominfo mendapatkan nilai sebesar 3,82. Nilai ini merupakan hasil penilaian tahun 2021 mengingat pada tahun 2022, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara tidak melaksanakan penilaian terkait indeks SPBE tersebut.

Untuk indikator kinerja selanjutnya yaitu Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapatkan nilai sebesar 82,43. Sedangkan untuk indikator kinerja nilai sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Kominfo tercapai dengan nilai 3,08. Sementara itu, untuk indikator kinerja Opini terhadap Laporan Keuangan Kementerian Kominfo, Kementerian Kominfo berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kemudian untuk indikator kinerja Persentase (%) Realisasi Target PNBK Kementerian Kominfo tercapai 109,59% atau sebesar Rp. 27.128.569.522.755

Secara rinci, capaian kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

## SP.1 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien

Indeks Reformasi Birokrasi berdasarkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB):



Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kominfo

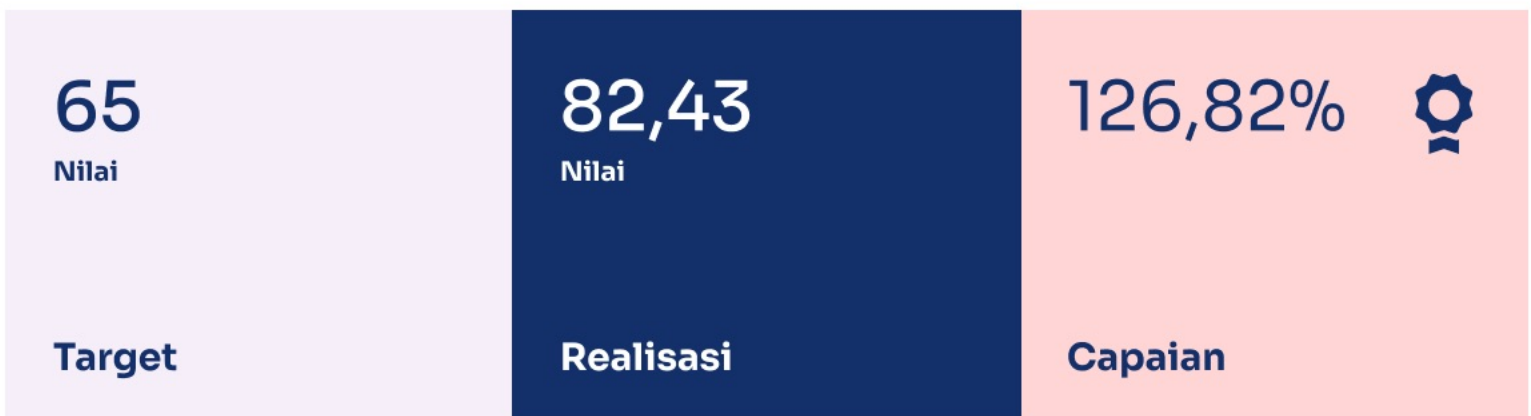




Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Kominfo  
(berdasarkan penilaian KemenPAN RB)



Indeks Profesionalitas ASN



Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Kominfo  
(berdasarkan penilaian BPKP)



### Opini terhadap Laporan Keuangan Kementerian Kominfo



## SP.2 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien

Persentase (%) Realisasi Target PNBK Kementerian Kominfo



Tahun 2022 dengan segala dinamika yang ada menjadi tantangan tersendiri bagi Sekretariat Jenderal untuk mencapai kinerja yang ditargetkan. Akan tetapi, hal ini menjadi bagian dari proses pembelajaran dalam memiliki tata kelola pemerintahan yang lebih matang, lebih tangguh dan *agile* untuk menghadapi permasalahan ke depan.

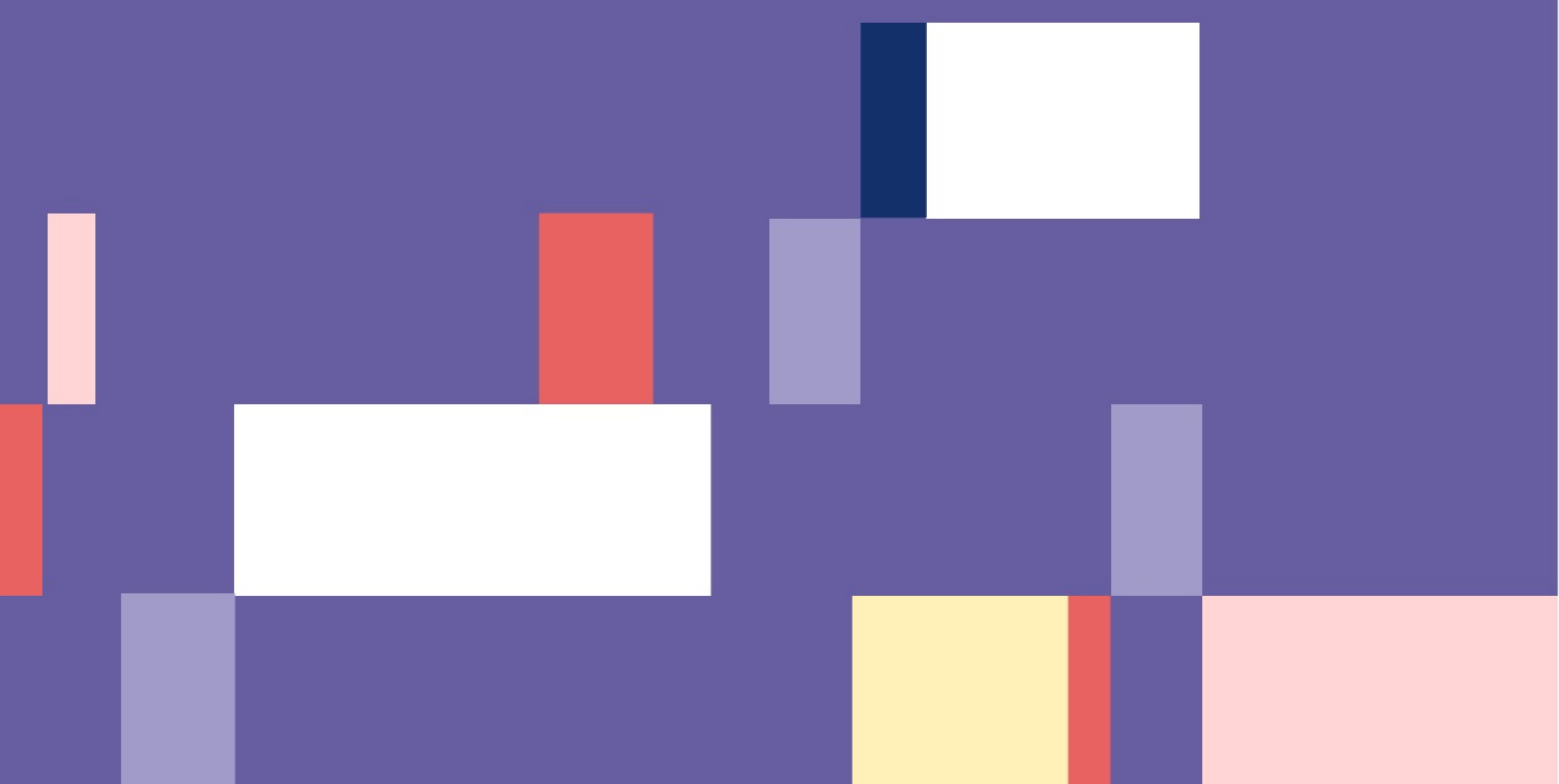
Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan manajemen, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja guna meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan publik. Hal ini dicerminkan dengan upaya perbaikan atas setiap sistem manajemen yang dimiliki, antara lain melalui pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, digitalisasi serta adaptasi terhadap teori/praktik terbaik dan terkini.

# Pendahuluan

## Bab I

Sekretariat Jenderal  
Kementerian Komunikasi dan Informatika  
Republik Indonesia

- Latar Belakang
- Maksud dan Tujuan
- Permasalahan Strategis dan Kebijakan
- Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- Komposisi Pegawai
- Sistematika Pelaporan



Pada hakikatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Untuk itu segenap jajaran pimpinan dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo terus bertransformasi menjadi birokrasi yang bermanfaat untuk masyarakat.



## 1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan arahan Presiden dan fokus pembangunan nasional, Kementerian Kominfo akan fokus pada akselerasi transformasi digital nasional. Transformasi digital pada sektor pemerintahan akan bermanfaat dalam mendukung akselerasi dan membuat kerja pasca pandemi menjadi efektif dan efisien.

Transformasi digital dapat mempermudah kerja dan koordinasi antara Kementerian Lembaga atau Pemerintah Daerah khususnya pada pelayanan publik. Hal ini akan mewujudkan ekosistem budaya kerja yang adaptif, kolaboratif, dan tertata.

Sekretariat Jenderal selaku penggerak utama Reformasi Birokrasi, dan terus berupaya menggerakkan dan meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Kominfo. Dalam rangka penguatan reformasi birokrasi, Sekretariat Jenderal terus berupaya meningkatkan implementasi Manajemen Internal. Kapasitas dan kapabilitas manajemen internal merupakan sebuah fondasi yang menunjang keberhasilan Kementerian Kominfo untuk mencapai target-target prioritas nasional. Dukungan manajemen internal di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal berperan untuk menjalankan berbagai fungsi, antara lain bidang penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana internal, sistem dan infrastruktur TIK, perencanaan, penyelenggaraan keuangan, pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan organisasi, penguatan koordinasi kelembagaan nasional dan internasional, hukum, serta komunikasi hubungan masyarakat.

Pengelolaan manajemen internal yang profesional akan mendukung pencapaian tujuan strategis kementerian. Untuk itu, Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo terus berupaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan manajemen internal.

# Mendukung transformasi digital nasional



0 2045

## 1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo tahun 2022 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo.

Tujuan penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo tahun 2022 adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada publik atas kinerja yang telah dicapai oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat Jenderal untuk meningkatkan kinerja pada tahun-tahun ke depan.



## 1.3 Permasalahan Strategis & Kebijakan

Kondisi atau hal-hal yang perlu diperhatikan atau dikedepankan dalam merumuskan program-program Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo karena dampaknya yang signifikan untuk mendukung pencapaian tujuan strategis Kementerian Kominfo sehingga perlu diantisipasi antara lain yang bersifat penting,

mendasar, berjangka pendek, menengah maupun panjang, dalam rangka meningkatkan Kualitas Layanan dan Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan melalui Transformasi Manajemen Internal di masa yang akan datang.

### a. Permasalahan Strategis

Permasalahan strategis terkait pembangunan terutama di sisi hulu adalah tata kelola birokrasi pemerintahan yang belum optimal, untuk itu perlu dilakukan perbaikan melalui pelaksanaan agenda reformasi birokrasi. Hal ini juga sejalan dengan arahan presiden untuk menggerakkan birokrasi yang berdampak dan mempercepat penyelesaian masalah pembangunan.

#### **Belum Optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Kominfo**

Reformasi Birokrasi (RB) bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN), mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN).

Adapun area perubahan yang menjadi tujuan RB meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan yang terdiri atas:

	Manajemen perubahan/pola pikir ( <i>mindset</i> ) dan budaya kerja ( <i>cultureset</i> )		Sumber daya manusia aparatur
	Peraturan perundang-undangan		Pengawasan
	Kelembagaan		Akuntabilitas
	Tatalaksana		Pelayanan publik

▲ Gambar 1. 1 Area Perubahan yang Menjadi Tujuan RB

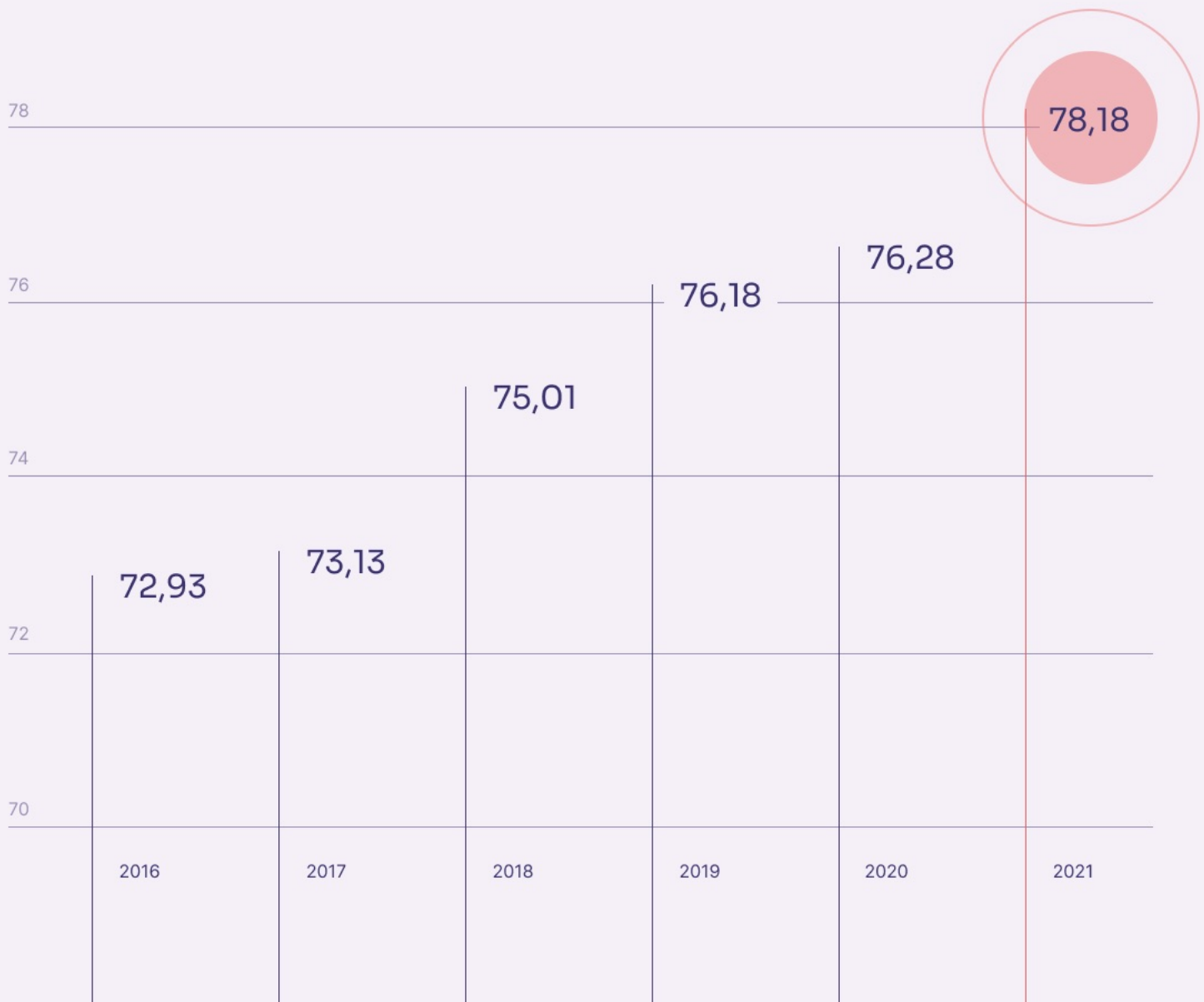


Sasaran RB Kementerian Kominfo adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi serta mendorong percepatan transformasi digital di internal dan eksternal Kementerian Kominfo.

Kementerian Kominfo pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 telah menunjukkan progres yang dibuktikan dengan peningkatan nilai RB dengan rincian sebagai berikut:

## Nilai RB Kominfo 2016-2021

Grafik 1. 1 Nilai RB Kominfo



Meskipun nilai RB Kementerian Kominfo setiap tahun meningkat, tentunya masih perlu adanya upaya perbaikan terhadap komponen penilaian baik pada Komponen Pengungkit maupun Komponen Hasil seperti rincian penilaian RB tahun 2021 yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Berdasarkan rincian penilaian RB pada tabel di atas, masih terdapat ruang perbaikan untuk meningkatkan nilai RB sehingga diharapkan dapat mewujudkan tata kelola Kementerian Kominfo yang efektif, efisien dan akuntabel dalam mendukung program pembangunan pemerintah.

No	Komponen Penilaian	Bobot	Indeks RB Tahun 2021
<b>A. Komponen Pengungkit</b>			
I.	Pemenuhan	20,00	19,05
II.	Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,82
III.	Reform	30,00	20,01
<b>Total Komponen Pengungkit</b>		<b>60,00</b>	<b>45,88</b>
<b>B. Komponen Hasil</b>			
I.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,71
II.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,25
III.	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,11
IV.	Kinerja Organisasi	10,00	7,23
<b>Total Komponen Hasil</b>		<b>40,00</b>	<b>32,30</b>
<b>Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)</b>		<b>100,00</b>	<b>78,18</b>

▲ Tabel 1. 1 Rincian Penilaian RB Kementerian Kominfo Tahun 2021



## b. Kondisi saat ini (Capaian 2021) dan kondisi yang diinginkan (Target 2022), dan Target akhir periode RPJMN/RENSTRA 2024

Pandemi COVID-19 juga merupakan momentum pelaksanaan percepatan transformasi digital Indonesia karena menjadi salah satu kunci dalam mengupayakan pertumbuhan berkelanjutan dan membangun bangsa yang lebih tangguh.

Pemanfaatan teknologi digital telah terbukti mampu berkontribusi sebagai daya unkit pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mendorong transformasi digital yang menjadi fokus Kementerian Kominfo.

No	Program Kerja Prioritas	Kondisi saat ini (2021)	Kondisi yang diinginkan (2022)	Target RPJMN/RENSTRA (2024)
1.	Penyediaan BTS 4G di Wilayah 3T	78,18	80	84
2.	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	67,73	70,5	75
3.	Pengelolaan Kinerja Anggaran	93,11	87	88
4.	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Rp25.454.087.025.119	Rp24.755.383.648.000	Rp24.571.039.152.075
5.	Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Kominfo	3,82	3,9	4,2
6.	Pengelolaan Profesionalitas ASN Kementerian Kominfo	33,10	65 (skala 1-100)	N/A
7.	Pengelolaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Kominfo	3,02	3,00 (skala 1-5)	3,80
8.	Opini terhadap Laporan Keuangan Kementerian Kominfo	WTP	WTP	WTP








▲ Tabel 1. 2 Gambaran Kondisi Capaian Tahun 2021, Kondisi yang Diinginkan Tahun 2022, dan Target Tahun 2024

## c. Kebijakan

Untuk mengatasi permasalahan sebagaimana tersebut di atas, maka Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo merumuskan kebijakan-kebijakan yaitu:

	1	Penyelesaian legislasi primer (Revisi UU, PP ataupun Permenkominfo);		6	Peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran dan pencapaian laporan keuangan WTP;
	2	SDM yang memiliki leadership, kompetensi sesuai bidang teknologi yang dibutuhkan, dan dengan kuantitas yang memadai;		7	Branding, promosi, dan diseminasi informasi terkait program-program kerja Kemenkominfo;
	3	Penataan organisasi dan tata kerja dengan menyesuaikan perkembangan teknologi;		8	Penguatan pengelolaan kerjasama internasional; dan
	4	Digitalisasi seluruh proses bisnis, layanan dan administrasi internal kementerian;		9	Peningkatan nilai Indeks Reformasi Birokrasi.
	5	Pengelolaan program dan akuntabilitas kinerja;			

Penjabaran terhadap arah kebijakan dan strategi Sekretariat Jenderal akan dilakukan di Program Dukungan Manajemen dan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja untuk 5 (lima) tahun ke depan melalui tujuh kegiatan yaitu:

	1	Legislasi dan Litigasi;		5	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi;
	2	Pengelolaan Organisasi dan SDM;		6	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
	3	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Sekretariat Jenderal;		7	Pengelolaan Administrasi dan Kerjasama Internasional.
	4	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja;			

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, Sekretariat Jenderal memerlukan berbagai macam dukungan sumber daya, sarana dan prasarana yang memadai, regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Untuk itu, alokasi anggaran akan direncanakan secara terstruktur dan sistematis untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan akan menghasilkan dampak yang optimal.

Proses penyusunan indikasi pendanaan untuk periode 2020-2024 menggunakan dasar perhitungan kebutuhan anggaran untuk mencapai target-target yang ditetapkan.

Sebagai ilustrasi disampaikan dalam tabel di bawah ini terkait anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2020, 2021, dan 2022.

### Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2022

Grafik 1. 2 Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2022



## 1.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kominfo mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Sebagai tindak lanjut Perpres tersebut, dan dalam rangka mengatur tugas dan fungsi pada masing-masing satuan kerja di lingkungan Kementerian Kominfo, telah ditetapkan Peraturan Menteri (PM) Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Kominfo.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo menyelenggarakan fungsi:

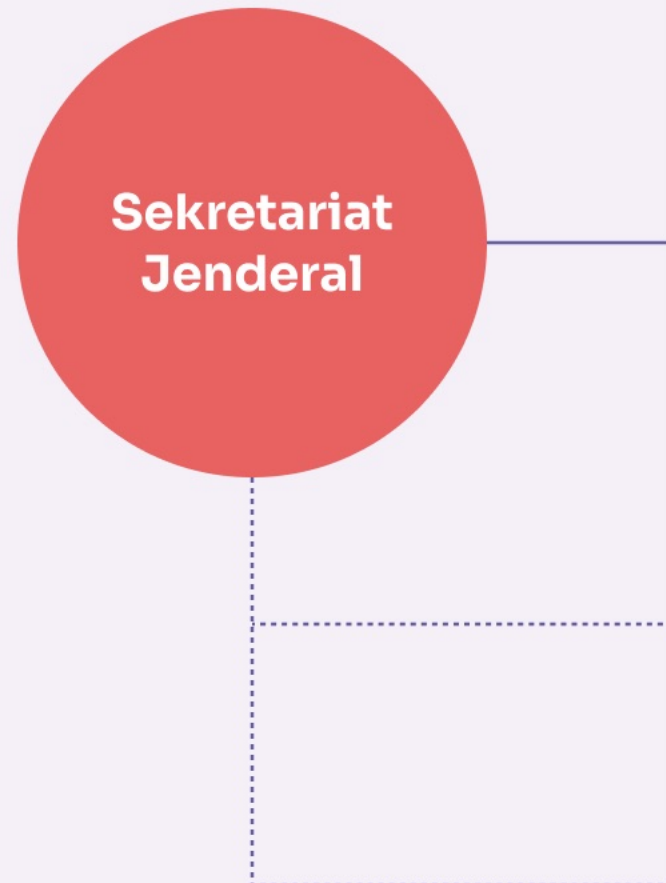
1. Koordinasi kegiatan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
8. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika;

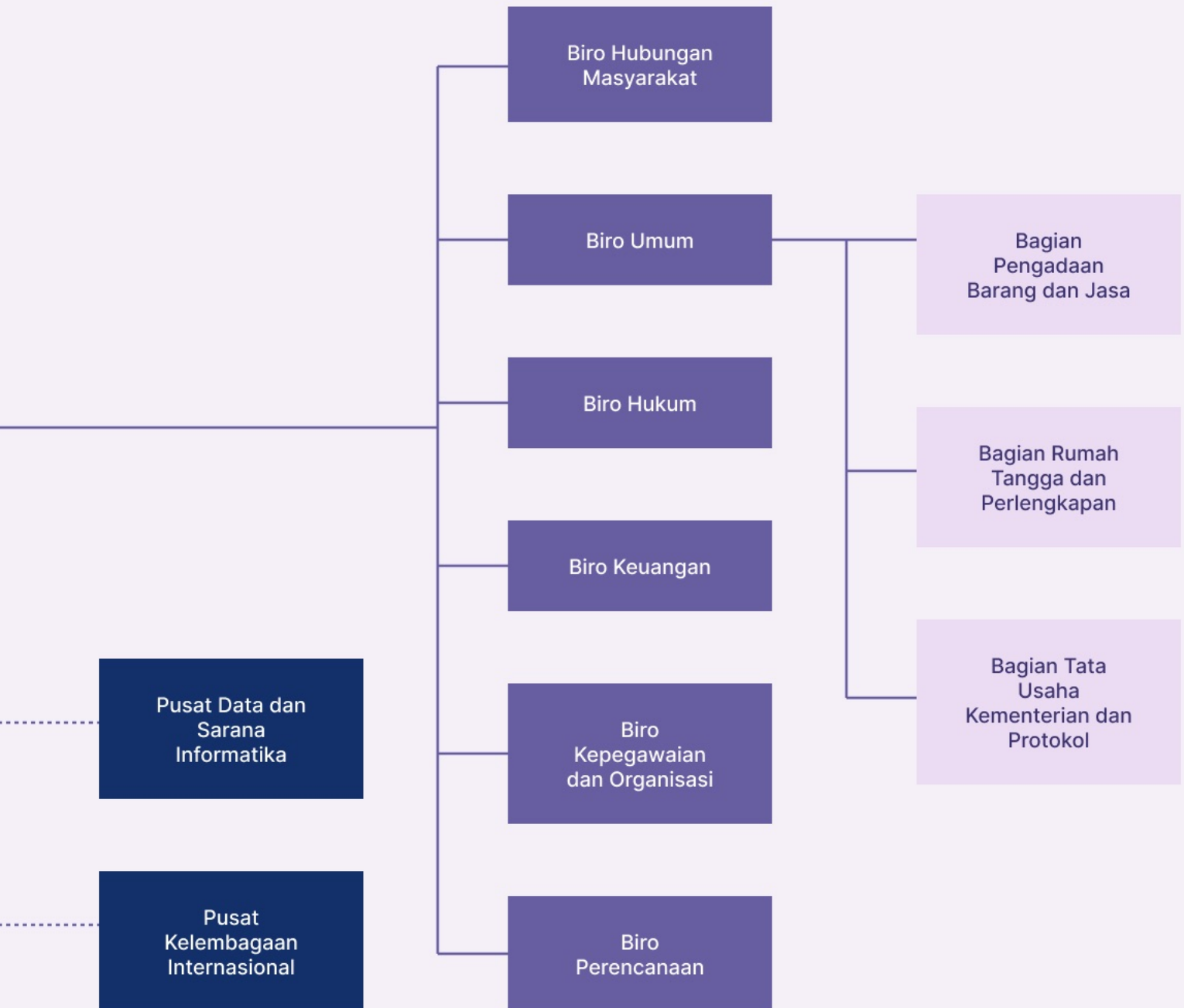
Dalam menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal, Kementerian Kominfo, Sekretaris Jenderal dibantu oleh:

1. 6 (enam) Unit Kerja Eselon II yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Jenderal, yang terdiri dari:
  - a. Biro Perencanaan
  - b. Biro Kepegawaian dan Organiasai
  - c. Biro Keuangan
  - d. Biro Hukum
  - e. Biro Umum
  - f. Biro Hubungan Masyarakat
2. 2 (dua) Organisasi Pusat di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Kominfo yang terdiri dari:
  - a. Pusat Data dan Sarana Informatika
  - b. Pusat Kelembagaan Internasional
3. Selain itu, terdapat 3 (tiga) unit organisasi di luar PM Kominfo Nomor 12 Tahun 2021 yang merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang berada di bawah koordinasi Kementerian Kominfo, berbentuk Sekretariat, yaitu:
  - a. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia, ditetapkan melalui PM Kominfo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang bertugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan wewenangnya.
  - b. Sekretariat Komisi Informasi Pusat, ditetapkan melalui PM Kominfo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat yang bertugas melaksanakan dukungan teknis dan administratif kepada Komisi Informasi Pusat dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.
  - c. Sekretariat Dewan Pers, ditetapkan melalui PM Kominfo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pers yang bertugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada Dewan Pers dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika

Sumber: PM Kominfo No. 12 Tahun 2021







## 1.5 Komposisi Pegawai

### Total Pegawai

939

Pegawai

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kominfo didukung oleh 939 orang pegawai dari berbagai satuan kerja dengan komposisi sebagai berikut:

▼ Grafik 1.3 Komposisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin  
Sumber: Kementerian Kominfo, 2022

### Jenis Kelamin



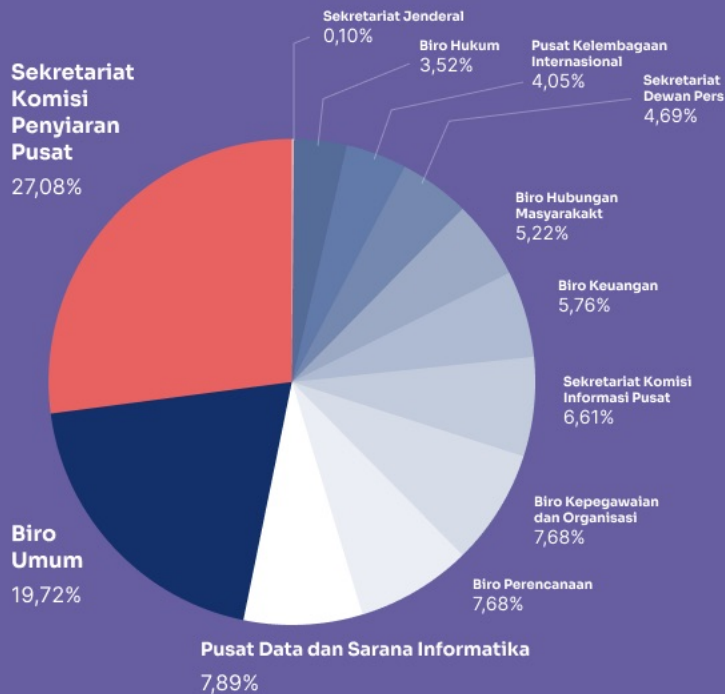
61,34%

**Pria** 576 Orang

38,66%

**Wanita** 363 Orang

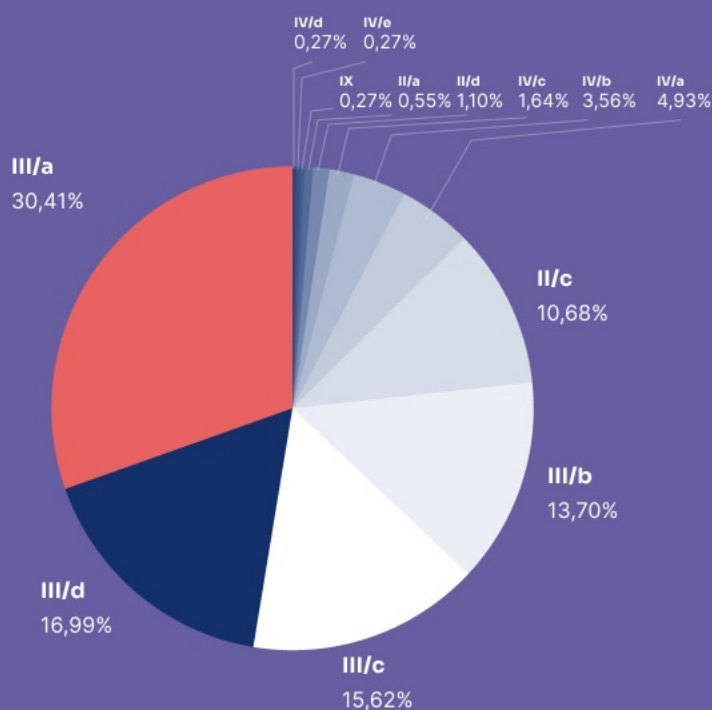
## Satuan Kerja



Sekretariat Jenderal	1	Pusat Data dan Sarana Informatika	74
Biro Perencanaan	72	Pusat Kelembagaan Internasional	39
Biro Kepegawaian dan Organisasi	72	Sekretariat Komisi Informasi Pusat	62
Biro Keuangan	54	Sekretariat Komisi Penyiaran Pusat	254
Biro Hukum	33	Sekretariat Dewan Pers	44
Biro Umum	185		
Biro Hubungan Masyarakat	49		

◀ Grafik 1. 4 Komposisi Pegawai Sekretariat Jenderal berdasarkan Satuan Kerja  
 Sumber: Kementerian Kominfo, 2022

## Golongan dan Ruang



II/a	2	IV/a	18
II/c	39	IV/b	13
II/d	4	IV/c	6
III/a	111	IV/d	1
III/b	50	IV/e	1
III/c	57	IX	1
III/d	62		

◀ Grafik 1. 5 Komposisi Pegawai berdasarkan Golongan dan Ruang  
 Sumber: Kementerian Kominfo, 2022

## 1.6 Sistematisa Pelaporan

Sistematisa penulisan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

### a. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi, serta peran Sekretariat Jenderal terkait dukungan manajemen internal.

### 3. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal.

### 4. Penghargaan

Pada subbab ini menyampaikan penghargaan-penghargaan yang diterima Sekretariat Jenderal selama Tahun 2022.

### b. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai rencana strategis Sekretariat Jenderal dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2022.

### d. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Sekretariat Jenderal, upaya perbaikan, inovasi dan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh Sekretariat Jenderal untuk meningkatkan kinerjanya.

### c. Bab III Akuntabilitas Kinerja

#### 1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap sasaran program organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

#### 2. Kinerja Lainnya

Pada subbab ini diuraikan kinerja dari kuasi publik yang mendukung prioritas nasional dalam upaya penyempurnaan proses bisnis maupun peningkatan layanan publik.

### e. Lampiran

Pada bagian ini menyajikan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang telah ditandatangani Sekretaris Jenderal, Rincian Target Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2022, Pernyataan Reviu oleh Inspektorat Jenderal, dan Dokumentasi Kegiatan Pengelolaan Kinerja dan Risiko dengan pihak internal dan eksternal Kementerian Kominfo.



# REFORMASI B

Kementerian Komunka



# Perencanaan Kinerja

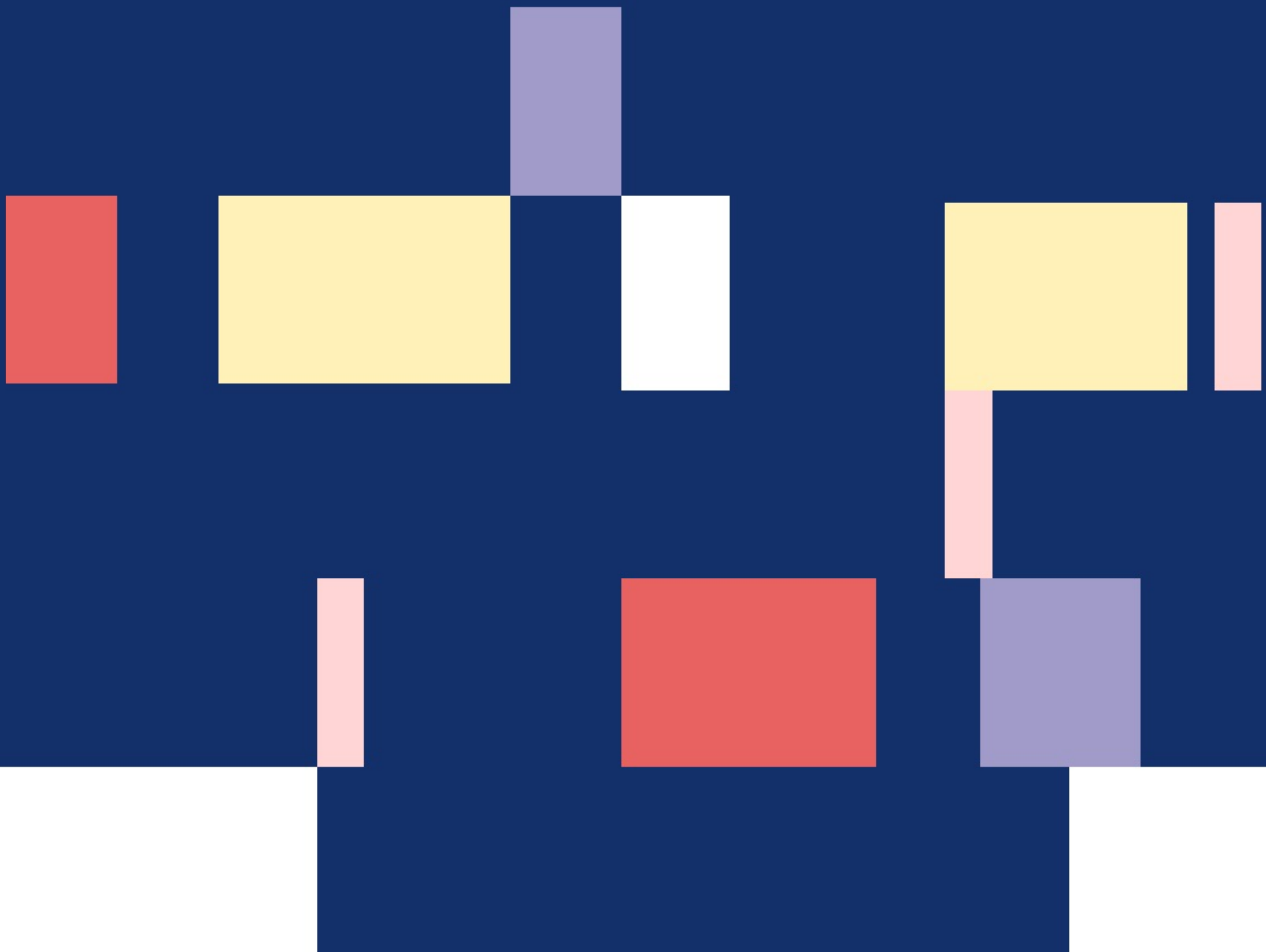
## Bab II

Sekretariat Jenderal  
Kementerian Komunikasi dan Informatika  
Republik Indonesia

- Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2020—2024
- Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- Dukungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo Terhadap Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2022
- Rincian Rencana Kerja (Renja) Kementerian Kominfo Tahun 2022

Perencanaan kinerja didefinisikan sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui rencana kinerja tahunan.

Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi organisasi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen rencana kinerja memuat beberapa informasi tentang sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja program maupun kegiatan.



## 2.1 Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2020—2024

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo Tahun 2020—2024 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kominfo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Kominfo 2020—2024, dan menjadi pedoman dalam arah kebijakan Sekretariat Jenderal 5 (lima) tahun ke depan khususnya dalam bidang manajemen internal.

Dalam pelaksanaannya, transformasi digital memiliki tantangan mulai dari ketersediaan, pemerataan dan kualitas infrastruktur TIK baik bagi masyarakat maupun pemerintahan, pemenuhan SDM talenta digital, hingga meningkatnya risiko keamanan siber karena peningkatan arus data yang eksponensial. Transformasi digital akan mengakselerasi dan membuat berbagai aktivitas kerja pasca pandemi akan semakin efisien dan efektif.

Agenda transformasi digital nasional tidak bisa berjalan hanya dilakukan oleh pemerintah sendiri, melainkan diperlukan dukungan semua pihak, seperti masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, dan penyelenggara teknologi komunikasi sehingga pembangunan transformasi digital dapat berjalan dengan baik.

## Sasaran Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika

	SS.01	Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau
	SS.02	Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital
	SS.03	Meningkatnya konektivitas layanan pos
	SS.04	Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional
	SS.05	Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos dan informatika
	SS.06	Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis
	SS.07	Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital
	SS.08	Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah
	SS.09	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik
	SS.10	Terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik

▲ Tabel 2.1 Sasaran Strategis Kementerian Kominfo

Sumber: Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo, 2021



Sesuai tugas dan fungsinya, Sekretariat Jenderal berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan Sasaran Strategis 10, yaitu “Terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik”. Berikut indikator kinerja yang digunakan dalam mewujudkan Sasaran Strategis tersebut. Kemudian dari Sasaran Strategis 10 tersebut diturunkan ke dalam Program Dukungan Manajemen dan Indikator Kinerja Program menjadi tanggung jawab Sekretariat Jenderal adalah sebagai berikut.

### Sasaran Program

#### Indikator Kinerja Program

IKP.01	Indeks SPBE (sesuai penilaian MenPAN skala 1-5)
IKP.02	Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkominfo
IKP.03	Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Kemenkominfo
IKP.06	Nilai Kinerja Anggaran Kemenkominfo
IKP.07	Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan kesekretariatan
IKP.08	Persentase (%) Realisasi Rencana Penyederhanaan Regulasi Kemenkominfo
IKP.09	Indeks kompetensi pegawai

Tabel 2. 2 Sasaran dan Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal tahun 2020—2024

Sumber: Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo, 2021

**Meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien**

		Target			
2020	2021	2022	2023	2024	
3.25	3.80	4.00	4.10	4.20	
76.2	78	80	82	84	
67.2	68.5	70.5	72.5	75	
86	86	87	87	88	
3.71	3.71	3.74	3.75	3.80	
100% Terbit: 7 Cabut: 10	100% Terbit: 7 Cabut: 14	100% Terbit: 6 Cabut: 13	100% Terbit: 6 Cabut: 10	100% Terbit: 5 Cabut: 9	
-	85	85	90	90	

## 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu. Tujuan khusus dari Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi amanah dengan penerima amanah. Secara rinci, berikut adalah Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2022.

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target 2022
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien	1. Indeks Reformasi Birokrasi berdasarkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB):	
		a. Kementerian Kominfo	a. 80 (skala 1-100)
		b. Sekretariat Jenderal	b. 80 (skala 1-100)
		2. Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kominfo	87
		3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Kominfo (berdasarkan penilaian KemenPAN RB)	3,9 (skala 1-5)
		4. Indeks Profesionalitas ASN Kementerian Kominfo	65 (skala 1-100)
2.	Tercapainya target PNBPN Kementerian Kominfo	5. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Kominfo (berdasarkan penilaian BPKP)	3,00 (skala 1-5)
		6. Opini terhadap Laporan Keuangan Kementerian Kominfo	WTP
		Persentase (%) Realisasi Target PNBPN Kementerian Kominfo	100%
			(Rp. 24.755.383.648.000)

▲ Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2022  
Sumber: Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal, 2022

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, terdapat penyesuaian pada komitmen kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2022. Penyesuaian-penyesuaian tersebut adalah:



- 1 Penambahan sasaran program Tercapainya target PNBK Kementerian Kominfo dengan indikator keberhasilan Persentase (%) Realisasi Target PNBK Kementerian Kominfo.



- 2 Penyesuaian target pada indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Kominfo, dimana target tahun 2022 pada Renstra Sekretariat Jenderal adalah 4,0 sedangkan, target tahun 2022 pada Perjanjian Kinerja Sekretariat jenderal adalah 3,9. Hal ini disebabkan kesiapan Kementerian Kominfo untuk memaksimalkan pencapaian target SPBE 4,0 (dari skala 5) dirasa cukup sulit mengingat penilaian indeks SPBE tahun 2021 sebesar 3,82.



- 3 Indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Kementerian Kominfo, Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan ke sekretariat, Persentase (%) Realisasi Rencana Penyederhanaan Regulasi Kementerian Kominfo, Indeks kompetensi pegawai tidak diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2022 karena sudah merupakan bagian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang diukur melalui indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi berdasarkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).



- 4 Untuk menindaklanjuti direktif pimpinan, terdapat indikator kinerja yang diperjanjikan di luar indikator kinerja sasaran program yang terdapat pada Renstra Sekretariat Jenderal 2020—2024, indikator-indikator tersebut adalah Indeks Profesionalitas ASN Kementerian Kominfo, Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Kominfo (berdasarkan penilaian BPKP), dan Opini terhadap Laporan Keuangan Kementerian Kominfo.

## 2.3 Dukungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo Terhadap Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2022

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merumuskan Prioritas Nasional (PN) pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yang dijabarkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. RKP Tahun 2022 telah menyepakati Prioritas Nasional (PN) yang meliputi:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Meningkatkan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Prioritas Nasional (PN) diterjemahkan lebih lanjut dalam Program Prioritas (PP) yang kemudian dirinci dalam Kegiatan Prioritas (KP) serta dijabarkan dalam bentuk Proyek Prioritas Nasional (Pro-PN) yang akan didukung oleh Proyek Pendukung Pro-PN pada setiap Kementerian/Lembaga yang terkait. Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo mendukung PN 7 yang diwujudkan dalam proyek prioritas dan menjadi *output* pada Renja Tahun 2022. Dukungan Sekretariat Jenderal terhadap PN 7 dilaksanakan oleh Lembaga Kuasi Publik yaitu Komisi Informasi Pusat (KIP), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers yang dalam perencanaan dan pelaksanaan anggarannya di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal melalui masing-masing sekretariat Lembaga Kuasi Publik.

Mengacu pada tugas dan fungsi sekretariat Lembaga Kuasi Publik yang berada di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal, pada tahun 2022 Lembaga Kuasi Publik mendukung 1 (satu) pencapaian prioritas nasional yang dijabarkan pada gambar berikut ini:

Gambar 2. 1 Dukungan Lembaga Kuasi Publik terhadap Pencapaian Prioritas Nasional 7

Sumber: Perpres No. 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2022



Prioritas Nasional	Memperkuat Stabilitas Polhuhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
--------------------	---

Program Prioritas	Konsolidasi Demokrasi
-------------------	-----------------------

Kegiatan Prioritas	Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik
--------------------	--

Proyek Prioritas Nasional	Penguatan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pusat dan Daerah	Penguatan Peran Lembaga Pers dan Jurnalis	Peningkatan Kualitas Lembaga Penyiaran
---------------------------	---	---	--

<b>Output</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>• Penyelesaian Sengketa Informasi Publik</li> <li>• Pelaksanaan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Pemerintah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Survei Indeks Kemerdekaan Pers</li> <li>• Pendataan dan Verifikasi Perusahaan Pers</li> <li>• Pelatihan Jurnalis dan Fasilitasi Uji Kompetensi Wartawan</li> <li>• Layanan Pengaduan Masyarakat Terhadap Kasus Pers dan Layanan Saksi Ahli Pers</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Kualitas Program Siaran Televisi</li> <li>• Layanan Pengaduan Masyarakat Terhadap Konten Siaran TV dan Radio</li> <li>• Pengawasan Siaran TV dan Radio</li> </ul>
---------------	--	---	---

## 2.4 Rincian Rencana Kerja (Renja) Kementerian Kominfo Tahun 2022

Berdasarkan hasil *trilateral meeting* pembahasan Renja Tahun 2022 dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, terdapat 2 (dua) program pada Renja Sekretariat

Jenderal yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Komunikasi Publik. Adapun rincian Renja Sekretariat Jenderal Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Unit	Kode	Program/Sasaran Program/Indikator	Target Penyelesaian
<b>Program Komunikasi Publik</b>			
<b>Meningkatnya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah</b>			
Set. KIP	01.06	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	72
<b>Meningkatnya kualitas pengelolaan media komunikasi</b>			
Set. Dewan Pers	03.01	Indeks Kemerdekaan Pers	76
Set. KIP	03.02	Jumlah TV dengan Indeks Kualitas Program Siaran di atas 3	15
<b>Program Dukungan Manajemen</b>			
<b>Meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien</b>			
	01.01	Indeks SPBE (sesuai penilaian MenPAN skala 1-5)	3,4
	01.02	Indeks Reformasi Birokrasi	80
	01.03	Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Kemkominfo	70,5
	01.04	Nilai Opini Laporan Keuangan di lingkungan Kementerian Kominfo menurut kriteria	WTP
Setjen	01.05	Nilai SPIP Kemkominfo	3,25
	01.06	Nilai Kinerja Anggaran Kominfo	87
	01.07	Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan ke sekretariat	3,74
	01.08	Persentase (%) realisasi rencana penyederhanaan regulasi Kominfo	100
	01.09	Indeks kompetensi pegawai Kemkominfo	85



**ANUGERAH JURNALISTIK KOMINFO 2022**

**PEMENANG I**  
Kategori Foto Jurnalistik

**ANDREAS FITRI ATMORO**  
BULETIN 3RD HIGHWAY MEETING G20 BERTISLATA DENGAN VW TOUR BOGOR-BUDUR  
LKBH Antoran

**ANUGERAH JURNALISTIK KOMINFO 2022**

**PEMENANG I**  
Kategori Layanan Media Sosial

**RENDI FADILLAH**  
SELAMAT YOGHAL BLANDEPOT SIVIL, DIGITALISASI SAMPAI PELOKOK NEGARI  
Pungutan Ekspres

**ANUGERAH JURNALISTIK KOMINFO 2022**

**PEMENANG I**  
Kategori Layanan Televisi

**FIRMAN EKO HANDY**  
GERABAH BOGOR-BUDUR YANG RIAH HENDURHA BERKAT G20  
LKBH Antoran TV

**ANUGERAH JURNALISTIK KOMINFO 2022**

**PEMENANG I**  
Kategori Layanan Media Online

**LAPYUS PERLIANTO**  
ASA GUPREL DAN KISAH PARA PENJAJA SALUR KHUSUS DARI SERTUK DIGITAL  
@vndhnews.com

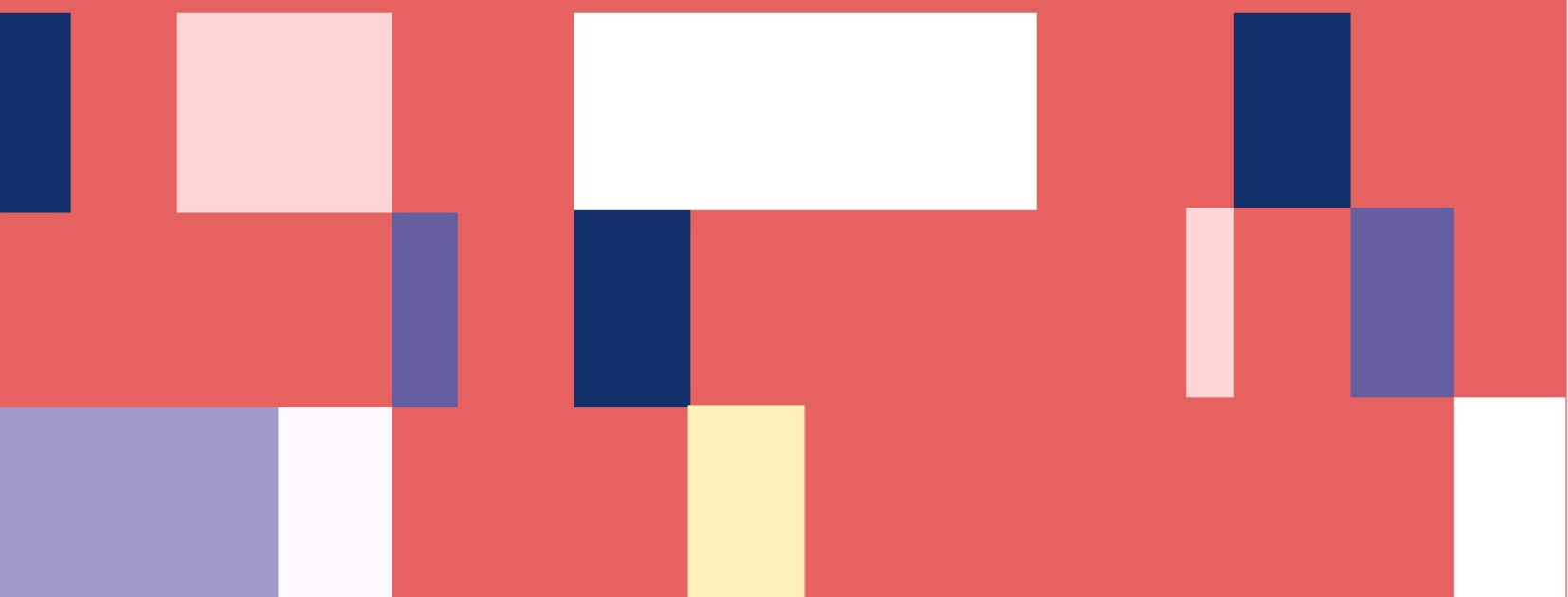


# Akuntabilitas Kinerja

## Bab III

Sekretariat Jenderal  
Kementerian Komunikasi dan Informatika  
Republik Indonesia

- Capaian Kinerja Organisasi
- Kinerja Lainnya
- Realisasi Anggaran
- Penghargaan



Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo memiliki peran aktif dalam mendukung akselerasi transformasi digital nasional yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo sebagai *leading sector* pemerintah dalam implementasi transformasi digital nasional.

Peran Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo utamanya dalam manajemen internal agar tercipta tata kelola birokrasi yang baik dan bersih.

Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo selama tahun 2022 dapat dilihat dari beberapa perspektif yang meliputi pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), pelaksanaan program prioritas, kinerja anggaran, dan kinerja lainnya yang dicerminkan dari inovasi, *achievement*, dan penghargaan yang memberikan manfaat baik kepada internal organisasi maupun kepada masyarakat luas.

## 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

No	Indikator Kinerja Sasaran Program	2020	
		Target	Realisasi
<b>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien</b>			
1.	1. Indeks Reformasi Birokrasi berdasarkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)		
	a. Kementerian Kominfo	a. 76,5	a. 76,28*
	b. Sekretariat Jenderal	b. 76,5	b. 93,90
	2. Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kominfo	86	95,22
	3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Kominfo	3,8	3,71
	4. Indeks Profesionalitas ASN	N/A	61,00
	5. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Kominfo (berdasarkan penilaian BPKP)	N/A	N/A
	6. Opini terhadap Laporan Keuangan Kementerian Kominfo	WTP	WTP
<b>Tercapainya target PNBK Kementerian Kominfo</b>			
2.	Persentase (%) Realisasi Target PNBK Kementerian Kominfo	100%	122,57%
		(Rp. 20.842.695.267.000)	(Rp. 25.547.540.298.281)

▲ Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2022

Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo tahun 2022 diukur dari pencapaian atas target indikator kinerja berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo Tahun 2022. Adapun tahun 2022 ini merupakan tahun ketiga dari implementasi Renstra Sekretariat Jenderal tahun 2020—2024. Analisis capaian kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2022 pada setiap indikator kinerja dengan penjelasan sebagai berikut:

2021		2022		Capaian 2022 (%)	
Target	Realisasi	Target	Realisasi		
	a. 78	a. 78,18*	a. 80	a. 79,01*	98,76
	b. 78	b. 80	b. 80	b. 90,77	113,46
	86	93,11	87	92,64	106,48
	3,7	3,82	3,9	3,82**	97,95
	N/A	33,10	65	82,43	126,82
	3,35	3,02	3,00	3,08***	103,00
	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00
	100%	106%	100%	109,59%	109,59
	(Rp. 23.909.529.552.000)	(Rp. 25.454.087.025.119)	(Rp. 24.755.383.648.000)	(Rp. 27.128.569.522.755)	

\*) Hasil Penilaian Kementerian PAN&RB

\*\*) Hasil penilaian tahun 2021 karena tidak ada penilaian di tahun 2022

\*\*\*) Notisi Hasil Evaluasi Penilaian BPKP

## Capaian IKSP pada Sasaran Program 1: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien

Dalam upaya mendukung implementasi transformasi digital Indonesia, Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo turut berperan dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan melalui pengelolaan manajemen internal. Tata kelola pemerintahan menjadi penting untuk mengubah paradigma dan meningkatkan kinerja aparatur negara.

Perubahan paradigma yang diharapkan yaitu menuju pada tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (*good and clean government*) guna meningkatkan atau optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Berbagai aspek perlu diintervensi untuk mendukung aparatur yang berkinerja tinggi sebagaimana yang diharapkan masyarakat.

No	Indikator Kinerja	Satuan	2022		Capaian 2022 (%)
			Target	Realisasi	
<b>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien</b>					<b>106,73</b>
1.	Indeks Reformasi Birokrasi berdasarkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)				
	a. Kementerian Kominfo	Persentase (%)	80	79,01*	98,76
	b. Sekretariat Jenderal		80	90,77	113,46
2.	Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kominfo	Nilai	87	92,64	106,48
3.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Kominfo	Nilai	3,9	3,82**	97,95
4.	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	65	82,43	126,82
5.	Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Kominfo (berdasarkan penilaian BPKP)	Nilai	3,00	3,08***	103,00
6.	Opini terhadap Laporan Keuangan Kementerian Kominfo	WTP	WTP	WTP	100,00

\*) Hasil Penilaian Kementerian PAN&RB

\*\*) Hasil penilaian tahun 2021 karena tidak ada penilaian di tahun 2022

\*\*\*) Notisi Hasil Evaluasi Penilaian BPKP

Berdasarkan tabel 3.2, dapat dilihat bahwa pencapaian atas sasaran program ini telah berada pada angka 106,73 dengan status kinerja biru (melebihi target). Penjelasan atas masing-masing capaian indikator kinerja pada sasaran strategis ini adalah sebagai berikut.

## 1. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi (RB) didefinisikan sebagai usaha pemerintah dalam mengubah sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian Kominfo melalui Sekretariat Jenderal, selaku koordinator bagi dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi, mengorkestrasi satuan kerja untuk melakukan

perbaikan di segala aspek guna meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi. Sekretariat Jenderal mengawal kinerja reformasi birokrasi pada level Kementerian dan Unit Kerja Eselon I, dalam hal ini Sekretariat Jenderal. Sehingga, penjabaran kinerja indeks reformasi birokrasi dijelaskan pada uraian berikut:

### A. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Kominfo

Penilaian Reformasi Birokrasi merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) serta dilakukan juga oleh internal Kementerian Kominfo melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Penilaian indeks RB pada level Kementerian didapat dari penilaian Kementerian PAN dan RB yang dilakukan terhadap 2 komponen yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil.

Untuk komponen pengungkit terdiri dari aspek pemenuhan, hasil antara area perubahan dan *reform*. Sedangkan, pada komponen hasil terdiri dari 4 (empat) aspek yaitu akuntabilitas kinerja dan keuangan, kualitas pelayanan publik, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan kinerja organisasi.

	2020	2021	2022
<b>Target</b>	76,50	78	80
<b>Realisasi</b>	76,28 (Hasil Penilaian Kemen PAN & RB)	78,18 (Hasil Penilaian Kemen PAN & RB)	79,01 (Hasil Penilaian Kemen PAN & RB)
<b>Capaian</b>	99,71%	101%	98,76%

▲ Tabel 3. 3 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Kominfo

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, realisasi indikator kinerja indeks reformasi birokrasi Kementerian Kominfo di tahun 2020 dan tahun 2022 mendekati target pada Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2020—

2024, sedangkan pada tahun 2021, capaian kinerja telah melampaui target. Untuk perbandingan target yang tercantum pada Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2020—2024 diuraikan sebagai berikut:

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>RENSTRA</b>	78	80	82	83	84
<b>PK</b>	76,50	78	80	N/A	N/A

▲ Tabel 3. 4 Target Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Kominfo pada Renstra Sekretariat Jenderal dan Perjanjian Kinerja

Secara rinci, capaian indeks reformasi birokrasi Kementerian Kominfo tahun 2021—2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Komponen Penilaian	Bobot	Indeks RB Tahun 2021	Indeks RB Tahun 2022
<b>A. Komponen Pengungkit</b>				
I.	Pemenuhan	20,00	19,05	19,05
II.	Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,82	7,83
III.	Reform	30,00	20,01	19,51
<b>Total Komponen Pengungkit</b>		<b>60,00</b>	<b>45,88</b>	<b>46,39</b>
<b>B. Komponen Hasil</b>				
I.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,71	7,75
II.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,25	9,26
III.	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,11	8,78
IV.	Kinerja Organisasi	10,00	7,23	6,83
<b>Total Komponen Hasil</b>		<b>40,00</b>	<b>32,30</b>	<b>32,62</b>
<b>Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)</b>		<b>100,00</b>	<b>78,18</b>	<b>79,01</b>

▲ Tabel 3. 5 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Kominfo tahun 2021—2022  
Sumber: Kementerian PAN dan RB, 2022

No	Kategori	Angka Nilai	Interpretasi
1.	AA	>90-100	Istimewa
2.	A	>80-90	Memuaskan
3.	BB	>70-80	Sangat Baik
4.	B	>60-70	Baik, perlu sedikit perbaikan
5.	CC	>50-60	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
6.	C	>30-50	Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar
7.	D	>0-30	Sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar

Berdasarkan surat Kementerian PAN dan RB Nomor B/670/RB.06/2022 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022, Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Kominfo di tahun 2022 adalah 79,01 atau kategori "BB". Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Kementerian Kominfo telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan ditandai dengan meningkatnya nilai Indeks Reformasi Birokrasi yang mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

◀ Tabel 3. 6 Kategori dan Predikat Indeks Reformasi Birokrasi  
Sumber: Kementerian PAN dan RB, 2020

Terkait dengan aspek hasil antara, terdapat 13 hasil antara Kementerian Kominfo yang dilakukan pengukuran oleh instansi *leading sector*, dengan hasil sebagai berikut:

No	Komponen Penilaian	Skala	Nilai 2021	Nilai 2022	Sumber Data
1.	Sistem Merit	0 - 400	289,0	344,0	KASN
2.	Kualitas Kebijakan	0 - 100	60,87	60,87	LAN
3.	Pengelolaan Aset	0 - 4	3,32	3,45	Kementerian Keuangan
4.	ASN yang Profesional	0 - 100	33,10	82,43	BKN
5.	Implementasi SPBE	0 - 5	3,82	3,82	Kementerian PANRB
6.	Kualitas Pengelolaan	0 - 100	32,65	69,50	LKPP
7.	Pengadaan Barang dan Jasa	0 - 100	87,99	86,35	Kementerian Keuangan
8.	Kualitas Pengelolaan Anggaran	0 - 5	4,73	4,62	Kementerian PANRB
9.	Kualitas Pelayanan Publik	0 - 5	3	3	BPKP
10.	Kualitas Pelayanan Publik	0 - 5	3	3	BPKP



No	Komponen Penilaian	Skala	Nilai 2021	Nilai 2022	Sumber Data
11.	Kapabilitas APIP	0 - 100	82,08	92,70	Ombudsman Republik Indonesia
12.	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	0 - 100	84,05	87,11	ANRI
13.	Kualitas Pengelolaan Arsip	0 - 100	-	86,20	Kementerian Hukum dan HAM

▲ Tabel 3. 7 Hasil Antara Kementerian Kominfo Tahun 2021—2022  
Sumber: Kementerian PAN dan RB, 2022

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat beberapa peningkatan kualitas hasil antara, yaitu penilaian sistem merit, pengelolaan aset, ASN yang profesional, kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa, kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, dan kualitas pengelolaan arsip. Selain itu, kualitas kebijakan, implementasi SPBE, maturitas SPIP dan kapabilitas APIP masih menunjukkan hasil yang sama dengan tahun sebelumnya. Penilaian hasil antara yang baru dilakukan pada tahun 2022 yaitu reformasi hukum menunjukkan hasil yang sangat baik. Meskipun penilaian kualitas pengelolaan anggaran dan kualitas pelayanan publik menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, secara keseluruhan hasil antara Kementerian Komunikasi dan Informatika masih menunjukkan peningkatan.

Pada tahun 2022, Kementerian Kominfo telah menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam Laporan Hasil Evaluasi RB tahun 2021, antara lain:

- a. Meningkatkan jumlah kanal diseminasi informasi seperti brosur, booklet, website, dan media sosial (Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok), sehingga informasi yang disampaikan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
- b. Melaksanakan survei IKM dan IPP secara berkala dan menindaklanjuti hasil survei tersebut, terutama pada komponen yang mendapatkan nilai rendah;

- c. Tim RB unit kerja telah melaksanakan rencana aksi sesuai jadwal, selain itu tim money RB telah melaksanakan monitoring dan evaluasi tiap semester;
- d. Melaksanakan pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan hasil *assessment* dan pemetaan talenta pegawai.

Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan program reformasi birokrasi di antaranya sebagai berikut:

- a. SOP yang disusun oleh Kementerian Kominfo belum mengakomodir kegiatan/ aktivitas yang berkaitan dengan instansi pemerintah lain;
- b. Kementerian Kominfo belum sepenuhnya menyelesaikan peraturan yang harus disusun yang menjadi turunan dari peraturan lain seperti Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
- c. Mitigasi risiko yang dibangun belum sepenuhnya memetakan risiko yang bersifat strategis, baik untuk pencapaian sasaran kinerja maupun meminimalisasi dampak atas risiko tersebut;
- d. Pengaturan sistem kerja yang sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 7 Tahun 2022 belum diterapkan pada seluruh unit kerja yang ada di Kementerian Kominfo.

### B. Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal

Penilaian untuk level Sekretariat Jenderal didapat berdasarkan hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Kominfo. Untuk penilaian indeks RB pada level Sekretariat

Jenderal didapatkan dari hasil PMPRB dimana penilaian meliputi 1 (satu) komponen yaitu komponen pengungkit, dimana area pengungkit dibagi menjadi 2 (dua) aspek yaitu pemenuhan dan *reform*.

	2020	2021	2022
<b>Target</b>	76,50	78	80
<b>Realisasi</b>	93,90	80	90,77
<b>Capaian</b>	122,75%	102,56%	113,46%

▲ Tabel 3. 8 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.8, realisasi indikator kinerja indeks reformasi birokrasi Sekretariat Jenderal telah mencapai target.

Untuk perbandingan target yang tercantum pada Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2020—2024 dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal diuraikan sebagai berikut:

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>RENSTRA</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>PK</b>	76,50	78	80	N/A	N/A

▲ Tabel 3. 9 Target Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal pada Renstra Sekretariat Jenderal 2020—2024 dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal

Pada saat penyusunan Renstra Sekretariat Jenderal 2020—2024, indeks reformasi birokrasi Sekretariat Jenderal belum menjadi target tersendiri, sehingga, berdasarkan arahan pimpinan,

perbaikan indikator kinerja dan target indeks reformasi birokrasi Sekretariat ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal. Indeks reformasi birokrasi Sekretariat Jenderal secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Komponen/ Subkomponen/Area	Bobot	2021		2022	
		Nilai PMPRB	Nilai TPI (Tim Penilai Internal)	Nilai PMPRB	Nilai TPI (Tim Penilai Internal)
<b>Persentase Total Pengungkit (Pemenuhan + Reform)</b>	36,30	27,75	28,93	32,95	31,20
<b>I. Pemenuhan</b>	<b>14,60</b>	<b>13,55</b>	<b>10,57</b>	<b>12,83</b>	<b>12,32</b>
1. Manajemen Perubahan	2,00	2,00	1,14	1,73	1,67
2. Deregulasi Kebijakan	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50
3. Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
4. Penataan Tatalaksana	1,00	0,97	0,84	0,95	0,90
5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	1,40	1,40	1,19	1,37	1,32
6. Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,20	2,50	2,45	2,14
7. Penguatan Pengawasan	2,20	1,70	1,05	1,55	1,51
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	2,28	1,36	2,28	2,28
<b>II. Reform</b>	<b>21,70</b>	<b>14,20</b>	<b>18,36</b>	<b>20,13</b>	<b>18,88</b>
1. Manajemen Perubahan	2,00	2,00	1,14	1,73	1,67
2. Deregulasi Kebijakan	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50
3. Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
4. Penataan Tatalaksana	1,00	0,97	0,84	0,95	0,90
5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	1,40	1,40	1,19	1,37	1,32
6. Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,20	2,50	2,45	2,14
7. Penguatan Pengawasan	2,20	1,70	1,05	1,55	1,51
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	2,28	1,36	2,28	2,28

▲ Tabel 3. 10 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Tahun 2022

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa indeks reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal di komponen Pemenuhan dan komponen *Reform* diperoleh total nilai 31,20 atau 85,94% dari nilai maksimum 36,30. Sehingga, indeks reformasi birokrasi yang didapat Sekretariat Jenderal adalah sebesar 32,95 atau 90,77%.

Adapun untuk hasil antara, tim APiP tidak dapat melakukan penilaian dikarenakan bukan kewenangan dari tim APiP.

Berdasarkan hasil penilaian PMRPB yang dirasa sudah cukup baik, namun, Sekretariat Jenderal terus berupaya untuk meningkatkan nilai RB melalui cara sebagai berikut:

No	Area Perubahan	Rekomendasi dari Kementerian PAN & RB	Upaya Perbaikan yang telah Dilakukan
1.	<b>Manajemen Perubahan</b>	Pelaksanaan reformasi birokrasi sudah berjalan di tingkat unit kerja meskipun belum memberikan dampak perubahan. Hal ini dikarenakan manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi masih terfokus pada tingkat pusat saja, sehingga hasil dari perbaikan implementasi birokrasi belum merata dan menyeluruh.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap Unit Kerja telah membentuk Tim RB dan Assesor RB beserta rencana aksi yang telah terlaksana sesuai jadwal dan dilakukan monitoring dan evaluasi per semester oleh Tim Monev RB</li> <li>2. Internalisasi RB untuk tingkat Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis daerah</li> <li>3. Pimpinan Tertinggi (Menteri dan para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya) terlibat langsung dalam pelaksanaan dan pengawasan RB Unit Kerja melalui Digital Leaders Meeting dan Rapat Koordinasi RB Tahun 2022</li> <li>4. Target capaian RB Unit Kerja menjadi Indikator Kinerja Utama pada penetapan kinerja pimpinan Unit Kerja</li> <li>5. Optimalisasi agen perubahan yang berasal dari satuan kerja pusat dan daerah</li> <li>6. Pemberian reward bagi satuan kerja yang berprestasi terkait RB dan ZI</li> </ol>
2.	<b>Deregulasi Kebijakan</b>	Melakukan pemetaan terhadap seluruh produk hukum yang telah ada dan akan terbit, sehingga dapat diidentifikasi peraturan yang memiliki potensi tumpang tindih ataupun menghambat proses pelayanan utama Kementerian Kominfo. Selanjutnya hasil identifikasi tersebut ditindaklanjuti dengan deregulasi kebijakan.	Kementerian Kominfo telah melakukan pemetaan seluruh produk hukum yang telah ada dengan 111 peraturan yang telah disimplifikasi dan mencabut 194 peraturan
3.	<b>Penataan dan Penguatan Organisasi</b>	-	Kementerian Kominfo sedang melakukan restrukturisasi organisasi dalam rangka percepatan transformasi digital serta peralihan tugas dan fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan berdasarkan Peraturan Presiden No.78 Tahun 2021.
4.	<b>Penataan Tatalaksana: Indikator Proses Bisnis dan Prosedur Operasional Tetap (SOP)</b>	-	Melakukan reviu terhadap proses bisnis di setiap satuan kerja dan menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang <i>agile</i> .
5.	<b>Penataan Tatalaksana: Indikator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</b>	Melakukan evaluasi berkala untuk memastikan kebermanfaatan dari SPBE yang telah dibangun dan kesesuaiannya dengan kebutuhan organisasi serta pengguna layanan. Selanjutnya melakukan tindak lanjut perbaikan untuk menjawab temuan yang ada.	Memperbaiki layanan atas hasil evaluasi berkala. Seperti misalnya, melakukan perawatan server setiap minggu untuk mencegah virus menyusup ke dalam sistem.
6.	<b>Penataan Tatalaksana: Indikator Keterbukaan Informasi Publik</b>	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1a. Peningkatan jumlah kanal diseminasi informasi pada media sosial (Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok) agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat</li> <li>1b. Peningkatan informasi dan publikasi melalui berbagai media elektronik (media sosial, website, digital signage) dan non-elektronik (brosur, booklet)</li> </ol>

No	Area Perubahan	Rekomendasi dari Kementerian PAN & RB	Upaya Perbaikan yang telah Dilakukan
6.	<b>Penataan Tatalaksana: Indikator Keterbukaan Informasi Publik</b>	-	<p>2a. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat secara bulanan, 3 bulanan, dan tahunan yang menghasilkan output kuantitatif (IKM) dan kualitatif (saran/masukan)</p> <p>2b. Menindaklanjuti setiap saran/masukan hasil survey kepuasan masyarakat bulanan.</p>
7.	<b>Penataan Sistem Manajemen SDM</b>	Mengoptimalkan pengelolaan sistem manajemen SDM dengan memanfaatkan seluruh hasil pemetaan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritikal/ suksesi dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi serta memanfaatkan hasil assessment pegawai belum sepenuhnya dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai	<ol style="list-style-type: none"> <li>Aspek pengembangan pegawai berbasis kompetensi <ul style="list-style-type: none"> <li>Telah ditetapkan Keputusan Menteri Kominfo Nomor 63 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Kominfo.</li> <li>Telah ditetapkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kamus Kompetensi Teknis Bidang Komunikasi dan Informatika. Peraturan ini menjadi dasar penyusunan standar kompetensi jabatan di lingkungan Kementerian Kominfo.</li> <li>Telah ditetapkan pula Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 78 tahun 2022 tentang Penetapan Rumpun Jabatan dan Nomor 79 Tahun 2022 tentang Penetapan Jabatan Kritikal Kementerian Komunikasi dan Informatika</li> </ul> </li> <li>Aspek proses penerimaan pegawai <p>Proses penerimaan pegawai telah dilaksanakan sesuai ketentuan Kementerian PAN &amp; RB dan BKN. Kementerian Kominfo telah menetapkan aturan terkait tata cara pindah instansi atas permintaan sendiri dalam rangka pengisian jabatan di Kominfo yang di dalamnya melibatkan proses assessment</p> </li> <li>Aspek Promosi Jabatan secara Terbuka <p>Proses pengisian JPT melalui seleksi terbuka yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN &amp; RB Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah. Hasil talenta dan assessment digunakan sebagai pertimbangan penilaian Pimpinan dalam pengisian jabatan sesuai peraturan.</p> </li> </ol>
8.	<b>Penguatan Akuntabilitas</b>	Memastikan implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari pusat hingga unit-unit kerja secara merata dan optimal sehingga penjabaran kinerja dari level tertinggi sampai ke level terendah dapat selaras dan mendukung dalam pencapaian dan peningkatan kinerja organisasi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala (setiap bulan) terhadap kinerja yang telah dilakukan oleh masing-masing satuan kerja.</li> <li>Menyelaraskan antara Perjanjian Kinerja dengan SKP agar kinerja individu dapat mendukung kinerja organisasi.</li> </ol>
9.	<b>Penguatan Pengawasan</b>	Membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lebih efektif dengan penerapan Manajemen Risiko, sehingga dapat mengendalikan gratifikasi, benturan kepentingan, <i>Whistle Blowing System</i> , dan pengaduan masyarakat secara baik yang akhirnya dapat mewujudkan pemerintah yang akuntabel dan berintegritas.	<p>Perbaikan yang dapat dilakukan dengan meningkatkan level pada sub unsur :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penegakan integritas dan nilai etika;</li> <li>Kepemimpinan yang kondusif;</li> <li>Penyusunan dan penyerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM;</li> <li>Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait;</li> <li>Identifikasi risiko;</li> <li>Analisis risiko;</li> </ol>

No	Area Perubahan	Rekomendasi dari Kementerian PAN & RB	Upaya Perbaikan yang telah Dilakukan
9.	<b>Penguatan Pengawasan</b>		7. Pembinaan SDM; 8. Informasi yang relevan; 9. Pemantauan berkelanjutan.
10.	<b>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b>	Meningkatkan kualitas dari berbagai media dalam pemberian informasi yang telah dibangun untuk meningkatkan kualitas pelayanan internal dan eksternal.	1. Melaksanakan pelatihan/workshop dengan mengundang instruktur / narasumber yang kompeten di bidangnya. Pelatihan/workshop ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM petugas layanan informasi dalam memberikan informasi ke publik. 2. Menyusun sistem editorial konten secara rutin, sehingga informasi yang disebarakan melalui media, lebih terpolada dan terprogram untuk mencapai tujuan komunikasi ke publik. 3. Melaksanakan <i>quality control</i> secara berjenjang, untuk mengurangi potensi terjadinya kesalahan penulisan / <i>typo</i> hingga kesalahan dari sisi substansi

▲ Tabel 3. 11 Upaya Sekretariat Jenderal untuk Meningkatkan Nilai RB

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, baik di level Kementerian maupun level Sekretariat Jenderal, masih terdapat beberapa kendala yaitu, sebagai berikut:

1. Jumlah sumber daya manusia yang fokus untuk Monitoring Capaian Program Reformasi Birokrasi terbatas;
2. Kementerian PAN dan RB sangat pasif dalam koordinasi terkait kebijakan dan Hasil Evaluasi RB dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dengan Kementerian Kominfo;
3. Terdapat beberapa unit kerja yang belum optimal dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
4. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas belum berjalan bersamaan masih dikelola terpisah sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja yang menjadi sekretariat Reformasi Birokrasi atau Zona Integritas;
5. Tidak ada Punishment atau Reward bagi Tim Reformasi Birokrasi sehingga keterlibatan di Reformasi Birokrasi hanya sebatas tugas tambahan.

Rencana Perbaikan kedepan untuk meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi:

1. Keterlibatan Pimpinan dalam penetapan Target Reformasi Birokrasi dan diterjemahkan dalam Perjanjian Kerja setiap Pimpinan Satuan Kerja;
2. Pendampingan, pemantauan dan evaluasi program kerja setiap satuan kerja terkait Reformasi Birokrasi Tematik;
3. Memastikan indikator pengukuran dampak program kerja masing-masing unit kerja yang terkait Reformasi Birokrasi Tematik dapat dipertanggung jawabkan secara objektif dan akuntabel;
4. Pendampingan dan Pelatihan untuk tim Reformasi Birokrasi yang baru untuk pelaksanaan RB General dan Reformasi Birokrasi Tematik yang mekanismenya menunggu penetapan dari Kementerian PANRB;
5. Sosialisasi dan Internalisasi Program Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas kepada seluruh pegawai di Pusat dan UPT;
6. Koordinasi secara periodik dengan Instansi Pembina yang mengeluarkan Indeks terkait Reformasi Birokrasi dan melakukan pendampingan dan pemantauan terkait pencapaian target untuk setiap indeks.

## 2. Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kominfo

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Pemerintah diwajibkan untuk mengelola anggaran negara dengan efektif, efisien, transparan, serta melaporkan kinerja dan pencapaian tujuan dalam laporan keuangan.

Pengukuran nilai kinerja anggaran menjadi krusial untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran publik dilakukan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Penilaian kinerja anggaran bertujuan untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan dampak dari penggunaan anggaran, serta memberikan dasar untuk meningkatkan kualitas program atau kegiatan yang didanai.

Untuk memperoleh nilai kinerja anggaran yang baik, Sekretariat Jenderal melalui Biro Keuangan terus mendorong agar setiap unit kerja berupaya untuk meningkatkan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) dan nilai Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART). Dalam konteks ini, nilai kinerja anggaran dapat membantu dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan alokasi anggaran di masa mendatang dan dapat memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran kepada masyarakat.

	2020	2021	2022
<b>Target</b>	86	86	87
<b>Realisasi</b>	95,22	93,11	92,64
<b>Capaian</b>	<b>110,72%</b>	<b>108,27%</b>	<b>106,48%</b>

▲ Tabel 3. 12 Capaian Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kominfo

Berdasarkan tabel di atas, capaian Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kominfo Tahun 2022 adalah sebesar 92,64 (kategori Sangat Baik) atau 106,48% dari target yang telah ditetapkan sebesar 87 dengan proporsi nilai SMART sebesar 96,82 dan nilai IKPA sebesar 86,36.

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Kementerian Kominfo berhasil meraih Nilai Kinerja Anggaran di atas target yang telah ditetapkan. Tahun 2020 dari target Nilai Kinerja Anggaran 86 Kominfo berhasil meraih 95,22 sedangkan pada tahun 2021 dari target Nilai Kinerja Anggaran 87 Kominfo

berhasil meraih 93,11 sehingga Kementerian Kominfo berhasil meraih penghargaan Kementerian dengan pagu anggaran terbesar dengan kinerja anggaran terbaik di tahun 2021.

Penghargaan tersebut ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 58/KMK.02/2022 tentang Penetapan Kementerian/Lembaga yang Diberikan Penghargaan atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2021.

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.12, realisasi indikator kinerja nilai kinerja anggaran Kementerian Kominfo telah melampaui target yang ditetapkan. Untuk melihat perbandingan target tersebut selama periode 5 (lima) tahun, dapat diuraikan sebagai berikut:

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>RENSTRA</b>	86	86	87	87	88
<b>PK</b>	86	86	87	N/A	N/A

▲ Tabel 3. 13 Target Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kominfo pada Renstra Sekretariat Jenderal 2020—2024 dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal

Pengukuran capaian Nilai Kinerja Anggaran diperoleh berdasarkan penggabungan nilai Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) sebesar 60% dari total nilai SMART dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 40% dari total nilai IKPA. Nilai Kinerja Anggaran dikelompokkan dalam kategori seperti pada tabel 3.13.

No	Kategori	Angka Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Istimewa
2	A	>80-90	Memuaskan
3	BB	>70-80	Sangat Baik
4	B	>60-70	Baik, perlu sedikit perbaikan
5	CC	>50-60	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
6	C	>30-50	Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar
7	D	>0-30	Sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar

▲ Tabel 3. 14 Kategori Nilai Kinerja Anggaran  
Sumber: Kementerian Keuangan, 2021

Nilai Kinerja Anggaran yang menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

1. **Nilai SMART** Kementerian Kominfo T.A. 2022 adalah sebesar **96,82 (Sangat Baik)** dengan bobot 60% terhadap Nilai Kinerja Anggaran. Penurunan nilai SMART dibandingkan tahun 2021, dipengaruhi oleh terdapat beberapa capaian program prioritas Kementerian Kominfo TA 2022 yang belum mencapai target yang direncanakan.



1. Jumlah desa mendapatkan layanan seluler 4G di wilayah 3T dan non 3T dengan target sebesar 11.661 lokasi dan capaian untuk Tahun 2022 adalah 73,87% atau 8.613 lokasi pada BLU BAKTI. Rendahnya capaian disebabkan situasi keamanan yang kurang kondusif pada beberapa titik/lokasi di wilayah 3T.
2. Jumlah penambahan unicorn yang terealisasi pada tahun 2022 sebanyak 2 (dua) unicorn yaitu Kopi Kenangan dan Ajaib dari target akumulasi sebanyak 3 (tiga). Sehingga capaian atas penambahan unicorn adalah 70% pada Ditjen APTIKA. Sisa penambahan unicorn akan terelaborasi pada tahun 2023 (target akumulasi).
3. Jumlah penyediaan Pusat Data Nasional dengan target 2 Data Center Nasional namun capaian hanya sebesar 50% pada Direktorat Jenderal APTIKA. Pembangunan PDN GIIC Cikarang seharusnya ditargetkan selesai di Tahun 2022 tetapi adanya kendala karena proses pencairan sumber dana RMP dan PLN yang terlambat sehingga kontrak pembangunan dijadikan tahun jamak sampai dengan Tahun 2024. Capaian sampai dengan akhir tahun pada PDN Cikarang yaitu pemagaran lahan dan design awal bangunan PDN.
4. Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) Kementerian Kominfo dengan target nilai 85 namun capaian hanya sebesar 79,86% pada Satuan Kerja Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal. Nilai IP ASN rendah dikarenakan gabungan dari nilai Kominfo (82,69), RRI (53,90) dan TVRI (57,51). Nilai RRI dan TVRI cenderung rendah sehingga menyebabkan nilai rata-rata IP ASN Kementerian Kominfo menjadi rendah.
5. Output atas penanganan/pemantauan frekuensi pada Ditjen SDPPI yang menggunakan SBK dengan sumber dana PNBK tidak dapat terealisasi secara optimal dikarenakan capaian tidak pasti.

**Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)** Kementerian Kominfo TA 2022 sebesar **86,36 (Cukup)**, beberapa indikator IKPA yang masih perlu mendapatkan perhatian dan ditingkatkan yaitu:

1. Indikator deviasi halaman III DIPA: kurang baiknya perencanaan karena terdapat deviasi melebihi 5% antara Rencana Penarikan Dana (RPD) dan realisasi;
2. Penyerapan anggaran: realisasi anggaran per jenis belanja tiap triwulan masih di bawah target per triwulan masih di bawah target (kecuali belanja pegawai) dan terjadi penumpukan realisasi di akhir tahun;
3. Belanja kontraktual:
  - a. Dari 1.621 kontrak dengan nilai kontrak di atas 50 juta Rupiah yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), sebanyak 1.430 data kontrak yang disampaikan tepat waktu dan 191 terlambat disampaikan (melebihi lima hari kerja sejak ditandatangani kontrak);
  - b. Kurang optimalnya kontrak pra-DIPA (kontrak di atas 50 juta Rupiah yang didaftarkan ke KPPN sebelum tahun anggaran);
  - c. Kurang optimalnya akselerasi Belanja Modal nilai di atas 50 juta sampai dengan 200 juta Rupiah yang diselesaikan sampai dengan Triwulan I tahun berjalan.
4. Penyelesaian tagihan: terdapat penyelesaian tagihan terlambat disampaikan ke KPPN (melebihi 17 hari kerja sejak timbulnya hak tagih kepada negara) sebanyak 898 dari total 5.249 Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), sedangkan penyelesaian tagihan SPM-LS kontraktual yang tepat waktu disampaikan ke KPPN sebanyak 4.351 SPM-LS.

5. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP): Rata-rata Penggantian Uang Persediaan (GUP) sebulan sebesar 87,54% menunjukkan rata-rata Kementerian Kominfo telah menggunakan alokasi UP mendekati maksimal sehingga mengurangi *idle cash*. Dan dari jumlah TUP Kementerian Kominfo sebesar Rp11,4 Triliun, jumlah setoran TUP sebesar Rp368,7 Miliar atau 3,23% mengindikasikan kinerja yang baik karena penggunaan TUP dimaksimalkan sehingga risiko *idle cash* rendah.

Capaian nilai kinerja anggaran secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tahun	Komponen Penilaian	Pembobotan	Nilai Kinerja Anggaran
2021	Nilai SMART	-60%	96,52
	Nilai IKPA	-40%	87,99
	<b>Nilai Kinerja Anggaran</b>	(nilai SMART+ nilai IKPA)	<b>93,1</b>
2022	Nilai SMART	-60%	96.82
	Nilai IKPA	-40%	86,36
	<b>Nilai Kinerja Anggaran</b>	(nilai SMART+ nilai IKPA)	<b>92.64</b>

▲ Tabel 3. 15 Capaian Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kominfo Tahun 2021-2022

### 3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Kominfo

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna layanan SPBE. Dalam melaksanakan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik dan Peraturan Menteri PAN & RB

Nomor 59 Tahun 2020, setiap instansi pemerintah diamanatkan untuk meningkatkan kualitas penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik sehingga dapat mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

	2020	2021	2022
<b>Target</b>	3,8	3,7	3,9
<b>Realisasi</b>	3,71	3,82	3,82 Hasil penilaian tahun 2021 karena tidak ada penilaian di tahun 2022
<b>Capaian</b>	97,63%	103,24%	97,95%

▲ Tabel 3. 16 Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, realisasi indikator kinerja indeks SPBE untuk tahun 2022 belum mencapai target. Namun, pada tahun ini Kementerian PAN dan RB tidak melakukan penilaian, sehingga nilai SPBE yang dicantumkan masih menggunakan hasil

penilaian tahun 2021 dimana saat itu realisasinya sudah melebihi target yang ditetapkan. Adapun perbandingan target antara Renstra Sekretariat Jenderal 2020-2024 dengan Perjanjian Kinerja dapat diuraikan sebagai berikut:

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>RENSTRA</b>	3,25	3,8	4,0	4,1	4,2
<b>PK</b>	3,8	3,7	3,9	N/A	N/A

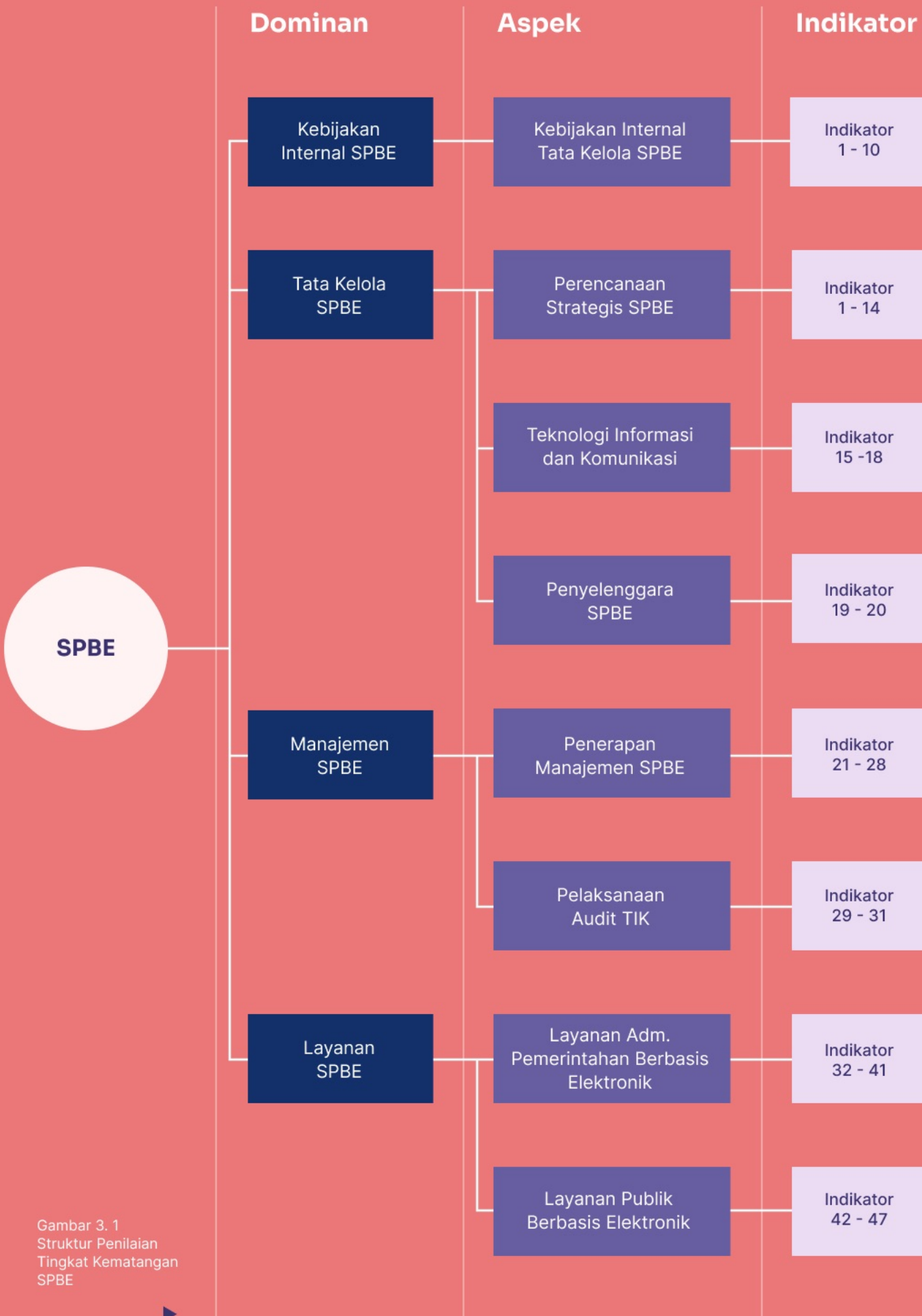
▲ Tabel 3. 17 Target Indeks SPBE pada Renstra Sekretariat Jenderal 2020—2024 dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal

Jika dilihat pada tabel di atas, terdapat perbedaan antara target yang tercantum antara Renstra Sekretariat Jenderal 2020-2024 dengan Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2022. Hal tersebut dikarenakan kesiapan Kementerian Kominfo untuk memaksimalkan pencapaian target SPBE 4,0 (dari skala 5) dirasa cukup sulit mengingat penilaian indeks SPBE tahun 2021 sebesar 3,82.

Secara khusus, Kementerian Kominfo memiliki tugas dan fungsi sebagai *Government Chief Technology Officer* sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik. Tugas dan fungsi yang dimaksud antara lain pengembangan pusat data nasional (*government cloud*), pelaksanaan interoperabilitas SPBE, dan integrasi jaringan internet pemerintah di bawah koordinasi Kementerian PAN & RB. Pada Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 59 Tahun 2020 dijabarkan bahwa struktur penilaian tingkat kematangan SPBE terdiri atas 4 (empat) domain, 8 (delapan) aspek, dan 47 indikator. Adapun struktur penilaian tingkat kematangan SPBE dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Adapun tugas tersebut kemudian diturunkan (*cascading*) kepada Pusat Data dan Sarana Informatika (PDSI) yang berada dalam jalur koordinasi Sekretariat Jenderal. Peran dari PDSI ini sendiri untuk memastikan pelaksanaan SPBE dapat berjalan seperti yang diharapkan sehingga dapat memperoleh indeks SPBE yang baik.

Pengukuran indeks SPBE diperlukan untuk menggambarkan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE di instansi pemerintah agar dapat menjamin pelaksanaan SPBE dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Untuk itu perlu adanya pembenahan dan peningkatan terhadap berbagai aspek penyelenggaraan SPBE di instansi pemerintah.

Sebagai upaya perbaikan untuk meningkatkan nilai SPBE, Kementerian Kominfo memerlukan peran serta seluruh pihak, khususnya komitmen dan peran pimpinan dalam melakukan *continuous improvement* sehingga penerapan SPBE dapat terwujud secara konkret. Untuk itu Kementerian Kominfo berupaya untuk meningkatkan kualitas SPBE melalui penerapan arsitektur SPBE. Arsitektur ini merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi. Dengan adanya arsitektur SPBE ini diharapkan mampu mengubah silo-silo yang terjadi di Kementerian Kominfo dapat berkurang dan dapat lebih terintegrasi sehingga mendorong nilai indeks SPBE Kementerian Kominfo menjadi lebih baik. Upaya lain dilakukan adalah dengan mengoptimalkan penerapan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi dan berdaya guna. Langkah ini untuk mendukung akselerasi percepatan penerapan SPBE yang berbasis *artificial intelligence* (kecerdasan buatan).



Gambar 3. 1  
Struktur Penilaian  
Tingkat Kematangan  
SPBE

#### 4. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas salah satunya adalah profesionalitas. SDM di instansi Pemerintah harus dapat mengikuti perkembangan organisasi yang kompetitif dalam rangka mewujudkan aparatur negara yang profesional. Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan

kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Tujuan dilakukan penilaian atas profesionalitas ASN adalah untuk memberikan standar bagi instansi Pemerintah baik pusat dan daerah dalam melaksanakan pengukuran indeks profesionalitas ASN secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan. Pengukuran indeks profesionalitas ASN memberikan gambaran mengenai tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN yaitu kesesuaian kualifikasi, kompetensi, tingkat kerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya.

	2020	2021	2022
<b>Target</b>	86	86	87
<b>Realisasi</b>	94,56	93,11	92,64
<b>Capaian</b>	<b>109,95%</b>	<b>108,27%</b>	<b>106,48%</b>

▲ Tabel 3. 18 Capaian Indeks Profesionalitas ASN

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, untuk tahun 2022, realisasi indikator kinerja indeks profesionalitas ASN telah melampaui target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2022.

Berdasarkan surat dari Kementerian PAN dan RB Nomor B/670/RB.06/2022 tentang Reformasi Birokrasi Tahun 2022, indeks profesionalitas ASN Kementerian Kominfo memperoleh nilai sebesar 82,43. Nilai ini meningkat sebesar 49,33 dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 33,10.

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>RENSTRA</b>	-	70	80	85	90
<b>PK</b>	N/A	N/A	65	N/A	N/A

▲ Tabel 3. 19 Target Indeks Profesionalitas ASN pada Renstra Sekretariat Jenderal 2020—2024 dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN diuraikan sebagai berikut:

No	Kategori	Interpretasi
1.	Kualifikasi	25%
2.	Kompetensi	40%
3.	Kinerja	30%
4.	Disiplin	5%

▲ Tabel 3. 20 Bobot Penilaian Dimensi Indeks Profesionalitas ASN  
Sumber: Kementerian PAN & RB, 2018

Adapun pengkategorian tingkat profesionalitas ASN dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No	Kategori	Interpretasi
1.	91-100	Sangat Tinggi
2.	81-90	Tinggi
3.	71-80	Sedang
4.	61-70	Rendah
5.	0-60	Sangat Rendah

▲ Tabel 3. 21 Kategori Tingkat Profesionalitas ASN  
Sumber: Kementerian PAN & RB, 2018

Meskipun indeks profesionalitas ASN Kementerian Kominfo terbilang cukup baik. Namun, Kementerian Kominfo melalui Sekretariat Jenderal terus berupaya untuk meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN. Beberapa hal yang dilakukan Kementerian Kominfo untuk meningkatkan indeks tersebut, antara lain:

1. Pemetaan berbasis kompetensi (*talent pool*) sehingga dapat menghasilkan ASN yang profesional sebagai salah satu program strategis dalam upaya mewujudkan manajemen ASN berbasis sistem merit. Tahapan pemetaan yang pertama dilakukan adalah profiling atau mengidentifikasi kompetensi melalui *assessment center*. Tahap selanjutnya adalah penyesuaian penempatan dan penempatan.
2. Peningkatan kapasitas SDM, melalui program Pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis maupun workshop. Hal tersebut dilakukan sebagai sarana dalam pengembangan kompetensi SDM, yang meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Kompetensi teknis untuk jabatan pimpinan tinggi, fungsional maupun administrasi yang digunakan untuk peningkatan pekerjaan, kompetensi manajerial meliputi unsur-unsur: integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Adapun kompetensi sosial kultural adalah ASN sebagai perekat bangsa yang dihubungkan dengan peningkatan karakter SDM melalui pemberian motivasi pegawai dengan sarana ESQ maupun melalui motivator.

## 5. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Kominfo

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,

pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Sedangkan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

	2020	2021	2022
<b>Target</b>	N/A	3,35	3,00
<b>Realisasi</b>	N/A	3,02	3,08 (Notisi Hasil Evaluasi Penilaian BPKP)
<b>Capaian</b>	-	90,15%	103,00%

▲ Tabel 3. 22 Capaian Nilai SPIP Kementerian Kominfo

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, untuk tahun 2022, realisasi indikator kinerja nilai SPIP Kementerian Kominfo berdasarkan Notisi Hasil Evaluasi Penilaian BPKP telah mencapai target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal. Hal ini disebabkan karena penilaian SPIP Terintegrasi pertama kali diterapkan pada Tahun 2021 yang mengakibatkan hasil penilaian tidak mencapai target yang ditetapkan sehingga pada tahun 2022 dilakukan penyesuaian terhadap target SPIP merujuk pada indikator tercapainya SPIP Terintegrasi.

Kementerian Kominfo telah mencapai nilai SPIP berdasarkan Notisi Hasil Evaluasi Penilaian BPKP sebesar 3 atau lebih yang artinya Kementerian Kominfo telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi. Selain itu, Nilai SPIP berkontribusi terhadap capaian nilai Reformasi Birokrasi pada komponen pengungkit Kategori Penguatan Pengawasan pada Aspek Pemenuhan 2,5% dan pada Aspek Hasil Antara sebesar 1%.

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>RENSTRA</b>	3,2	3,35	3,5	3,65	3,8
<b>PK</b>	N/A	N/A	3,00	N/A	N/A

▲ Tabel 3. 23 Target Nilai SPIP Kementerian Kominfo pada Renstra Sekretariat Jenderal 2020—2024 dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal



Capaian nilai SPIP diukur dari nilai maturitas penyelenggaraan SPIP yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dimana pada tahun 2022 berdasarkan Notisi Hasil Evaluasi Penilaian BPKP, Kementerian Kominfo mendapatkan nilai 3,09 (terdefinisi). Nilai tersebut meningkat 0,7 jika dibandingkan dengan tahun 2021 yakni 3,02.

Dalam pelaksanaan SPIP Terintegrasi di Kementerian Kominfo tidak luput dari beberapa kendala yang terjadi, di antaranya sebagai berikut:



- 1 Kebijakan baru terkait penyelenggaraan dan penilaian maturitas SPIP Terintegrasi yang lebih kompleks sesuai Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga;



- 2 Pelaksanaan penilaian SPIP Terintegrasi yang masih belum sesuai dengan timeline dikarenakan masih berada dalam tahap penyesuaian terhadap kebijakan baru.



- 3 Kompetensi SDM yang belum memadai dan belum seluruh PIC yang menangani SPIP memperoleh diklat teknis SPIP Terintegrasi.



- 4 Masih rendahnya tingkat pemahaman akan pentingnya penilaian risiko oleh Satuan Kerja, dalam hal ini perlu adanya diklat teknis pendukung terkait SPIP yaitu manajemen risiko.



- 5 Penilaian dan penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang masih dilakukan secara manual/belum didukung menggunakan aplikasi sehingga kurang praktis.

Sebagai upaya perbaikan untuk meningkatkan nilai SPIP, Kementerian Kominfo melalui Sekretariat Jenderal untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan pegawai terkait manajemen risiko dan melakukan asesmen risiko korupsi pada beberapa kegiatan utama yang dapat menghasilkan peta risiko korupsi, rencana mitigasi dan pengendalian atas risiko korupsi.

## 6. Opini Terhadap Laporan Keuangan Kementerian Kominfo

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada beberapa kriteria antara lain kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*); kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terdapat 4 (empat) jenis opini yang diberikan oleh BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah yakni opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*, opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*; Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*, dan opini Tidak Memberikan Pendapat atau *disclaimer*.

	2020	2021	2022
<b>Target</b>	WTP	WTP	WTP
<b>Realisasi</b>	WTP	WTP	WTP
<b>Capaian</b>	100%	100%	100%

▲ Tabel 3. 24 Capaian Opini Terhadap Laporan Keuangan Kementerian Kominfo

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, realisasi indikator kinerja opini terhadap laporan keuangan Kementerian Kominfo telah mencapai target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2022. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian Kominfo tahun 2021, Kementerian Kominfo memperoleh hasil penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kementerian Kominfo berhasil mempertahankan predikat WTP selama 6 (enam) tahun berturut-turut sejak tahun 2016. Hasil opini WTP tersebut menunjukkan akuntabilitas keuangan negara pada Kementerian Kominfo telah terpenuhi sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

Adapun rincian target Opini Terhadap Laporan Keuangan Kementerian Kominfo yang tercantum pada Renstra dan Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>RENSTRA</b>	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
<b>PK</b>	WTP	WTP	WTP	N/A	N/A

▲ Tabel 3. 25 Target Opini Terhadap Laporan Keuangan Kementerian Kominfo pada Renstra Sekretariat Jenderal 2020—2024 dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal

Laporan Keuangan (LK) adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara berupa laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.

LK digunakan sebagai sumber informasi dalam berbagai kegiatan dan pengambilan keputusan serta dalam pengambilan kebijakan yang berdampak luas. Melihat strategisnya fungsi LK, maka akuntabilitasnya menjadi salah satu ukuran penting untuk melihat sejauh mana tingkat transparansi dan kesesuaian pengelolaan keuangan negara sehingga layak untuk dijadikan pedoman bagi para pengguna untuk kepentingan ekonomi, sosial, maupun politik. Tingkat Akuntabilitas Laporan Keuangan Kementerian Kominfo ditentukan melalui pemeriksaan LK yang dilakukan oleh BPK RI.

Sebagai upaya perbaikan untuk meningkatkan nilai SPIP, Kementerian Kominfo melalui Sekretariat Jenderal untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan pegawai terkait manajemen risiko dan melakukan asesmen risiko korupsi pada beberapa kegiatan utama yang dapat menghasilkan peta risiko korupsi, rencana mitigasi dan pengendalian atas risiko korupsi.





# ENTRY MEETING

**PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN  
KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2021  
AUDIT DAT UTAMA KEUANGAN NEGARA**

JAKARTA 16 JANUARI 2022



## Capaian IKSP pada Sasaran Program 2: Tercapainya Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Kominfo

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dipungut oleh Kementerian Kominfo memiliki porsi yang besar dan strategis dalam struktur APBN khususnya PNBP lainnya. PNBP pada Kementerian Kominfo memiliki kecenderungan yang terus meningkat dari tahun ke tahun dengan nilai realisasi yang selalu lebih tinggi dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

Tiga faktor utama yang perlu menjadi perhatian dan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan PNBP yaitu peningkatan penerimaan negara, pengaturan laju inflasi, dan perbaikan iklim usaha. Dengan mempertimbangkan dinamika penerimaan PNBP Kementerian Kominfo, maka terdapat paling tidak tiga strategi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan PNBP Kementerian Kominfo, yaitu penyesuaian tarif, peningkatan produktivitas, dan kombinasi dari dua opsi kebijakan di atas.

### 7. Persentase (%) Realisasi Target PNBP Kementerian Kominfo

Secara umum PNBP pada Kementerian Kominfo berasal dari dua sumber utama yakni Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi dan Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi dengan besaran kontribusi terhadap PNBP Kementerian Kominfo yang pada tahun 2022 masing-masing sebesar 72,44% dan 4,91%. Selain itu, PNBP yang dipungut dan dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) yang berada di bawah Kementerian Kominfo berkontribusi sebesar 21,60% terhadap PNBP Kementerian Kominfo.

Peningkatan atas target PNBP Kementerian Kominfo disebabkan oleh meningkatnya permintaan akan pengujian dan sertifikasi alat dan perangkat, penagihan PNBP dari sumber BHP frekuensi dan BHP telekomunikasi kepada para penyelenggara telekomunikasi secara periodik dan intensif, dan penggunaan sistem *e-licensing* yang efisien dan cepat.

	2020	2021	2022
<b>Target</b>	100% (Rp. 20.842.695.267.000)	100% (Rp. 23.909.529.552.000)	100% (Rp. 24.755.383.648.000)
<b>Realisasi</b>	122,57% (Rp. 25.547.540.298.281)	106,46% (Rp. 25.454.087.025.119)	109,59% (Rp. 27.128.569.522.755)
<b>Capaian</b>	<b>122,57%</b>	<b>106,46%</b>	<b>109,59%</b>

▲ Tabel 3. 26 Capaian Persentase (%) Realisasi Target PNBP Kementerian Kominfo

Sebagaimana dilihat dari tabel di atas, realisasi PNBPN Kementerian Kominfo pada tahun 2022 telah mencapai target, yaitu Rp27.128.569.522.755 dari target Rp24.755.383.648.000 atau sekitar 109,59%. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya,

Kementerian Kominfo berhasil mencapai target PNBPN di atas 100% dengan rincian 122,57% di atas target pada tahun 2020 dan 106,46% di tahun 2021. Rincian PNBPN di lingkungan Kementerian Kominfo dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut.

No	Unit Kerja	Target PNBPN (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	Ditjen SDPPI	19.778.353.398.000	19.846.572.466.247	100,34
2.	Ditjen PPI	1.197.250.408.000	1.384.425.654.246	115,63
3.	Ditjen APTIKA	2.440.842.000	6.069.635.696	248,67
4.	BLSDM	19.309.000.000	24.565.844.029	127,22
5.	BAKTI	3.758.030.000.000	5.642.371.790.318	150,14
<b>TOTAL</b>		<b>24.755.383.648.000</b>	<b>27.128.569.522.755</b>	<b>109,59</b>

▲ Tabel 3. 27 Rincian PNBPN Per Unit Kerja Kementerian Kominfo Tahun 2022  
 Sumber: Kementerian Kominfo, 2022

Berdasarkan data di atas, sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, realisasi Penerimaan PNBPN Kementerian Komunikasi dan Informatika secara keseluruhan mencapai 109,59% atau sebesar Rp. 27.128.569.522.755

%	<b>Realisasi Penerimaan PNBPN</b>
<b>109,59%</b>	<b>Rp. 27.128.569.522.755</b>

Adapun rincian per jenis PNBP di Kementerian Kominfo dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Jenis PNBP	2020		
		Target	Realisasi	%
1.	BHP Frekuensi	16.257	20.707	127,37%
2.	PNBP BLU (USO)	3.307	3.435	103,90%
3.	BHP Telekomunikasi	1.114	1.118	100,38%
4.	Sertifikasi Perangkat Tel.	100	192	191,04%
5.	IPP Penyiaran	39	58	146,91%
6.	PNBP Lainnya**	25	38	148,18%
<b>Jumlah</b>		<b>20.843</b>	<b>25.548</b>	<b>122,57%</b>

Tabel 3. 28 Rincian Per Jenis PNBP Kementerian Kominfo Tahun 2020—2022

Penerimaan PNBP Kementerian Komunikasi dan Informatika terdiri dari 2 akun yaitu Penerimaan PNBP akun fungsional dan Penerimaan PNBP akun umum:

1. Penerimaan PNBP akun fungsional merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tarifnya diatur oleh Peraturan Pemerintah dan dapat dipergunakan setelah mendapatkan izin persetujuan dari Kementerian Keuangan yang di antaranya terdiri dari:
  - a. Penerimaan pada Ditjen SDPPI berupa Pendapatan Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi, Pendapatan Izin Penyelenggaraan Penyiaran, Pendapatan Kontribusi Penyelenggaraan Pos Untuk Pembiayaan Layanan Pos Universal, dan Pendapatan Izin Penyelenggaraan Pos.
  - b. Penerimaan pada Ditjen SDPPI berupa Pendapatan Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi, Pendapatan Izin Penyelenggaraan Penyiaran, Pendapatan Kontribusi Penyelenggaraan Pos Untuk Pembiayaan Layanan Pos Universal, dan Pendapatan Izin Penyelenggaraan Pos.
  - c. Penerimaan pada Ditjen APTIKA berupa Pendapatan Pengelolaan Nama Domain Indonesia.
  - d. Penerimaan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berupa Pendapatan Biaya Pendidikan, Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan, Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan, Pendapatan Pendidikan Lainnya, dan Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi.

- e. Penerimaan pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi berupa Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi, Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU, dan Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha.
2. Penerimaan PNBP akun umum merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tidak dapat digunakan dan harus disetorkan ke Kas Umum Negara yang di antaranya terdiri dari Penerimaan Kembali Belanja TAYL, Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya, Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah, Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan, Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin, Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.

Pelampauan target pada tahun 2022 dikarenakan adanya kenaikan pembayaran cicilan kewajiban wajib bayar atas BHP Telekomunikasi dan terdapat pembayaran tambahan dari wajib bayar yang semula diproyeksikan pembayaran hanya masuk satu kuartal di tahun 2022 menjadi pembayaran dua kuartal. Selain hal tersebut, faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan PNBP serta alternatif solusi yang telah dilakukan selama tahun 2022, yaitu:

2021			2022		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
19.066	20.249	106,21%	19.563	19.652	100,46%
3.450	3.762	109,05%	3.758	5.860	155,94%
1.148	1.164	101,42%	1.148	1.333	116,14%
175	186	105,85%	213	185	86,63%
45	46	103,31%	46	39	84,43%
26	47	180,35%	28	59	214,15%
23.910	25.454	106,46%	24.755	27.128	109,59%

- Pelaksanaan sosialisasi secara intensif kepada penyelenggara telekomunikasi untuk meningkatkan kepatuhan penyelenggara terhadap kewajiban kepada negara.
- Moratorium perizinan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Televisi untuk mendorong LPS TV beralih dari Analog ke Digital.
- Penyempurnaan pengelolaan, integrasi dan sinkronisasi data base Sistem Informasi Manajemen Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (SIMP3) dengan Bank BUMN guna meminimalisasi pembayaran yang tidak teridentifikasi.
- Fasilitasi *crash program* keringanan piutang Kementerian Keuangan berdasarkan PMK Nomor 15/PMK.06/2021 tentang penyelesaian piutang instansi pemerintah yang diurus/dikelola oleh PUPN/DJKN.
- Pelaksanaan penegakan hukum terhadap Pengguna layanan PNBK Kominfo.
- Integrasi secara online antara *Online Single Submission* (OSS), aplikasi Pelayanan Publik (Yanlik), Sistem Informasi Manajemen Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (SIMP3), dan Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS) dalam memberikan kemudahan pelaku usaha untuk mengajukan perizinan.
- Terbitnya Permenkominfo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran dan Permenkominfo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran.
- Pengajuan perubahan peraturan terkait PNBK untuk meningkatkan kualitas Pendidikan dan Pelatihan.
- Inisiasi peluncuran satelit dalam rangka peningkatan kapasitas layanan telekomunikasi dan menginisiasi program Palapa Ring Integrasi.
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka optimalisasi pengelolaan PNBK.
- Penyelesaian Revisi PP 80/2015 tentang Jenis dan Tarif PNBK yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Promosi dan sosialisasi yang intensif untuk diklat bidang komunikasi dan informatika kepada seluruh stakeholder.
- Sosialisasi penggunaan domain Indonesia dalam bentuk membangun kesadaran masyarakat menggunakan domain Indonesia.
- Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan edukasi bersama dengan stakeholder dalam upaya mempertahankan jumlah pengguna domain (menurunkan tingkat *churnrate*).



## 3.2 Kinerja Lainnya

### 1. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Komisi Informasi berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, salah satunya yakni menyelesaikan sengketa informasi publik. Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi. Salah satu penyebab timbulnya sengketa informasi publik adalah tidak ditanggapinya permohonan informasi oleh Badan Publik atau keberatan atas tanggapan Badan Publik terhadap permohonan informasi.

Semakin tinggi kesadaran masyarakat untuk memperoleh informasi publik dan bila tidak diimbangi dengan pelayanan informasi publik yang baik dari Badan Publik maka atas berpotensi menjadi sengketa informasi.

Penyelesaian sengketa informasi merupakan satu dari tiga program prioritas nasional Komisi Informasi Pusat. Permohonan sengketa yang masuk selama tahun 2022 sebanyak 116 sengketa yang diselesaikan pada tahun 2022 sebanyak 98 register, dengan rincian sebagai berikut:

No	Bulan	Permohonan Sengketa	Penyelesaian Sengketa
1.	Januari	1	4
2.	Februari	3	0
3.	Maret	5	12
4.	April	21	1
5.	Mei	26	0
6.	Juni	36	0
7.	Juli	3	3
8.	Agustus	2	7
9.	September	6	2
10.	Oktober	5	32
11.	November	3	2
12.	Desember	5	35
<b>Total</b>		<b>116</b>	<b>98</b>

▲ Tabel 3. 29 Capaian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2022

Dari 98 register sengketa informasi yang diselesaikan, metode atau proses yang digunakan melalui Ajudikasi, Mediasi dan Pencabutan Permohonan. Pencabutan merupakan hak Pemohon untuk melanjutkan penyelesaian sengketa atau tidak, dan pencabutan dapat diajukan sebelum sidang atau pada saat persidangan. Metode atau proses berikut jumlah penyelesaian sengketa informasi yang digunakan tergambar pada data di bawah ini:

No	Metode Penyelesaian	Jumlah
1.	Ajudikasi	84
2.	Mediasi	8
3.	Pencabutan	6
	<b>Total</b>	<b>98</b>

▲ Tabel 3. 30 Metode dan Jumlah Penyelesaian Sengketa Informasi

Permohonan Berdasarkan jenis Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Jenis Pemohon	Jumlah
1.	Individu	99
2.	Badan Hukum	16
3.	Kelompok Orang	1

▲ Tabel 3. 31 Permohonan Berdasarkan jenis Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi

Progres penyelesaian sengketa informasi tahun 2020 – 2022 sebagai berikut:

No	Tahun	Permohonan Sengketa	Sengketa yang diselesaikan	Sisa Sengketa
1.	2019	-	-	14
2.	2020	28	76	8
3.	2021	49	301	23
4.	2022	116	98	32

▲ Tabel 3. 32 Progres penyelesaian sengketa informasi tahun 2020 – 2022

## 2. Badan Publik yang Informatif

Setiap Badan Publik (BP), terutama yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, memiliki kewajiban (1) menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik; (2) menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut, Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Sarana tersebut menjadi penting dalam konteks kecepatan pelayanan informasi dan kemudahan

menyimpan informasi dalam skala besar, baik informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala maupun informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi yang wajib diumumkan secara serta merta. Hal itu dilakukan melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggara dan penyelenggaraan negara.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik tahun 2022 Komisi Informasi Pusat (KIP) melakukan penilaian terhadap 372 Badan Publik dengan rincian sebagai berikut:

No	Kategori Badan Publik	Jumlah BP	Mengisi Aplikasi	Prosentase
1.	Kementerian	34	34	100%
2.	Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LN-LPNK)	42	41	98%
3.	Lembaga Non Struktural (LNS)	34	25	74%
4.	Pemerintah Provinsi (PP)	34	34	100%
5.	Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	70	56	80%
6.	Perguruan Tinggi Negeri (PTN)	149	68	46%
7.	Partai Politik (Parpol)	9	6	67%
<b>Total</b>		<b>372</b>	<b>264</b>	<b>71%</b>

▲ Tabel 3. 33 Kategori Badan Publik yang dinilai oleh KIP

Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:



Berdasarkan grafik di atas, badan publik dengan kategori informatif diraih oleh kategori Kementerian, kemudian PTN di tempat kedua. Selanjutnya, Pemprov, BUMN, LN-LPNK dan parpol menyusul di peringkat selanjutnya.

▲ Grafik 3.1 Hasil Penilaian Badan Publik Tahun 2022

### 3. Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik

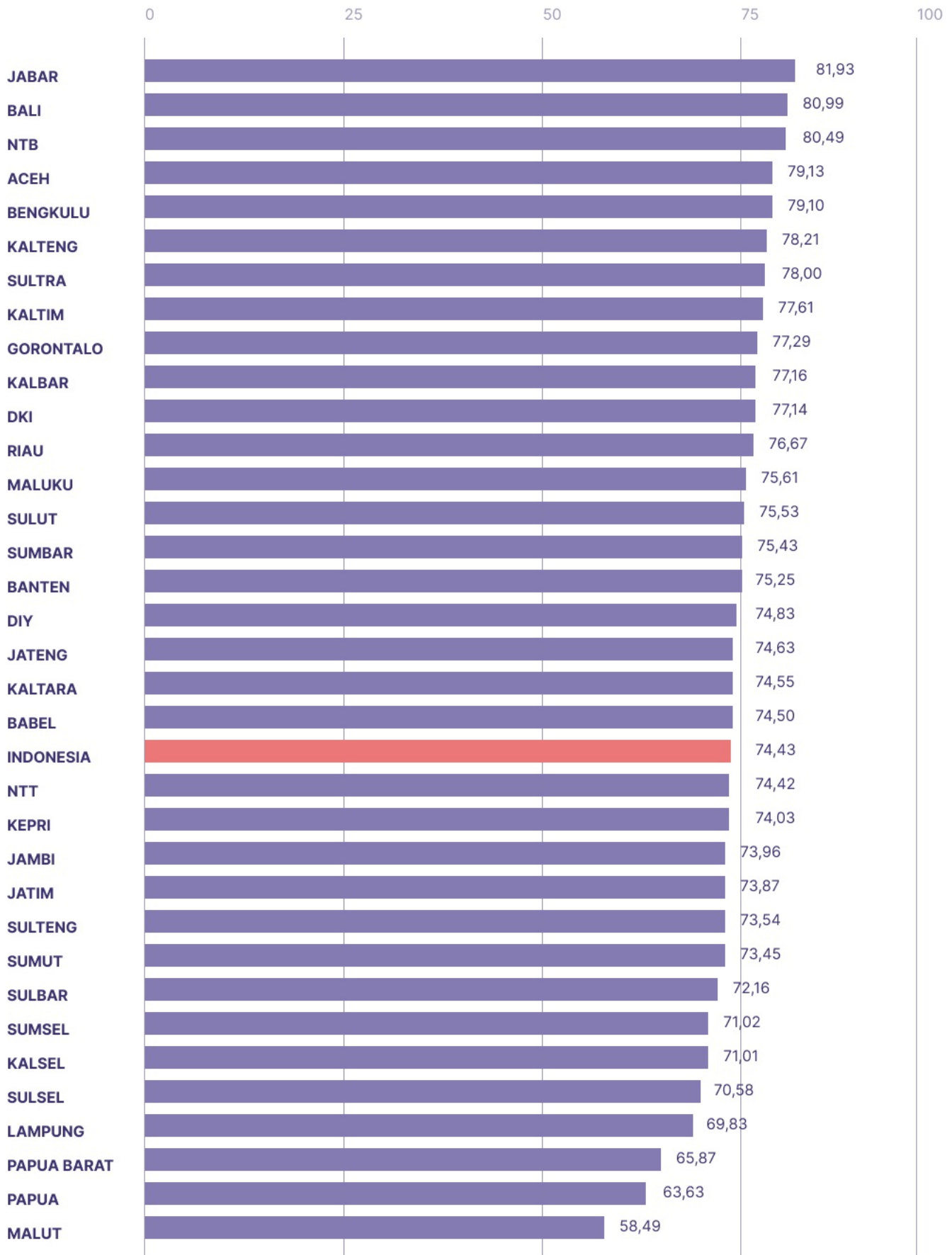
Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) sebagai bagian dari upaya untuk memastikan jaminan hak masyarakat atas informasi. IKIP disusun untuk mendapatkan gambaran indeks tingkat Provinsi dan Nasional di Indonesia, adapun tujuannya adalah untuk menyediakan data dan gambaran Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia dan memberikan rekomendasi terkait arah Kebijakan Nasional mengenai Keterbukaan Informasi Publik dan memastikan rekomendasi tersebut dijalankan, mengasistansi Badan Publik dalam mendorong pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di tingkat Pusat dan daerah oleh Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan Kabupaten/ Kota, memberikan masukan dan rekomendasi bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah serta nasional dan memberikan laporan pencapaian Keterbukaan

Informasi Publik di Indonesia sebagai bahan utama Pemerintah Republik Indonesia untuk disampaikan dalam forum internasional.

Komisi Informasi Pusat telah mengumumkan nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) sebesar 74,43 dengan kategori Sedang, nilai ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun lalu yakni 71,37. Nilai IKIP diukur dengan menggunakan tiga dimensi yakni dimensi politik, ekonomi, dan hukum dengan rincian masing-masing dimensi yakni Dimensi Fisik dan Politik sebesar 74,53, Dimensi Ekonomi sebesar 74,84, dan Dimensi Hukum sebesar 73,98. Sementara itu, tiga provinsi yang memiliki indeks IKIP tertinggi diraih oleh Provinsi Jawa Barat (81,93), Provinsi Bali (80,99), dan Provinsi NTB (80,49). Nilai IKIP dapat secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Indeks	Nilai Skor	Mengisi Aplikasi	Prosentase	Skor IKIP
1.	Skor Indeks Nasional	74,68	70%	52,28%	74,43
2.	Skor <i>National Assessment Council</i> (NAC)	73,84	30%	22,15%	

▲ Tabel 3. 34 Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022



▲ Grafik 3. 2 Indeks IKP di 34 Provinsi dan Nasional Tahun 2022

#### 4. Lembaga Penyiaran Televisi dan Radio Berjaringan yang Diawasi KPI Pusat dan Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 merupakan dasar utama bagi pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Semangatnya adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan.

Kegiatan pemantauan langsung merupakan bagian dari pengejawantahan amanat UU Penyiaran nomor 32 tahun 2002 tentang kewenangan yang melekat pada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Pada pasal 8 ayat 2 bagian (c) disebutkan bahwa KPI mempunyai kewenangan **mengawasi pelaksanaan peraturan dan Pedoman Perilaku Penyiaran serta Standar Program Siaran (P3-SPS)**. Atas dasar perintah UU Penyiaran tersebut, KPI membentuk tim pemantauan langsung yang bertugas mengawasi seluruh konten siaran di Lembaga Penyiaran.

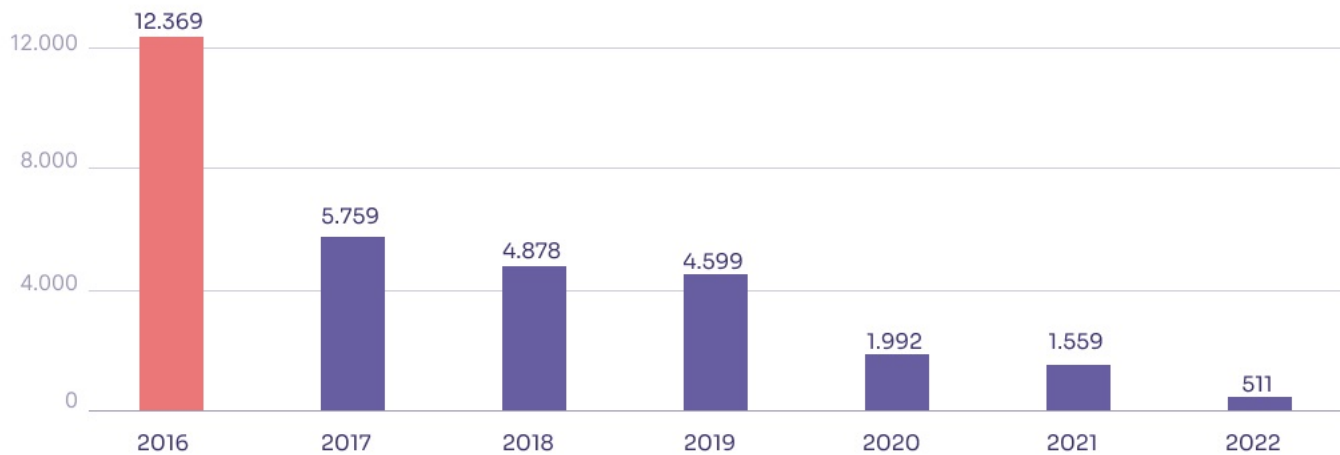
Sepanjang tahun 2022, KPI melakukan pemantauan langsung terhadap 66 Lembaga Penyiaran (LP) yang terdiri dari 46 TV Digital, 15 LP Radio dan 5 LP Berlangganan. Secara umum kondisi pemantauan tahun ini sudah sangat lebih baik, seluruh LP sudah melakukan pembenahan konten siaran, namun masih ditemukan beberapa hal yang berulang dan masih perlu perbaikan agar selaras dengan regulasi penyiaran.

#### 5. Pengaduan Masyarakat Terhadap Konten Siaran TV dan Radio yang terselesaikan

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menjelaskan bahwa siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melakukan pengawasan isi siaran dengan melakukan pemantauan secara *real time*. Selain dilakukan pemantauan oleh KPI, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam mewujudkan isi siaran yang berkualitas, hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dari masyarakat dalam memilih dan memilih sajian siaran yang sehat dan berkualitas serta mendorong agar masyarakat lebih kritis terhadap siaran yang kurang beretika dan memberikan dampak negatif.

Tahun 2022, KPI mendapat pengaduan sebanyak 511 pengaduan. Dari jumlah tersebut, terdapat 391 aduan yang tidak sesuai/tidak ditemukan potensi pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran Standar dan Program Siaran (P3-SPS), setelah dilakukan verifikasi aduan, analisa serta pengecekan tayangan yang diadakan oleh masyarakat bahwa aduan tersebut bersifat general/umum, deskripsi aduan tidak jelas, aduan tidak lengkap, tidak mencantumkan waktu penayangan program dan isi aduan tidak sesuai setelah tim pengaduan melakukan pengecekan tayangan serta dianalisa bahwa tayangan tersebut tidak berpotensi melanggar pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3-SPS). Sisanya, 120 aduan telah dibahas di rapat sidang pemeriksaan potensi pelanggaran, jika hasil temuan pengaduan tersebut terbukti benar melanggar P3-SPS tahap selanjutnya akan menjadi pembahasan Komisioner dalam rapat pleno penjatuhan sanksi berdasarkan hasil dari kajian dan analisa terhadap laporan pengaduan yang diduga melanggar P3-SPS.

## Data Pengaduan Isi Siaran Periode Tahun 2016-2022



▲ Grafik 3. 3 Pengaduan Isi Siaran Periode Tahun 2016-2022

Berdasarkan saluran yang dipakai untuk mengadu, terdapat 11 (sebelas) jenis saluran pengaduan yang digunakan yaitu 2 saluran resmi pengaduan yang teregistrasi, 1 saluran mitra/ lembaga yang terhubung dengan aplikasi KPI dan 8 saluran yang bisa dijadikan informasi awal. Dari 511 jumlah aduan yang masuk, saluran Website yang paling banyak mendapatkan aduan yaitu sebanyak 263 (51,5%) aduan.

Berikutnya, saluran pengaduan lainnya yaitu melalui Twitter sebanyak 103 (20,1%) aduan, Instagram sebanyak 41 (8%) aduan, Facebook sebanyak 37 (7,2%) aduan, WhatsApp sebanyak 25 (4,9%) E-mail sebanyak 21 (4,1%), Surat Masuk sebanyak 18 (3,6%), Tatap Muka sebanyak 2 (0,4%) dan SMS sebanyak 1 (0,2%) aduan.

## 6. Lembaga Penyiaran TV dan Kategori Program Dengan Indeks Kualitas Program Siaran di Atas 3

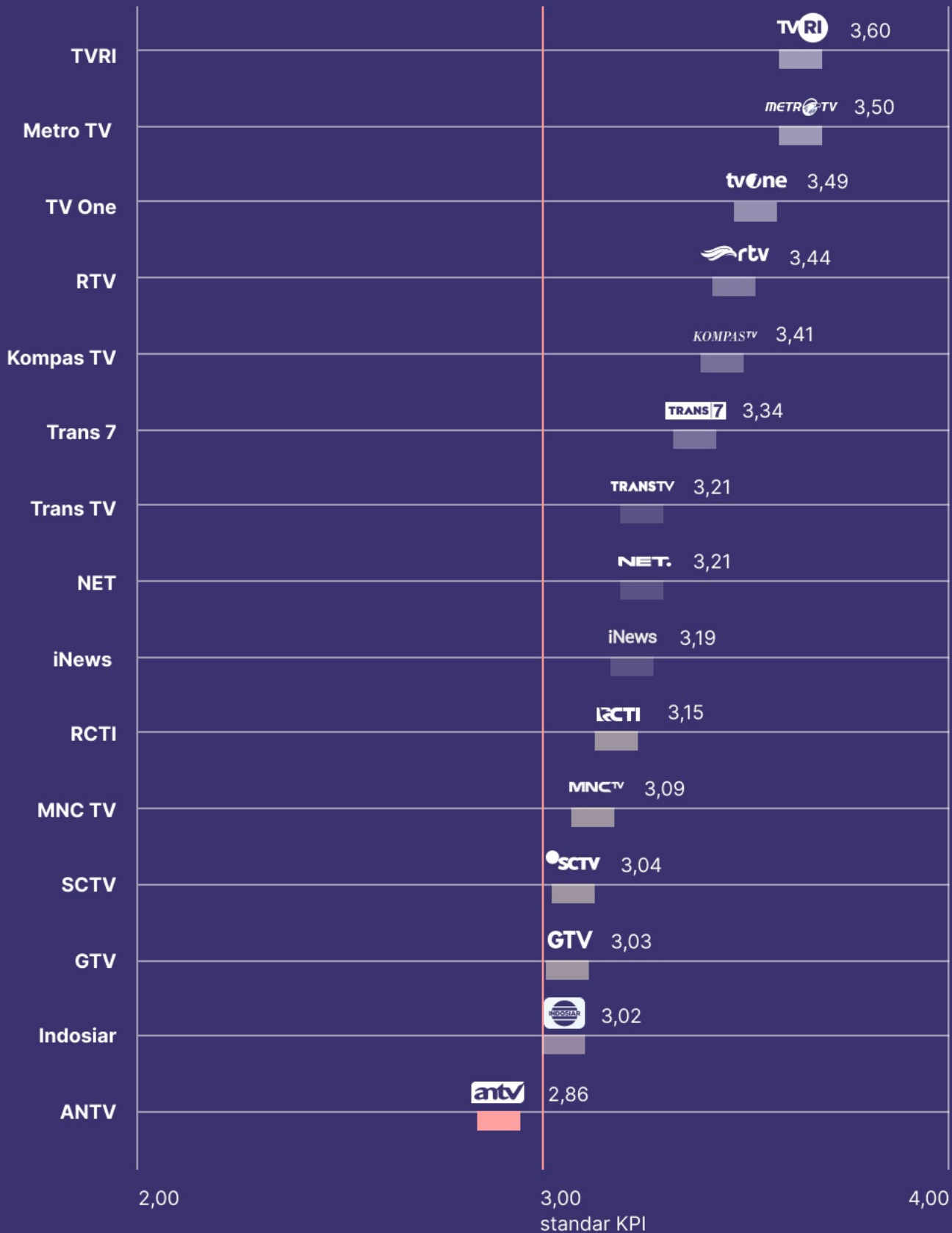
Berdasarkan amanat Pasal 4 dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran disebutkan bahwa penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial untuk mewujudkan program siaran yang berkualitas, namun hal tersebut belum sepenuhnya optimal, salah satu tantangan terbesar dalam menghadapi permasalahan ini dikarenakan program siaran stasiun televisi banyak dipengaruhi oleh jumlah penonton program siaran atau *rating*.

Persoalan *rating* menjadi perhatian berbagai pihak termasuk Komisi Penyiaran Indonesia sebagai regulator penyiaran. KPI sebagai representasi publik di bidang penyiaran memiliki tugas dan fungsi agar program siaran televisi dapat berkualitas sesuai dengan kebutuhan publik.

Dengan kalimat lain dalam menyajikan program siaran stasiun televisi tidak hanya berdasarkan pada hasil *rating* yang hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi atau bisnis melainkan juga memperhatikan kepentingan publik dan amanah Undang-Undang Penyiaran. Kuatnya pengaruh kepentingan ekonomi politik stasiun televisi membuat harapan konten siaran yang berkualitas belum berjalan optimal. Karena itu KPI melakukan riset indeks kualitas program siaran televisi. Riset ini selain bertujuan menilai kualitas program siaran televisi, KPI juga menginginkan adanya data mandiri yang berbasis riset untuk memperkuat dasar keputusan KPI dalam pengambilan kebijakan penyiaran. Hasil riset tersebut diuraikan pada grafik di bawah ini:



## Indeks Rata-Rata Program Siaran TV Tahun 2022



\*) ANTV merupakan lembaga penyiaran dengan indeks kualitas program siaran di bawah 3

Pada grafik di atas, dari 15 Lembaga Penyiaran (LP) terdapat 14 LP yang memiliki indeks rata-rata di atas standar KPI (3.00) yaitu, yaitu TVRI (3.60), Metro TV (3,50), RTV (3.44), Kompas TV (3.41), TV One (3.49), iNews (3.19), Trans 7 (3.34), RCTI (3.15), Trans TV (3.21), MNC TV (3.09), NET (3.21), indosiar (3.02), GTV (3.03), dan SCTV (3.04) dan lembaga penyiaran TV yang nilainya di bawah 3 yaitu ANTV (2.86).

## 7. Jumlah Wartawan yang Mendapat Pelatihan Jurnalistik

Pers berperan penting dalam sebuah negara demokratis sebagai penyeimbang roda penyelenggaraan negara yang menjadi *check and balance* dalam sistem demokrasi. Pers yang didukung insan wartawan harus memiliki kompetensi jurnalistik terukur antara lain terampil dalam teknis jurnalistik, taat pada Kode Etik Jurnalistik dan berpengetahuan atau berwawasan luas agar fungsi pers dapat berjalan secara optimal.

Tujuan program ini antara lain adalah untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan sesuai dengan jenjangnya. Menegakkan kemerdekaan pers perlu dilakukan demi kepentingan publik dan menghindari penyalahgunaan profesi kewartawanan. Dewan Pers memberikan syarat kepada wartawan agar bisa diakui atau sah berkiprah pada dunia pers maka diharuskan untuk mengikuti program sertifikasi melalui kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

Pada tahun 2022, wartawan yang telah mendapatkan pelatihan jurnalistik adalah sebanyak 1.960 orang dan 1.792 orang di antaranya telah tersertifikasi jurnalis. Jika dibandingkan dengan jumlah wartawan yang ada di Indonesia sebanyak lebih dari 100.000 orang, tentu angka capaian ini masih sangat kecil namun Dewan Pers akan meningkatkan intensitas kegiatan pendidikan/pelatihan jurnalistik dan UKW. Intensifikasi pelatihan jurnalistik dan penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan ini diharapkan bisa mencapai tujuan dan sasaran menjaga kemerdekaan pers yang profesional dan demokrasi yang sehat.

Adapun capaian kategori program dengan indeks kualitas siaran di atas 3 adalah sebanyak 6 (enam) dari 8 kategori program yang berkualitas sesuai dengan standar KPI (3,00) dengan rincian kategori program Religi memperoleh indeks tertinggi yaitu 3,53 dan sementara untuk lima kategori lainnya adalah Talkshow (3,46), Wisata dan Budaya (3,44), Berita (3,31), Variety Show (3,20) dan Anak (3,18). Adapun kategori program dengan indeks rendah yaitu kategori program infotainment (2,80) dan sinetron (2,70).

## 8. Perusahaan Pers yang Terverifikasi Secara Faktual

Dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Dewan Pers memiliki fungsi dimana salah satunya adalah melakukan pendataan perusahaan pers. Pendataan dimaksudkan untuk melihat apakah perusahaan-perusahaan pers yang ada memenuhi standar tertentu agar pers mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Tujuan dilakukan standardisasi pers yaitu a) melaksanakan asas, peran, dan kewajiban pers; b) mewujudkan fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, serta sebagai lembaga ekonomi; c) mendorong terwujudnya kemerdekaan pers yang profesional berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Capaian atas Jumlah Perusahaan Pers yang Terverifikasi secara Faktual hingga bulan Desember 2022 adalah sebanyak 326 perusahaan pers dari target sebesar 650 perusahaan pers. Jika dibandingkan dengan target, realisasi tidak tercapai dikarenakan adanya perubahan proses pada tahapan verifikasi administrasi dan juga jumlah perusahaan pers yang melakukan pendataan administrasi secara online melalui aplikasi pendataan Dewan Pers mengalami penurunan sehingga berpengaruh terhadap jumlah perusahaan pers yang akan diverifikasi faktual sesuai target yang telah ditetapkan. Menurunnya jumlah perusahaan pers yang melakukan pendataan ke Dewan Pers tersebut antara lain sebagai dampak dari adanya perubahan persyaratan jumlah minimal pegawai perusahaan pers oleh Dewan Pers.

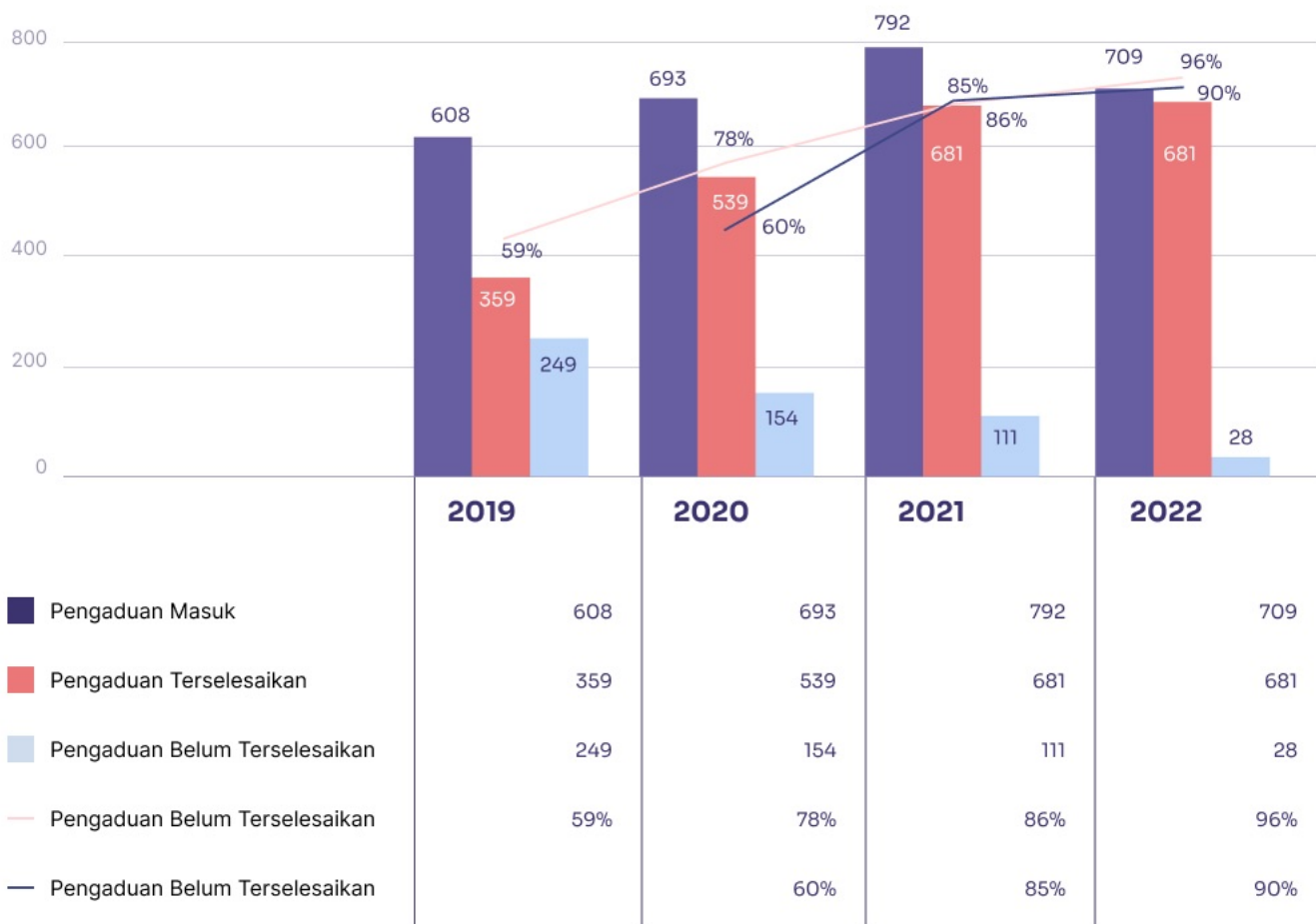
## 9. Pengaduan dan Penegakan Etika Bidang Pers yang Terselesaikan

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers mengamanatkan bahwa dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen. Untuk merealisasikan upaya tersebut, Dewan Pers melaksanakan beberapa fungsi, di antaranya adalah Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik. Dalam rangka mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, Dewan Pers menerima dan memproses pengaduan serta menindaklanjuti informasi dari masyarakat menyangkut dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dan prinsip-

prinsip kemerdekaan pers.

Hal ini sesuai dengan fungsi Dewan Pers untuk memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Pada tahun 2022 Dewan Pers menerima pengaduan sebanyak 709 kasus pers, di dalamnya termasuk 111 kasus tahun 2021 yang diselesaikan pada tahun 2022 dan sampai dengan akhir 2022, kasus yang selesai ditangani adalah sebanyak 681 kasus (96,05%).

### Progres Penyelesaian Pengaduan Bidang Pers Tahun 2019—2022



▲ Grafik 3. 5 Progres Penyelesaian Pengaduan Bidang Pers Tahun 2019—2022

## 10. Nilai Indeks Kemerdekaan Pers

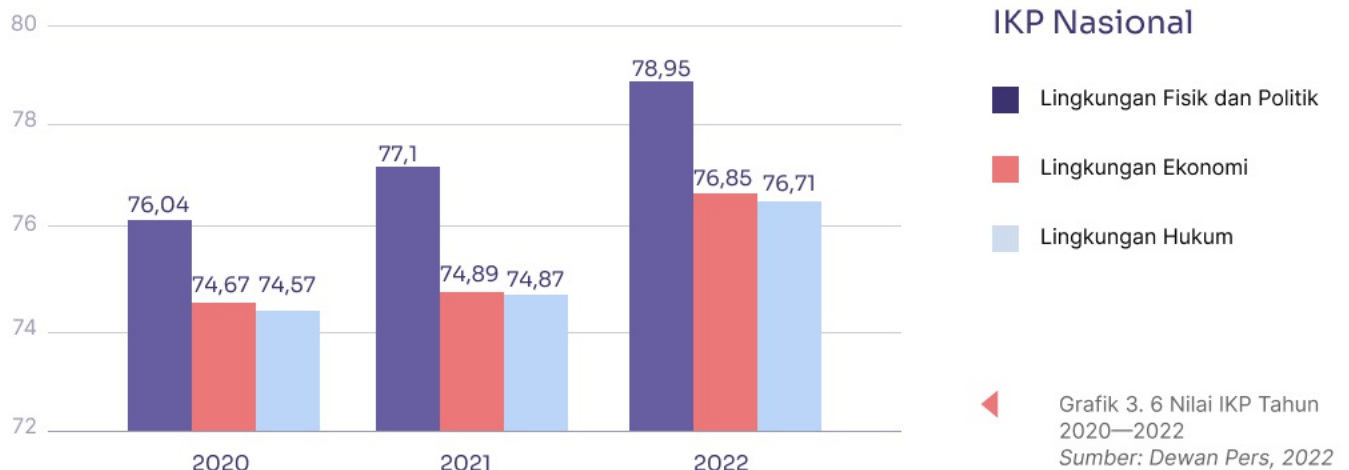
Dewan Pers menyelenggarakan survei Indeks Kemerdekaan Pers (survei IKP) yang merupakan bagian dari upaya memantau perkembangan pelaksanaan hak kemerdekaan pers dari tahun ke tahun. Survei IKP 2022 memotret kondisi kemerdekaan pers sepanjang tahun 2021.

Penyusunan IKP adalah untuk memetakan dan memantau perkembangan pelaksanaan kemerdekaan pers di Indonesia, sehingga bisa diidentifikasi persoalan-persoalan yang menghambat pelaksanaan kemerdekaan pers untuk dilakukan perbaikan-perbaikan.

Sedangkan tujuan pelaksanaan survei IKP 2022 adalah untuk menyusun IKP 2022 yang merupakan gambaran kondisi kemerdekaan pers nasional dan di 34 provinsi di Indonesia dari Januari hingga Desember 2021.

Penyusunan IKP juga dimaksudkan untuk memberi kontribusi bagi peningkatan kesadaran publik akan kemerdekaan pers, serta menyediakan bahan-bahan kajian empiris bagi upaya advokasi kemerdekaan pers di Indonesia.

Survei IKP tahun 2022 menghasilkan nilai IKP Nasional 77,88 yang menggambarkan bahwa secara nasional kemerdekaan pers berada dalam kondisi “Cukup Bebas” selama tahun 2021. Nilai tersebut diperoleh dari tiga kondisi lingkungan, yaitu Lingkungan Fisik dan Politik dengan nilai 78,95, Lingkungan Ekonomi dengan nilai 76,86, dan Lingkungan Hukum dengan nilai 76,71. Secara rinci, hasil survei IKP tahun 2022 dapat dilihat pada grafik berikut:



Berdasarkan grafik di atas, Nilai IKP secara nasional mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 1,86 poin, dimana nilai pada ketiga kondisi lingkungan juga meningkat dari tahun sebelumnya. Indikator hasil IKP 2022 yang mendapatkan nilai tertinggi adalah Kebebasan Berserikat bagi Wartawan dan terendah adalah Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas. Ada beberapa indikator yang mendapatkan nilai lebih cukup tinggi, yaitu indikator Kebebasan Berserikat bagi Wartawan, Kebebasan Media Alternatif, Akses atas Informasi Publik,

Pendidikan Insan Pers, Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers, Keragaman Kepemilikan, dan Kriminalisasi dan Intimidasi Pers. Beberapa indikator dengan nilai tinggi tersebut menggambarkan hadirnya peran negara dalam menjamin kebebasan pers secara nasional, yaitu antara lain, siapapun yang memenuhi syarat dapat mendirikan perusahaan pers, perusahaan pers tidak lagi dihadapkan pada ancaman pembredelan, dan insan pers bebas berserikat tanpa paksaan untuk menjadi anggota salah satu organisasi wartawan.

## 11. Peran Sekretariat Jenderal dalam Forum Internasional

Keikutsertaan Kementerian Kominfo dalam Forum Internasional juga mendapat apresiasi dari sejumlah pihak. Kontribusi Kementerian Kominfo di tingkat internasional meliputi:

### ○ International Telecommunication Union (ITU)

Sidang *Plenipotentiary Conference* merupakan sidang tertinggi International Telecommunication Union (ITU) yang diselenggarakan setiap 4 (empat) tahun sekali untuk menentukan arah dan kebijakan strategis ITU, memilih para pejabat eksekutif (Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Direktur Biro Radiokomunikasi, Direktur Standard Telekomunikasi, dan Direktur Pembangunan Telekomunikasi), anggota *Radio Regulation Board* (RRB), dan anggota Dewan (*Council*), serta, jika diperlukan, melakukan amandemen Konstitusi dan Konvensi ITU.

Dewan ITU merupakan perwakilan 48 negara dari 193 negara anggota ITU yang mempunyai kewenangan untuk menentukan arah kebijakan strategis ITU terutama, namun tidak terbatas pada program kegiatan dan anggaran terkait isu kebijakan telekomunikasi / Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Dewan ITU berperan sebagai organ tertinggi ITU di antara dua *Plenipotentiary Conference*.

Pada sidang ITU *Plenipotentiary Conference* 2022 (PP-22) yang diselenggarakan pada tanggal 26 September s.d. 14 Oktober 2022 di Bucharest, Rumania, Indonesia mencalonkan kembali menjadi anggota Dewan (*Council*) untuk periode 2023 – 2026.

Beberapa strategi utama dalam kemenangan pencalonan kembali Indonesia sebagai anggota Dewan ITU pada sidang ITU PP-22 yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal antara lain sebagai berikut:

- a. Menyusun dan menyampaikan surat permohonan dukungan dari Menteri Kominfo kepada Menteri TIK dari negara-negara anggota ITU, beserta Aide Memoire yang berisi prestasi dan janji Indonesia apabila terpilih kembali menjadi anggota Dewan ITU pada siklus 2023-2026.
- b. Mendukung pelaksanaan kampanye dalam bentuk *social event* “Jakarta Reception” dengan mengundang para Duta Besar negara anggota ITU yang berada di Jakarta, Indonesia.
- c. Mendukung pelaksanaan kampanye dalam bentuk *social event* “Indonesia Night” dengan mengundang para Ketua delegasi dan delegasi sidang ITU PP-22 di Bucharest, Rumania.
- d. Mengkoordinasi pembentukan Tim kampanye yang terdiri dari perwakilan Kementerian Kominfo dan Kemenlu pada sidang ITU PP-22 guna melakukan kampanye dan lobi kepada Ketua Delegasi dan delegasi dari negara-negara anggota ITU.
- e. Pembuatan alat peraga kampanye seperti *leaflet*, *souvenir*, dan video kampanye, guna mendukung promosi penggalangan dukungan bagi Indonesia.
- f. Pelaksanaan koordinasi secara intensif dengan Kementerian Luar Negeri untuk kampanye penggalangan dukungan melalui saluran diplomatik dan pemetaan suara dengan pencalonan Indonesia pada organisasi internasional lainnya



Dengan kerjasama yang baik, Indonesia untuk kesembilan kalinya terpilih kembali menjadi perwakilan anggota Dewan (Council) periode 2023 -2026 dari Kawasan E - Asia dan Australasia. Indonesia berhasil menduduki peringkat ketiga dari 13 negara yang telah terpilih, dengan memperoleh 157 suara.

Dalam sidang ITU PP-22, Indonesia juga dipercaya oleh organisasi Asia-Pacific Telecommunity (APT) untuk menjadi *leading country* dari kawasan Asia Pasifik dalam pembahasan Resolusi 131 tentang *Measuring information and communication technologies to build an integrating and inclusive information society*.

- Dukungan Sekretariat Jenderal dalam Pelaksanaan Digital Economy Working Group (DEWG) dan Digital Economy Ministers' Meeting (DEMM)

Pelaksanaan Digital Economy Working Group (DEWG) dan Digital Economy Ministers' Meeting (DEMM) dihadiri oleh lebih dari 600 delegasi dari negara anggota G20, negara undangan, dan organisasi internasional. Pertemuan DEWG dan DEMM memperundingkan tiga isu prioritas utama yaitu *Connectivity and Post-Covid-19 Recovery, Digital Skills and Digital Literacy, dan Data Free Flow with Trust and Cross-Border Data Flow*.

Dari Pertemuan DEWG dan DEMM tersebut dihasilkan kesepakatan yang tertuang dalam Chair's Summary, di mana anggota G20 menyepakati untuk meningkatkan peran dan kontribusi ekonomi digital untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pembangunan berkelanjutan.

- ASEAN

Beberapa capaian strategis sepanjang tahun 2022 yang telah dilaksanakan Kementerian Kominfo di lingkup kerja sama ASEAN melingkupi:

1. **Substantially concluded upgrading perjanjian AANZFTA sektor telekomunikasi dan e-commerce**  
Kementerian Kominfo sebagai focal point atas upgrading perjanjian ASEAN Australia New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) khususnya pada sektor telekomunikasi dan *e-commerce*, telah mengawal proses perundingan dengan koordinasi bersama satuan kerja dan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait hingga dicapainya kesepakatan atas sejumlah pasal terutama pada *annex on telecommunications* dan *chapter e-commerce*. Proses perundingan upgrading perjanjian AANZFTA saat ini sedang dilanjutkan di tingkat AANZFTA Joint Committee (FJC) dan rencananya akan disahkan pada tahun 2023.

### 3. **Chairmanship ASEAN DTSCWG tahun 2022.**

Kementerian Kominfo mendapatkan kesempatan untuk menjabat sebagai *chair* pada pertemuan ASEAN Digital Trade Standards and Conformance Working Group (DTSCWG) ke-8 dan DTSCWG ke-9, setelah sebelumnya dipimpin oleh Vietnam. *Chair* bertugas untuk memimpin jalannya pertemuan serta menyampaikan hasil pertemuan DTSCWG pada *working group* ASEAN Consultative Committee on Standards and Quality (ACCSQ). Selain itu, pada bulan April 2022, Chair DTSCWG berkesempatan untuk melakukan pertemuan secara bilateral dengan salah satu mitra wicara ASEAN yaitu Australia untuk mendiskusikan program kerja sama ke depan di bawah kerangka kerja ASEAN-Australia Digital Trade Standards and Conformance initiative (AADTSC).

### 4. **Proyek Indonesia tahun 2022 pada forum ASEAN yang disetujui dan diimplementasikan**

Proyek yang disetujui dan diimplementasikan yaitu mengenai *Capacity Building for Government Officials/Staff to 1 Bridge the ASEAN Digital Divide in the Post-COVID19*, dan pada forum Asia Pacific Telecommunity (APT), yaitu *pilot project on Promoting Data Driven Farming Management Practices Using Smart Data Analytics Platform for Improving Agriculture Productivity in West Java*.

### 5. **3 usulan *Priority Deliverables* sektor Digital dan Informasi dalam mendukung Keketuaan ASEAN tahun 2023 yang diterima, terdiri dari**

- a. *ASEAN Framework on Logistics for Digital Economy Supply Chain for Rural Area*
- b. *Regulatory Pilot Space (RPS) to Facilitate Cross-Border Digital Data Flows to Enabling Self-Driving Car in ASEAN*
- c. *Guideline Development on Management of Government Information for Combatting Fake News and Disinformation in the Media*

### 6. **Diterimanya 24 input proposal mengenai kepentingan Indonesia di kawasan Asia Pasifik**

### 7. **Indonesia menduduki posisi penting pada beberapa forum yaitu:**

- a. Vice chair ASEAN Senior Officials Meeting for Information (SOMRI) Working Group on Information, Media and Training (WG-IMT)
- b. Chair Credential Committee Asian-Pacific Postal Union (APPU) Congress ke-13
- c. Working Party Chair pada APT Preparatory Group for WRC-23 (APG-23)
- d. Drafting Group Chair pada APG-23
- e. Working Group Vice Chair pada APT Preparatory Group for ITU PP-22



### 3.3 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Sekretariat Jenderal pada tahun 2022 sebesar Rp660.112.516.012 atau 97,57% dari pagu tahun 2022 sebesar Rp676.573.055.000.

Realisasi penyerapan anggaran terhadap pagu dalam periode tahun 2020—2022 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

2020	<b>Pagu</b>	580.175.844.000
	<b>Realisasi</b>	568.596.741.373
	<b>%</b>	98%
2021	<b>Pagu</b>	458.202.668.000
	<b>Realisasi</b>	440.773.900.363
	<b>%</b>	96,20%
2022	<b>Pagu</b>	676.573.055.000
	<b>Realisasi</b>	660.112.515.992
	<b>%</b>	97,57%

▲ Tabel 3. 35 Tren Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2020—2022

Jika diklasifikasikan per jenis belanja, realisasi penyerapan anggaran Sekretariat Jenderal dalam periode 2020—2022 dapat terlihat dalam tabel berikut:

		<b>Belanja Pegawai</b>	<b>Belanja Barang</b>	<b>Belanja Modal</b>
2020	<b>Pagu</b>	70.326.097.000	479.579.126.000	30.270.621.000
	<b>Realisasi</b>	63.531.566.478	475.268.988.345	29.796.186.550
	<b>%</b>	90,34	99,10	98,43
2021	<b>Pagu</b>	61.287.027.000	302.972.978.000	93.942.663.000
	<b>Realisasi</b>	57.723.121.164	290.662.137.626	92.388.641.573
	<b>%</b>	94,18	95,94	98,35
2022	<b>Pagu</b>	65.700.916.000	434.449.282.000	176.422.857.000
	<b>Realisasi</b>	64.296.750.955	420.446.266.320	175.369.498.737
	<b>%</b>	97,86	96,78	99,40

▲ Tabel 3. 36 Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2020—2022 Berdasarkan Jenis Belanja

Adapun pagu anggaran Sekretariat Jenderal tahun 2020—2022 berdasarkan sumber dana dapat dilihat dalam tabel berikut:

Sumber Dana		
2020	Rupiah Murni	535.821.229.000
	PNBP	44.354.615.000
2021	Rupiah Murni	365.175.907.000
	PNBP	93.026.761.000
2022	Rupiah Murni	676.573.055.000
	PNBP	-

▲ Tabel 3. 37 Tren Pagu Sekretariat Jenderal tahun 2020—2022 berdasarkan Sumber Dana

Untuk pagu dan realisasi kuasi Sekretariat Jenderal dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

#### Kegiatan

Komisi Penyiaran Indonesia	Pagu	59.032.784.000
	Realisasi	56.303.713.379
	%	95,38%
Sekretariat Dewan Pers	Pagu	39.099.370.000
	Realisasi	35.713.938.686
	%	91,34%
Sekretariat Komisi Informasi Pusat	Pagu	34.990.754.000
	Realisasi	34.431.769.744
	%	98,40%

▲ Tabel 3. 38 Realisasi Anggaran Kuasi Sekretariat Jenderal Tahun 2022  
Sumber: Aplikasi SatuDJA, diakses pada tanggal 9 Februari 2023

## 3.4 Penghargaan

Kominfo terus berupaya mengoptimalkan kinerja guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan berkualitas. Selama tahun 2022, terdapat berbagai penghargaan yang diterima Kementerian Kominfo. Beberapa penghargaan yang diterima, di antaranya sebagai berikut:



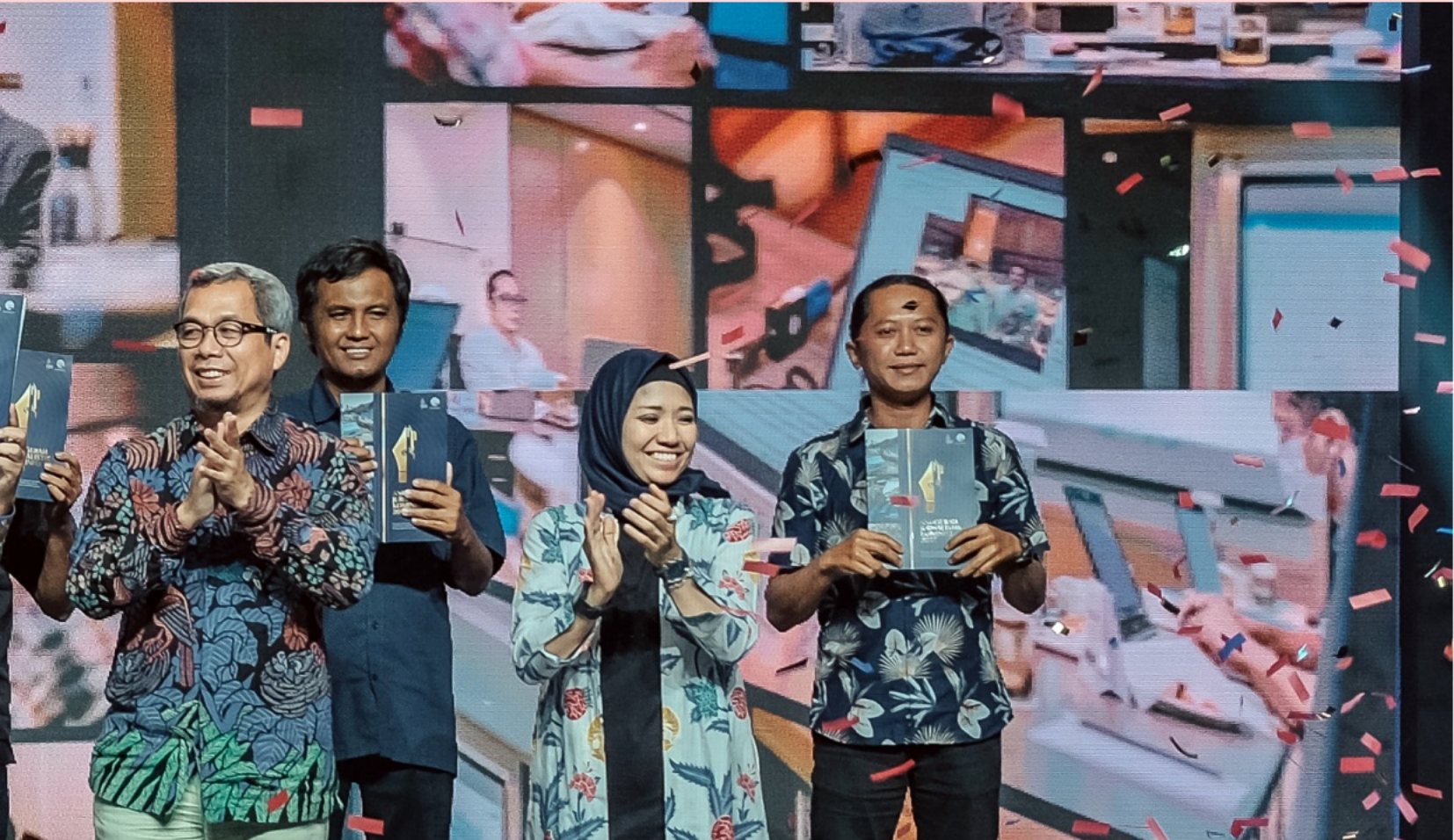
### Opini WTP

Nilai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Kominfo Tahun 2021



### Indeks Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara

- Sangat Baik



**BKN Award**

- Peringkat 1: Pemanfaatan Data Sistem Informasi dan CAT
- Peringkat 5: Implementasi Penerapan Manajemen Kerja



**Penerapan Sistem Informasi Kinerja Terintegrasi dari Badan Kepegawaian Negara**

- Instansi Pilot Project Terbaik III Kategori Kementerian/LPNK



**Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Awards**

Terbaik IV Tahun 2022  
Kategori Kementerian



**Penghargaan Top Digital Awards 2022 (Majalah It Works)**

- TOP CIO on Digital Implementation 2022



▲ Gambar 3. 2 Nilai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Kominfo Tahun 2021



▲ Gambar 3. 3 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Awards Terbaik IV Tahun 2022 Kategori Kementerian



▲ Gambar 3. 4 Piagam Indeks Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara



▲ Gambar 3. 5 BKN Award 2022: Peringkat 1 Pemanfaatan Data Sistem Informasi dan CAT



▲ Gambar 3. 6 BKN Award 2022: Peringkat 5 Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja

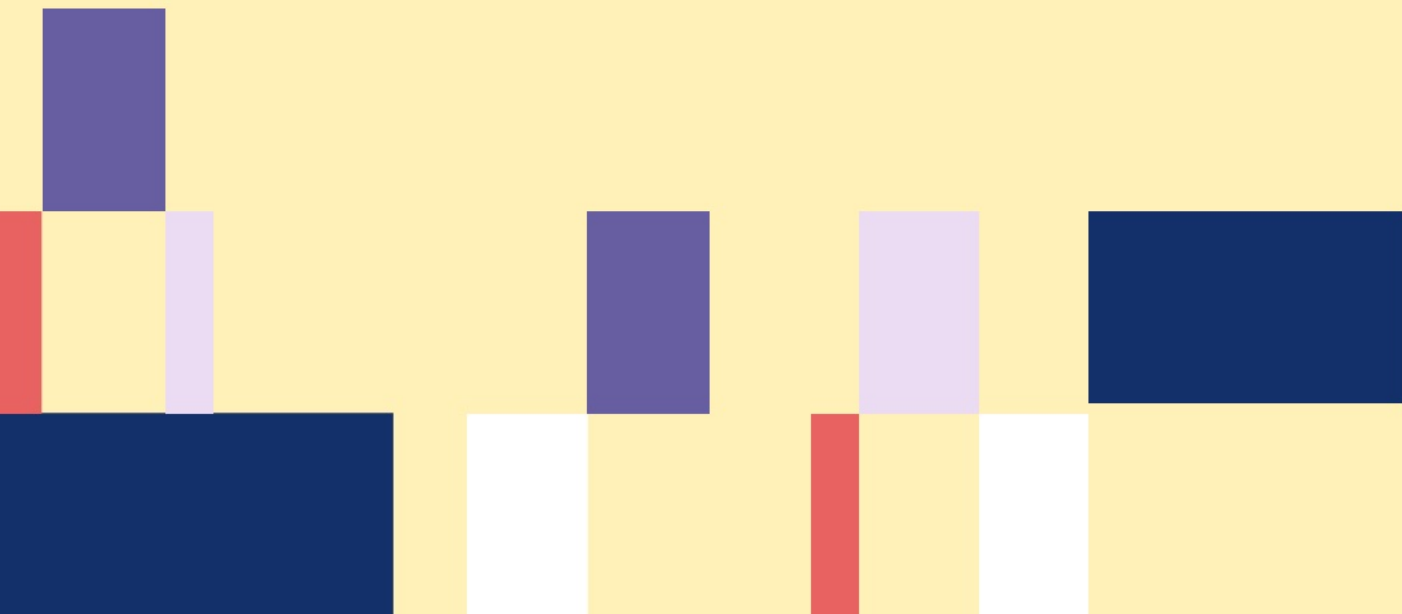


▲ Gambar 3. 7 Instansi Pilot Project Terbaik III Kategori Kementerian/LPNK dalam Penerapan Sistem Informasi Kinerja Terintegrasi

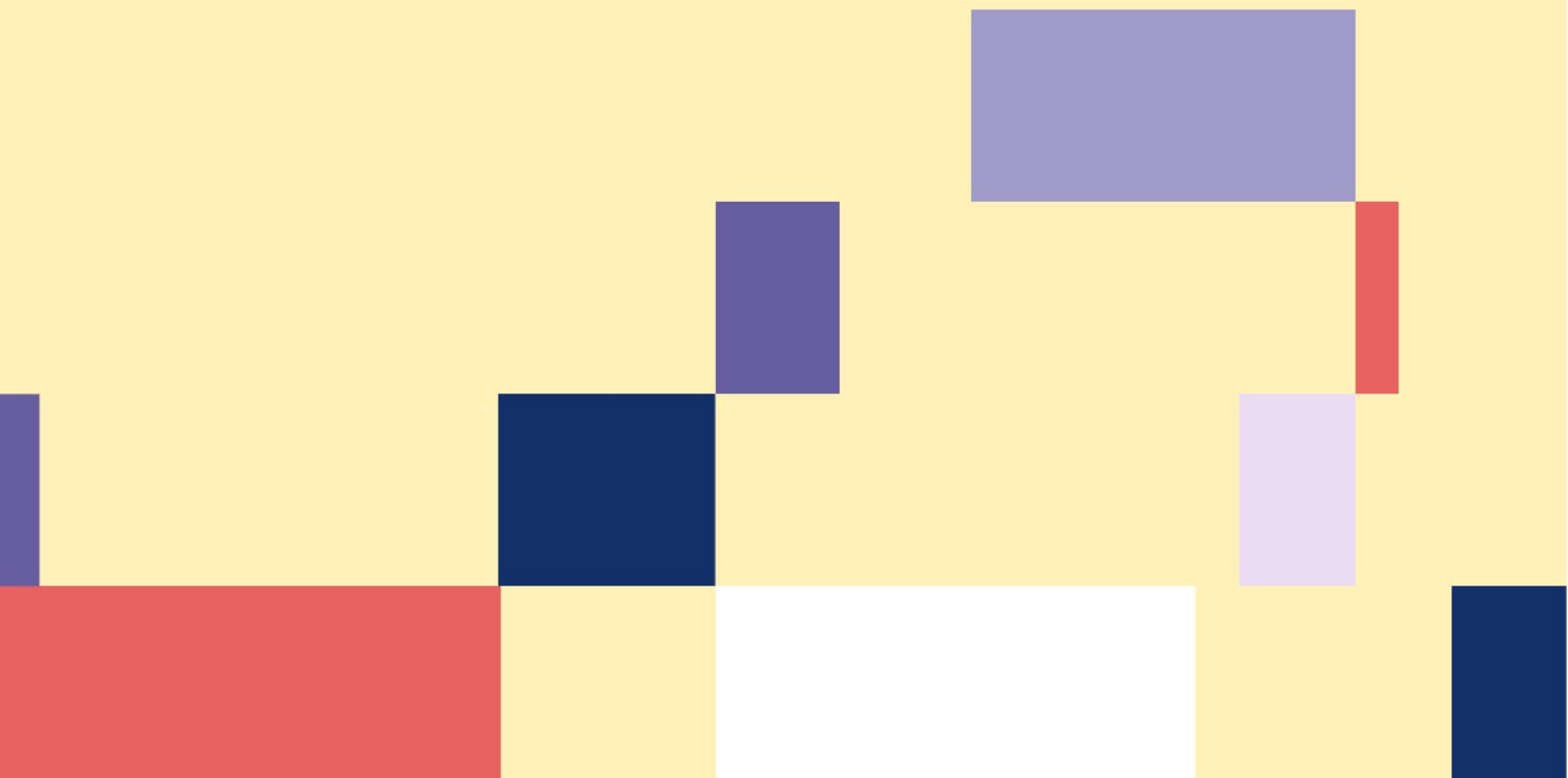
# Penutup

## Bab IV

Sekretariat Jenderal  
Kementerian Komunikasi dan Informatika  
Republik Indonesia



Melalui perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas pengelolaan kinerja dan semangat bekerja bersama, Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo berkomitmen untuk terus mengawal perbaikan berkesinambungan pengelolaan tata kelola dan sumber daya Kementerian Kominfo yang lebih baik.







Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo tahun 2022 menyajikan berbagai keberhasilan capaian kinerja, kendala-kendala yang dihadapi serta proyeksi ke depan dalam rangka Menyusun strategi untuk meningkatkan kinerja. Sepanjang tahun 2022, Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan.

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2020—2024 dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2022 yang secara umum memuat 2 (dua) Sasaran Program (SP) dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Program (IKP).

Sepanjang penyelenggaraan program dan kegiatan pada tahun 2022, capaian kinerja Sekretariat Jenderal terbilang baik, dimana Sebagian besar target yang telah ditetapkan dapat dicapai. Namun, masih terdapat indikator kinerja yang belum mencapai target, yaitu indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Kominfo dan indikator kinerja Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Kominfo.

Untuk meningkatkan kinerja yang belum sesuai target yang diharapkan, Sekretariat Jenderal terus berupaya untuk meningkatkan sistem manajemen kinerja yang terintegrasi sehingga potensi atas risiko tidak tercapainya suatu target kinerja dapat dimitigasi. Selain itu, kendala yang terjadi pada tahun 2022 menjadi pembelajaran dan fokus perbaikan kinerja untuk tahun mendatang.

Sekretariat Jenderal juga akan terus melakukan upaya perbaikan dalam rangka memberikan dukungan layanan yang prima dalam rangka menyelenggarakan prioritas Kementerian Kominfo. Sesuai peran Sekretariat Jenderal sebagai penanggung jawab manajemen internal dan organisasi, Sekretariat Jenderal juga senantiasa mendorong keterlibatan dan komitmen seluruh satuan dan unit kerja Kementerian Kominfo dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja. Sekretariat Jenderal juga akan lebih memperkuat sinkronisasi program dan kegiatan serta anggaran untuk memperkuat koordinasi agar tercipta efektivitas pencapaian kinerja dan efisiensi sumber daya.

# Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : **Mira Tayyiba**  
**Jabatan** : **Sekretaris Jenderal**  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

**Nama** : **Johnny G. Plate**  
**Jabatan** : **Menteri Komunikasi dan Informatika**  
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Jakarta, 28 Januari 2022

Pihak Kedua,



Johnny G. Plate

Pihak Pertama,



Mira Tayyiba

## SEKRETARIAT JENDERAL

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET 2022
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien	1. Indeks Reformasi Birokrasi berdasarkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB): a. Kementerian Kominfo b. Sekretariat Jenderal	a. 80 (skala 1-100) b. 80 (skala 1-100)
		2. Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kominfo	87
		3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Kominfo (berdasarkan penilaian KemenPAN RB)	3,9 (skala 1-5)
		4. Indeks Profesionalitas ASN Kementerian Kominfo	65 (skala 1-100)
		5. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Kominfo (berdasarkan penilaian BPKP)	3,00 (skala 1-5)
		6. Opini terhadap Laporan Keuangan Kementerian Kominfo	WTP
2.	Tercapainya Target PNBPN Kementerian Kominfo	Persentase (%) Realisasi Target PNBPN Kementerian Kominfo	100% (Rp.24.755.383.648.000,-)

Kegiatan		Anggaran
1.	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Rp. 42.985.060.400,-
2.	Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp. 44.522.711.000,-
3.	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Sekretariat Jenderal	Rp. 311.753.329.000,-
4.	Legislasi dan Litigasi	Rp. 11.019.914.000,-
5.	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika	Rp. 52.700.672.000,-
6.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	Rp. 45.450.000.000,-
7.	Pengelolaan Administrasi dan Kerjasama Internasional	Rp. 71.120.982.000,-
8.	Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik	Rp. 38.239.133.000,-
9.	Peningkatan Kualitas Konten Penyiaran	Rp. 66.628.792.000,-
10.	Penguatan Lembaga Pers dan Jurnalis	Rp. 45.071.382.000,-

Jakarta, 28 Januari 2022

Menteri Komunikasi dan Informatika,



Johnny G. Plate

Sekretaris Jenderal,



Mira Tayyiba

**Manual Indikator Kinerja  
Perjanjian Kinerja Level  
Eselon I Sekretariat  
Jenderal Tahun 2022**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET 2022
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien	1. Indeks Reformasi Birokrasi berdasarkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB): a. Kementerian Kominfo b. Sekretariat Jenderal	a. 80 b. 80
		2. Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kominfo	87
		3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Kominfo (berdasarkan penilaian Kementerian PAN & RB)	3,9 (skala 1-5)
		4. Indeks Profesionalitas ASN Kementerian Kominfo	65 (skala 1-100)
		5. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Kominfo (berdasarkan penilaian BPKP)	3,00 (skala 1-5)
		6. Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Kominfo	WTP
2.	Tercapainya Target PNBK Kementerian Kominfo	Persentase (%) Realisasi Target PNBK Kementerian Kominfo	100% (Rp. 24.755.383.648.000)

## MANUAL PENGUKURAN CAPAIAN TARGET

(5)

- a. Berdasarkan Hasil Penilaian Kementerian PAN dan RB Terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Kominfo tahun 2022
- b. Berdasarkan Hasil Penilaian Internal (Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo) Terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Kominfo tahun 2022

Penilaian atas kinerja anggaran Kementerian Kominfo yang dilakukan oleh Kementerian keuangan dengan gabungan nilai SMART (60%) dan IKPA (40%)

Pengukuran Indeks SPBE yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB

Penilaian yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan metode pengukuran SAPK

Penilaian dan assessment oleh Tim Penilai dari BPKP

Berdasarkan Hasil Penilaian BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kominfo tahun 2021

$$n = \sum \text{Realisasi Target PNBPN (Ditjen SDPPI + Ditjen PPI + Ditjen APTIKA + BLSDM + BAKTI)}$$

Total realisasi target PNBPN sebesar Rp. 24.755.383.648.000, dengan rincian sebagai berikut:

1. Ditjen SDPPI: Rp. 19.778.353.398.000
2. Ditjen PPI: Rp. 1.197.250.408.000
3. Ditjen APTIKA: 2.440.842.000
4. Balitbang SDM: Rp. 19.309.000.000
5. BAKTI: Rp. 3.758.030.000.000

## Lampiran 3. Pernyataan Hasil Reviu



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI  
INSPEKTORAT JENDERAL  
INSPEKTORAT IV

*Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju*

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta 10110 Telp./Fax. (021) 3855025 www.kominfo.go.id

### NOTA DINAS

Nomor : 363/IJ.5/PW.05.01/05/2023

Kepada Yth. : Kepala Biro Perencanaan  
Dari : Inspektur IV  
Hal : Laporan Tindak Lanjut Hasil Reviu Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2022  
Klasifikasi : Terbatas  
Lampiran : Satu berkas  
Tanggal : 5 Mei 2023

Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor 1052/SJ.1/PR.04.02/04/2023 tanggal 18 April 2023 Hal Permohonan Reviu Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2022, bersama ini kami sampaikan Laporan Tindak Lanjut Hasil Reviu terlampir.

Berdasarkan reviu yang telah dilakukan terhadap dokumen dan data dukung terkait Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2022 dapat kami simpulkan bahwa **tidak terdapat** kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Plt. Inspektur Jenderal.

# Lampiran 4. Dokumentasi Kegiatan Pengelolaan Kinerja dan Risiko dengan Pihak Internal dan Eksternal Kementerian Kominfo





# Lampiran 5. Data Dukung

## 1. Indeks Reformasi Birokrasi berdasarkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV 69, JAKARTA 12190  
TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323, SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/ 670 /RB.06/2022  
Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan  
Reformasi Birokrasi Tahun 2022

6 Desember 2022

Yth. **Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika**  
di  
Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, kami telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif, dan analisis yang holistik.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, simpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Komunikasi dan Informatika di tahun 2022 adalah **79,01** atau kategori "**BB**". Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Bobot	2021	2022
<b>A.</b>	<b>Komponen Pengungkit</b>			
	I. Pemenuhan	20,00	19,05	19,05
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,82	7,83
	III. Reform	30,00	20,01	19,51
	<b>Total Komponen Pengungkit</b>	<b>60,00</b>	<b>45,88</b>	<b>46,39</b>



MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/ 7 /M.RB.06/2022  
Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan  
Reformasi Birokrasi  
Tahun 2021

7 Maret 2022

**YTH. BAPAK MENTERI KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA**

**DI**

**JAKARTA**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, kami telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis yang holistik.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, simpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2021 adalah **78,18** dengan kategori "**BB**". Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2020	2021
<b>A.</b>	<b>Komponen Pengungkit</b>			
	<b>I. Pemenuhan</b>	<b>20,00</b>	18,64	19,05
	<b>II. Hasil Antara Area Perubahan</b>	<b>10,00</b>	6,55	6,82
	<b>III. Reform</b>	<b>30,00</b>	19,42	20,01
	<b>Total Komponen Pengungkit</b>	<b>60,00</b>	<b>44,61</b>	<b>45,88</b>



**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/48/M.RB.06/2021

31 Maret 2021

Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan  
Reformasi Birokrasi Tahun 2020

**YTH. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
DI  
JAKARTA**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, kami telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis yang holistik.

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, simpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 adalah 76,28 dengan kategori "BB". Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Bobot	2020
<b>A.</b>	<b>Komponen Pengungkit</b>		
	I. Pemenuhan	20,00	18,64
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,55
	III. Reform	30,00	19,42
	<b>Total Komponen Pengungkit</b>	<b>60,00</b>	<b>44,61</b>
<b>B.</b>	<b>Komponen Hasil</b>		
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,69
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	7,93
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,18
4.	Kinerja Organisasi	10,00	7,87
	<b>Total Komponen Hasil</b>	<b>40,00</b>	<b>31,67</b>
	<b>Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)</b>	<b>100,00</b>	<b>76,28</b>

Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi pada Sekretariat Jenderal TA 2022 dapat di lihat pada Tabel di bawah ini:

Komponen/Subkomponen/Area	Bobot	Nilai PMPRB	Nilai TPI
<b>1. Pengungkit</b>	<b>36,30</b>	<b>32,95</b>	<b>31,20</b>
<b>I. Pemenuhan</b>	<b>14,60</b>	<b>12,83</b>	<b>12,32</b>
1. Manajemen Perubahan	2,00	1,73	1,67
2. Deregulasi Kebijakan	1,00	0,50	0,50
3. Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	2,00	2,00
4. Penataan Tatalaksana	1,00	0,95	0,90
5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	1,40	1,37	1,32
6. Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,45	2,14
7. Penguatan Pengawasan	2,20	1,55	1,51
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	2,28	2,28
<b>II. Reform</b>	<b>21,70</b>	<b>20,13</b>	<b>18,88</b>
1. Manajemen Perubahan	3,00	2,50	1,75
2. Deregulasi Kebijakan	2,00	2,00	2,00
3. Penataan dan Penguatan Organisasi	1,50	1,50	1,50
4. Penataan Tatalaksana	3,75	3,75	3,75
5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	2,00	2,00	1,50
6. Penguatan Akuntabilitas	3,75	3,09	3,09
7. Penguatan Pengawasan	1,95	1,95	1,95
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,75	3,34	3,34

Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dalam tabel di atas, atas kesesuaian bukti dukung pada 8 (delapan) area reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal di komponen Pemenuhan dan komponen Reform diperoleh total nilai **31,20** atau **85,94%** dari nilai maksimum **36,30**.

Adapun nilai reformasi birokrasi yang diajukan unit Sekretariat Jenderal adalah **32,95** atau **90,77%**, sehingga diperlukan *Area of Improvement* (AOI) untuk mencapai nilai yang diajukan (rincian hasil validasi TPI dan *Area of Improvement/Aoi* pada lampiran).

Bersama ini kami sampaikan hasil Evaluasi Tindak Lanjut Validasi Tim Penilai Internal/TPI APIP atas Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2021 pada Sekretariat Jenderal.

Evaluasi tindak lanjut dilakukan terhadap kesesuaian bukti dukung pada 8 (delapan) area di komponen Pemenuhan dan komponen Reform dengan total nilai perolehan 28,93 atau 80% dari nilai maksimum 36.30. Terhadap nilai yang diperoleh tersebut terdapat beberapa catatan yang membutuhkan tindak lanjut, yaitu tidak adanya bukti dukung, kurangnya bukti dukung, dokumen belum diformalkan, dan bukti dukung tidak relevan (rincian hasil validasi TPI dan *Area of Improvement/Aol* yang harus diperbaiki dapat diakses melalui tautan berikut <https://komin.f0/PenilaianRBSetjen2021>. Adapun rekapitulasi perolehan nilai sebagai berikut:

Komponen/Subkomponen/Area	PMPRB	Hasil Validasi
<b>1. Pengungkit</b>	<b>27.75</b>	<b>28.93</b>
<b>I. Pemenuhan</b>	<b>13.55</b>	<b>10.57</b>
1. Manajemen Perubahan	2.00	1.14
2. Deregulasi Kebijakan	1.00	0.50
3. Penataan dan Penguatan Organisasi	2.00	2.00
4. Penataan Tatalaksana	0.97	0.84
5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	1.40	1.19
6. Penguatan Akuntabilitas	2.20	2.50
7. Penguatan Pengawasan	1.70	1.05
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2.28	1.36
<b>II. Reform</b>	<b>14.20</b>	<b>18.36</b>
1. Manajemen Perubahan	0.00	2.50
2. Deregulasi Kebijakan	2.00	2.00
3. Penataan dan Penguatan Organisasi	0.00	0.75
4. Penataan Tatalaksana	3.75	3.75
5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	2.00	1.25
6. Penguatan Akuntabilitas	1.40	2.41
7. Penguatan Pengawasan	1.29	1.95
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1.39	3.75

## 2. Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kominfo

Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika s.d. 31 Desember 2022 (Penarikan tanggal 24 Januari 2023)					
No	Kode K/L	Kementerian/Lembaga	Nilai SMART (60%)	Nilai IKPA (40%)	Nilai Kinerja Anggaran
1	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	96.82	86.36	92.64

Nilai SMART



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nilai IKPA

### INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KL	Nama KL	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Nilai	100.00	70.73	59.10	85.15	95.41	95.20	100.00	99.57	86.36	100%	86.36
			Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
			Nilai Akhir	10.00	7.07	11.82	8.52	9.54	9.52	5.00	24.89			
			Nilai Aspek	85.37			86.97				99.57			

Disclaimer:  
 Sesuai Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022, indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

## 3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Kominfo

No.	Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
13.	Kementerian Kesehatan	2,79	Baik
14.	Kementerian Sosial	1,56	Kurang
15.	Kementerian Ketenagakerjaan	2,90	Baik
16.	Kementerian Perindustrian	1,38	Kurang
17.	Kementerian Perdagangan	3,42	Baik
18.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	2,99	Baik
19.	Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat	3,44	Baik
20.	Kementerian Perhubungan	2,84	Baik
21.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	3,82	Sangat Baik
22.	Kementerian Pertanian	3,44	Baik
23.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2,62	Baik
24.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	2,75	Baik
25.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	2,75	Baik
26.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	3,05	Baik

Lampiran Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1503 Tahun 2021 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2021

#### 4. Indeks Profesionalitas ASN

Terdapat 13 hasil antara Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dilakukan pengukuran oleh instansi *leading sector*, dengan hasil sebagai berikut:

No.	Hasil Antara	Skala	Nilai 2021	Nilai 2022	Sumber Data
1.	Sistem Merit	0-400	289,0	344,0	KASN
2.	Kualitas Kebijakan	0-100	60,87	60,87	LAN
3.	Pengelolaan Aset	0-4	3,32	3,45	Kementerian Keuangan
4.	ASN yang Profesional	0-100	33,10	82,43	BKN
5.	Implementasi SPBE	0-5	3,82	3,82	Kementerian PANRB
6.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	32,65	69,50	LKPP
7.	Kualitas Pengelolaan Anggaran	0-100	87,99	86,35	Kementerian Keuangan
8.	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	4,73	4,62	Kementerian PANRB
9.	Maturitas SPIP	0-5	3	3	BPKP
10.	Kapabilitas APIP	0-5	3	3	BPKP
11.	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	82,08	92,70	Ombudsman Republik Indonesia
12.	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	84,05	87,11	ANRI
13.	Reformasi Hukum	0-100	-	86,20	Kementerian Hukum dan HAM

Nilai Indeks Profesionalitas ASN  
Kementerian Kominfo Tahun 2022

Hasil antara pada Kementerian Komunikasi dan Informatika telah dilakukan pengukuran oleh instansi *leading sector*, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Hasil Antara	Skala	Nilai	Sumber Data
1.	Indeks Sistem Merit	0-400	289	Komisi Aparatur Sipil Negara
2.	Indeks Kualitas Kebijakan	0-100	60,87	Lembaga Administrasi Negara
3.	Indeks Pengelolaan Aset	0-4	3,32	Kementerian Keuangan
4.	Indeks Profesional ASN	0-100	33,10	Badan Kepegawaian Negara
5.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1-5	3,82	Kementerian PANRB
6.	Indeks Tata Kelola Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	32,65	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia
7.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	0-100	87,99	Kementerian Keuangan
8.	Indeks Pelayanan Publik	0-5	4,73	Kementerian PANRB
9.	Indeks Internal Audit <i>Capability Model</i> (Kapabilitas APIP)	0-5	3	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
10.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	0-5	3	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
11.	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	82,08	Ombudsman Republik Indonesia
12.	Indeks Pengawasan Kearsipan	0-100	84,05	Arsip Nasional Republik Indonesia

Nilai Indeks Profesionalitas ASN  
Kementerian Kominfo Tahun 2021

No.	Hasil Antara	Skala	Nilai	Sumber Data
1.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	20 (Kurang)	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2.	Kualitas Pengelolaan Keuangan	0-100	92,34	Kementerian Keuangan
3.	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	93,45 (Sangat Memuaskan)	Arsip Nasional Republik Indonesia
4.	Merit Sistem	0-400	289 (Baik)	Komisi Aparatur Sipil Negara
	Profesionalitas ASN	0-100	61,00 (Rendah)	Badan Kepegawaian Negara
5.	Maturitas SPIP	0-5	3,00 (Terdefinisi)	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6.	Kapabilitas APIP	0-5	3,00 (Integrated)	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Nilai Indeks Profesionalitas ASN  
Kementerian Kominfo Tahun 2020

## 5. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian

### NOTISI HASIL EVALUASI PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sehubungan dengan pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Surat Tugas Direktur Pengawasan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan BPKP Nomor PE.09.02/ST-503/D204/2022 tanggal 3 Oktober 2022, hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 3,089 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi);
- b. Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 2,94 atau telah memenuhi karakteristik Manajemen Risiko Indeks (MRI) pada Level 2; dan
- c. Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 2,74.

Rincian hasil evaluasi sebagai berikut:

No	Fokus Penilaian	Hasil Penilaian Mandiri (PM)	Hasil PM yang sudah dilakukan Penjaminan Kualitas (PK)	Hasil Evaluasi (Ev)	Naik/ Turun (Evaluasi -PK)
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	4,126	3,950	3,089	0,861
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	4,14	3,91	2,94	0,97
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	4,23	4,01	2,74	1,27

Notisi Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Komunikasi Dan Informatika

## 6. Opini terhadap Laporan Keuangan Kementerian Kominfo

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2017	2018	2019	2020	2021
38.	056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
39.	057	Perpustakaan Nasional RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
40.	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
41.	060	Kepolisian Negara RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
42.	063	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
43.	064	Lembaga Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
44.	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
45.	066	Badan Narkotika Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
46.	067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
47.	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
48.	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
49.	075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
50.	076	Komisi Pemilihan Umum	WTP	WDP	WDP	WTP	WTP
51.	077	Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
52.	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
53.	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
54.	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
55.	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
56.	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
57.	083	Badan Informasi Geospasial (sebelumnya: Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021



## 7. Persentase (%) Realisasi Target PNPB Kementerian Kominfo

LAPORAN PENDAPATAN PNPB KEMKOMINFO FUN  
2022

Data per 09-01-23

KODE	NAMA AKUN	JENIS PNPB (FUNGSIONAL/UMUM)	TARGET PNPB T.A. 2022	REALISASI JAN 2022	%	REALISASI FEB 2022	%	REALISASI MAR 2022	%	REALISASI APR 2022	%	REALISASI MEI 2022
<b>A. PNPB NON BLU</b>												
<b>I. DITJEN SDPPPI</b>			19.778.353.398.000	221.687.835.689	1,12%	212.936.395.192	1,08%	2.391.456.679.623	12,09%	1.032.431.898.217	5,22%	139.395.127.354
1	425288	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Komunikasi dan Informatika	213.225.857.000	15.932.600.000	7,47%	12.565.358.000	5,89%	15.452.280.000	7,25%	15.581.120.000	7,31%	10.239.080.000
2	425521	Pendapatan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	19.562.577.541.000	202.474.702.363	1,04%	199.219.801.833	1,02%	2.375.492.573.167	12,14%	1.016.180.216.425	5,19%	128.889.822.797
3	425529	Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika Lainnya	2.550.000.000	277.925.000	10,90%	190.480.000	7,47%	223.825.000	8,78%	158.275.000	6,21%	206.275.000
4	-	PNBP UMUM		3.002.608.326	0,00%	960.755.359	0,00%	288.001.456	0,00%	512.286.792	0,00%	59.949.557
<b>II. DITJEN PPI</b>			1.197.250.408.000	3.472.904.050	0,29%	43.938.066.279	3,67%	47.672.761.579	3,98%	556.957.405.963	46,52%	140.031.815.184
1	425522	Pendapatan Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi	1.147.896.672.000	442.583.296	0,04%	39.862.486.905	3,47%	43.928.406.167	3,83%	552.885.418.515	48,17%	133.821.633.664
2	425523	Pendapatan Izin Penyelenggaraan Penyiaran	46.134.254.000	2.984.067.807	6,47%	4.023.454.071	8,72%	3.655.895.606	7,92%	3.549.219.596	7,69%	2.586.284.635
3	425524	Pendapatan Izin Penyelenggaraan Pos	555.500.000		0,00%	15.000.000	2,70%	70.000.000	12,60%	40.000.000	7,20%	
4	425525	Pendapatan Kontribusi Penyelenggaraan Pos Untuk Pembiayaan Layanan Pos	2.663.982.000	43.751.747	1,64%	26.331.757	0,99%	15.958.606	0,60%	34.237.815	1,29%	3.621.450.285
5	-	PNBP UMUM		2.501.200	0,00%	10.793.546	0,00%	2.501.200	0,00%	448.530.057	0,00%	2.446.600
<b>III. DITJEN APTKA</b>			2.440.842.000	832.506.183	34,11%	16.171.811	0,66%	34.475.128	1,41%	2.557.184.098	104,77%	1.740.408.486
1	425526	Pendapatan Pengelolaan Nama Domain Indonesia	2.440.842.000		0,00%	-	0,00%		0,00%	2.557.062.653	104,76%	
2	-	PNBP UMUM		832.506.183	0,00%	16.171.811	0,00%	34.475.128	0,00%	121.445	0,00%	1.740.408.486
<b>IV. BALITBANG SDM</b>			19.309.000.000	430.636.220	2,23%	6.848.123.317	35,47%	9.847.441	0,05%	648.393.720	3,36%	72.433.508
<b>a) Sekolah Tinggi Multi Media (MMTC) Yogyakarta (432722)</b>			17.000.000.000	75.305.208	0,44%	6.810.918.079	40,06%	5.346.615	0,03%	135.878.815	0,80%	71.916.615
1	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	15.000.000		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
2	425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	315.000.000		0,00%		0,00%		0,00%	59.250.000	18,81%	71.550.000
3	425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	16.543.500.000		0,00%	6.794.150.000	41,07%		0,00%	8.550.000	0,05%	
4	425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	126.500.000		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
5	-	PNBP UMUM		75.305.208	0,00%	16.768.079	0,00%	5.346.615	0,00%	68.078.815	0,00%	366.615
<b>b) BPPTIK Cikarang (67265)</b>			784.000.000	110.861.925	14,14%	118.755	0,02%	118.755	0,02%	125.700.753	16,03%	118.755
1	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	271.000.000		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
2	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	513.000.000		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
3	-	PNBP UMUM		110.861.925	0,00%	118.755	0,00%	118.755	0,00%	125.700.753	0,00%	118.755
<b>c) Balitbang SDM</b>			1.525.000.000	244.469.087	16,03%	37.086.483	2,43%	4.382.071	0,29%	386.814.152	25,36%	398.138
1	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	25.000.000		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
2	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	1.500.000.000		0,00%		0,00%		0,00%	375.000.000	25,00%	
3	-	PNBP UMUM	0	244.469.087	0,00%	37.086.483	0,00%	4.382.071	0,00%	11.814.152	0,00%	398.138
<b>V. KP</b>			0	190.325.515	0,00%	169.155.429	0,00%	7.485.600	0,00%	-	0,00%	-
1	-	PNBP UMUM	0	190.325.515	0,00%	169.155.429	0,00%	7.485.600	0,00%		0,00%	
<b>VI. SETJEN</b>			0	866.242.498	0,00%	1.542.448.359	0,00%	37.098.565	0,00%	29.028.565	0,00%	8.067.197
1	-	PNBP UMUM	0	866.242.498	0,00%	1.542.448.359	0,00%	37.098.565	0,00%	29.028.565	0,00%	8.067.197
<b>VII. ITJEN</b>			0	359.158.461	0,00%	1.960.732	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
1	-	PNBP UMUM	0	359.158.461	0,00%	1.960.732	0,00%		0,00%		0,00%	
<b>Jumlah Non BLU</b>			20.997.353.648.000	227.839.608.616	1,09%	265.452.321.119	1,26%	2.439.218.347.936	11,62%	1.592.623.910.583	7,58%	281.247.851.729
<b>B. PNPB BLU</b>												
<b>VIII. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI)</b>			3.758.030.000.000	39.035.766.539	1,04%	18.364	0,00%	292.169.912.934	7,77%	2.162.093.204.499	57,53%	- 636.616.020.022
1	424116	KPPUUSO	2.869.741.680.000		0,00%		0,00%	199.075.104.412	6,94%	318.362.380.061	11,09%	
2	424911	Perbankan	304.159.569.000		0,00%		0,00%	66.161.522.193	21,75%	25.041.061.996	8,23%	(718.272.706.758)
3	424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	584.128.751.000		0,00%		0,00%	18.324.001.286	3,14%	16.327.621.987	2,80%	
4	-	PNBP UMUM		39.035.766.539	0,00%	18.364	0,00%	8.609.285.043	0,00%	1.802.362.140.455	0,00%	81.656.686.736
<b>Jumlah PNPB BLU</b>			3.758.030.000.000	39.035.766.539	1,04%	18.364	0,00%	292.169.912.934	7,77%	2.162.093.204.499	57,53%	- 636.616.020.022
<b>JUMLAH TOTAL PNPB NON BLU DAN BLU</b>			24.755.383.648.000	266.875.375.155	1,08%	265.452.339.483	1,07%	2.731.388.260.870	11,03%	3.754.717.115.082	15,17%	-355.368.168.293

SIONAL DAN UMUM BERDASARKAN AKUN

%	REALISASI JUN 2022	%	REALISASI JUL 2022	%	REALISASI AUG 2022	%	REALISASI SEP 2022	%	REALISASI OCT 2022	%	REALISASI NOV 2022	%	REALISASI DES 2022	%	GRAND TOTAL S.D. DESEMBER 2022	%
0,70%	202.960.314.309	1,03%	582.716.150.941	2,95%	413.338.404.789	2,09%	1.510.493.410.496	7,64%	202.169.034.951	1,02%	1.450.476.249.853	7,33%	11.486.520.964.833	58,08%	19.846.572.466.247	100,34%
4,80%	15.527.050.000	7,28%	16.252.640.000	7,62%	18.372.545.000	8,62%	19.171.604.000	8,99%	14.332.116.000	6,72%	14.562.300.000	6,83%	16.737.240.000	7,85%	184.725.933.000	86,63%
0,66%	186.766.974.488	0,95%	566.031.378.783	2,89%	394.309.889.248	2,02%	1.490.910.107.768	7,62%	187.638.371.317	0,96%	1.435.228.649.119	7,34%	11.469.313.678.208	58,63%	19.652.456.165.516	100,46%
8,09%	216.725.000	8,50%	200.875.000	7,88%	180.552.000	7,08%	153.575.000	6,02%	158.555.000	6,22%	189.475.000	7,43%	219.126.000	8,59%	2.375.663.000	93,16%
0,00%	439.564.821	0,00%	231.257.158	0,00%	475.418.541	0,00%	258.123.728	0,00%	39.992.634	0,00%	495.825.734		250.920.625		7.014.704.731	0,00%
<b>11,70%</b>	<b>15.159.517.917</b>	<b>1,27%</b>	<b>74.533.427.260</b>	<b>6,23%</b>	<b>232.081.957.108</b>	<b>19,38%</b>	<b>4.734.642.742</b>	<b>0,40%</b>	<b>174.438.963.996</b>	<b>14,57%</b>	<b>10.067.313.002</b>	<b>0,84%</b>	<b>81.336.879.146</b>	<b>6,79%</b>	<b>1.384.425.654.246</b>	<b>115,63%</b>
11,66%	6.796.083.833	0,59%	71.373.590.363	6,22%	227.064.162.216	19,78%	1.599.459.404	0,14%	170.991.590.841	14,90%	6.573.709.152	0,57%	77.839.293.707	6,78%	1.333.178.418.063	116,14%
5,61%	2.293.720.328	4,97%	2.729.841.406	5,92%	4.821.150.636	10,45%	3.082.822.882	6,68%	3.387.500.413	7,34%	2.589.345.714	5,61%	3.248.772.807	7,04%	38.952.075.901	84,43%
0,00%	5.000.000	0,90%	10.000.000	1,80%	35.000.000	6,30%	30.000.000	5,40%	35.000.000	6,30%	25.000.000	4,50%	40.000.000	7,20%	305.000.000	54,91%
135,94%	6.062.267.156	227,56%	65.142.549	2,45%	45.074.868	1,69%	20.000.856	0,75%	22.513.142	0,85%	22.076.150	0,83%	106.553.621	4,00%	10.085.358.552	378,58%
0,00%	2.446.600	0,00%	354.852.942	0,00%	116.569.388	0,00%	2.359.600	0,00%	2.359.600	0,00%	857.181.986	0,00%	102.259.011	0,00%	1.904.801.730	0,00%
<b>71,30%</b>	<b>666.549.371</b>	<b>27,31%</b>	<b>71.297.931</b>	<b>2,92%</b>	<b>2.485.000</b>	<b>0,10%</b>	<b>126.957.688</b>	<b>5,20%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>21.600.000</b>	<b>0,88%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>6.069.635.696</b>	<b>248,67%</b>
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	2.557.062.653	104,76%
0,00%	666.549.371	0,00%	71.297.931	0,00%	2.485.000	0,00%	126.957.688	0,00%		0,00%	21.600.000	0,00%		0,00%	3.512.573.043	0,00%
0,38%	5.797.445.967	30,02%	2.451.034.508	12,69%	6.140.713.940	31,80%	438.436.089	2,27%	1.276.609.374	6,61%	244.537.267	1,27%	207.632.684	1,08%	24.565.844.029	127,22%
0,42%	4.448.641.615	26,17%	2.378.266.615	13,99%	5.941.414.115	34,95%	79.791.614	0,47%	552.366.614	3,25%	128.366.615	0,76%	91.417.455	0,54%	20.719.629.975	121,88%
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	-	0,00%
22,71%	78.900.000	25,05%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	209.700.000	66,57%
0,00%	4.313.875.000	26,08%	2.377.900.000	14,37%	5.768.787.500	34,87%	17.425.000	0,11%		0,00%		0,00%		0,00%	19.280.687.500	116,55%
0,00%	55.500.000	43,87%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	128.000.000	101,19%		0,00%	183.500.000	145,06%
0,00%	366.615	0,00%	366.615	0,00%	172.626.615	0,00%	62.366.614	0,00%	552.366.614	0,00%	366.615	0,00%	91.417.455	0,00%	1.045.742.475	0,00%
<b>0,02%</b>	<b>20.393.755</b>	<b>2,60%</b>	<b>55.808.755</b>	<b>7,12%</b>	<b>8.214.755</b>	<b>1,05%</b>	<b>118.755</b>	<b>0,02%</b>	<b>408.454.755</b>	<b>52,10%</b>	<b>5.923.755</b>	<b>0,76%</b>	<b>10.358.755</b>	<b>1,32%</b>	<b>746.192.228</b>	<b>95,18%</b>
0,00%	20.275.000	7,48%	5.770.000	2,13%		0,00%		0,00%		0,00%	5.805.000	2,14%	10.240.000	3,78%	42.090.000	15,53%
0,00%		0,00%	49.920.000	9,73%	8.096.000	1,58%		0,00%	408.336.000	79,60%		0,00%		0,00%	466.352.000	90,91%
0,00%	118.755	0,00%	118.755	0,00%	118.755	0,00%	118.755	0,00%	118.755	0,00%	118.755	0,00%	118.755	0,00%	237.750.228	0,00%

%	REALISASI JUN 2022	%	REALISASI JUL 2022	%	REALISASI AUG 2022	%	REALISASI SEP 2022	%	REALISASI OCT 2022	%	REALISASI NOV 2022	%	REALISASI DES 2022	%	GRAND TOTAL S.D. DESEMBER 2022	%
0,03%	1.328.410.891	87,11%	16.959.138	1,11%	191.085.070	12,53%	358.525.720	23,51%	315.788.005	20,71%	110.246.897	7,23%	105.856.474	6,94%	3.100.021.826	203,28%
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	800.000	3,20%	800.000	3,20%
0,00%	1.025.000.000	68,33%		0,00%	187.500.000	12,50%	350.000.000	23,33%	287.500.000	19,17%	50.000.000	3,33%	12.500.000	0,83%	2.287.500.000	152,50%
0,00%	303.410.591	0,00%	16.959.138	0,00%	3.585.070	0,00%	8.525.720	0,00%	28.288.005	0,00%	60.246.897	0,00%	92.556.474	0,00%	811.721.826	0,00%
0,00%	30.186.486	0,00%	183.100.198	0,00%	179.001.666	0,00%	161.250.000	0,00%	100.000.000	0,00%	308.000.000	0,00%	529.184.000	0,00%	1.857.688.894	0,00%
0,00%	30.186.486	0,00%	183.100.198	0,00%	179.001.666	0,00%	161.250.000	0,00%	100.000.000	0,00%	308.000.000	0,00%	529.184.000	0,00%	1.857.688.894	0,00%
0,00%	7.067.397	0,00%	11.704.701	0,00%	17.067.197	0,00%	33.320.610	0,00%	142.122.343	0,00%	784.827.047	0,00%	177.124.157	0,00%	3.656.118.636	0,00%
0,00%	7.067.397	0,00%	11.704.701	0,00%	17.067.197	0,00%	33.320.610	0,00%	142.122.343	0,00%	784.827.047	0,00%	177.124.157	0,00%	3.656.118.636	0,00%
0,00%	69.099.999	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	133.380.000	0,00%	534.514.978	0,00%	1.098.114.170	0,00%
0,00%	69.099.999	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	133.380.000	0,00%	534.514.978	0,00%	1.098.114.170	0,00%
<b>1,34%</b>	<b>224.680.181.440</b>	<b>1,07%</b>	<b>659.966.715.539</b>	<b>3,14%</b>	<b>651.759.629.700</b>	<b>3,10%</b>	<b>1.515.988.017.625</b>	<b>7,22%</b>	<b>378.126.730.664</b>	<b>1,80%</b>	<b>1.462.035.907.169</b>	<b>6,96%</b>	<b>11.569.306.299.798</b>	<b>55,10%</b>	<b>21.268.245.521.918</b>	<b>101,29%</b>
-16,94%	2.306.127.522.566	61,37%	34.564.552.361	0,92%	226.043.850.305	6,01%	612.241.734.040	16,29%	342.127.424.420	9,10%	172.366.202.239	4,59%	92.217.622.073	2,45%	5.642.371.790.318	150,14%
0,00%	1.512.988.286.380	52,72%	4.048.120.997	0,14%	177.338.927.619	6,18%	568.013.528.552	19,79%	297.708.704.551	10,37%	134.914.231.071	4,70%	26.538.437.811	0,92%	3.238.987.721.454	112,87%
-236,15%	772.158.523.766	253,87%	24.561.452.335	8,08%	22.824.670.821	7,50%	25.457.651.494	8,37%	27.631.591.638	9,08%	16.880.161.419	5,55%	33.789.130.925	11,11%	296.233.059.829	97,39%
0,00%	20.440.826.749	3,50%	5.829.349.524	1,00%	25.759.031.210	4,41%	18.343.402.898	3,14%	16.674.062.107	2,85%	20.467.124.686	3,50%	31.239.837.248	5,35%	173.405.257.695	29,69%
0,00%	539.885.671	0,00%	125.629.505	0,00%	121.220.655	0,00%	427.151.096	0,00%	113.066.124	0,00%	104.685.063	0,00%	650.216.089	0,00%	1.933.745.751.340	0,00%
-16,94%	2.306.127.522.566	61,37%	34.564.552.361	0,92%	226.043.850.305	6,01%	612.241.734.040	16,29%	342.127.424.420	9,10%	172.366.202.239	4,59%	92.217.622.073	2,45%	5.642.371.790.318	150,14%
-1,44%	2.530.807.704.006	10,22%	694.531.267.900	2,81%	877.803.480.005	3,55%	2.128.229.751.665	8,60%	720.254.155.084	2,91%	1.634.402.109.408	6,60%	11.661.523.921.871	47,11%	26.910.617.312.236	108,71%

